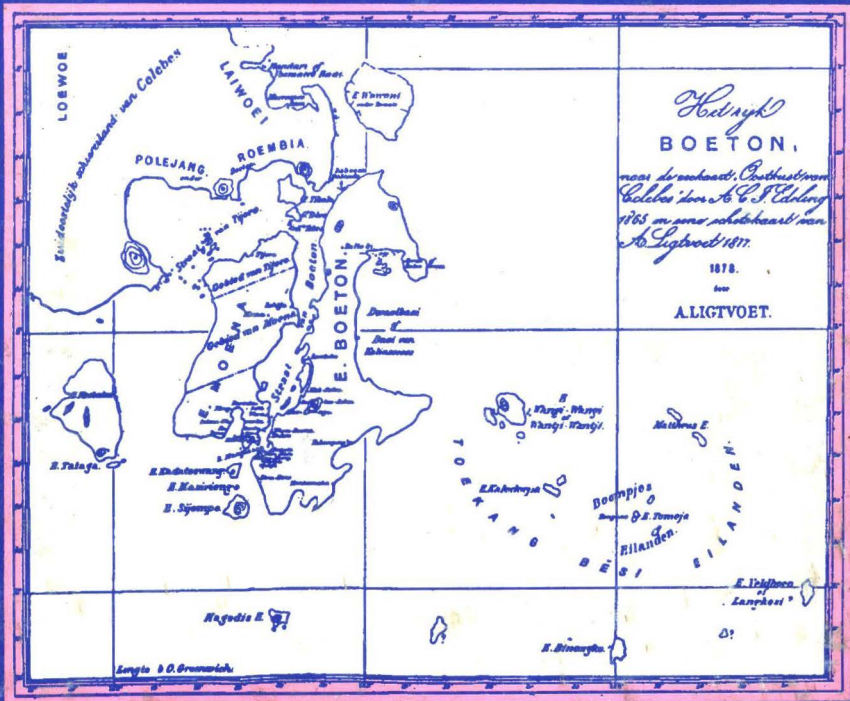


KERAJAAN TRADISIONAL SULAWESI TENGGARA :

Kesultanan Buton



KERAJAAN TRADISIONAL SULAWESI TENGGARA : **Kesultanan Buton**

Tim Penulis :
Susanto Zuhdi
G.A. Ohorella
M. Said D.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1996

TERPUSJAKAN

REKOR CENTRAL KOLUM N

597/059

H

9/3-78

KERAJAAN TRADISIONAL SULAWESI TENGGARA :

Kesultanan Buton

Tim Penulis : Susanto Zuhdi
G.A. Ohorella
M. Said D

Penyunting : R.Z. Leirissa

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Jakarta 1996

Edisi 1996

Dicetak oleh : CV. DEFIT PRIMA KARYA, Jakarta



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara : Buton* merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994/1995.

Penulisan Sejarah *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara : Buton* ini merupakan salah satu bagian dari penulisan kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia yang dilakukan Proyek ISDN secara bertahap.

Buku ini memuat ikwal Sejarah Kerajaan Tradisional Buton dalam berbagai aspek. Di antaranya tentang sejarah, geografi, perkembangan kemasyarakatan, sejarah perkembangan kekuasaan dan pemerintahan, ekonomi perdagangan, proses islamisasi, interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain, interaksi dengan VOC, serta usaha-usaha untuk mempertahankan diri terhadap kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah kesejarahan dan memberi informasi yang memadai bagi masyarakat yang berminat pada kajian tersebut. Di samping itu

diharapkan dapat menjadi bahan bagi peningkatan kesadaran sejarah masyarakat pada umumnya.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu teriaksananya penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, November 1996

**Pimpinan Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. G.A. Ohorella', with a large, stylized flourish above the name.

Dra. G.A. Ohorella

PENGANTAR

Penulisan naskah Kesultanan Buton ini telah membawa kami kepada pengalaman tersendiri yang menyenangkan dan penuh tantangan. Pertama, karena tantangan untuk dapat menulis suatu sejarah kerajaan dengan tinjauan atau yang bercirikan tradisional ternyata tidak mudah. Persoalan kriteria 'tradisional' itu sendiri. Kedua, justru karena sudah ada suatu kajian sejarah kesultanan Buton (Zahari 1977) sebanyak tiga jilid telah membuat kami berpikir bagaimana tidak berada di bawah kerangka buku yang sudah ada itu. Ketiga, sebagai konsekwensi dari masalah yang kedua, maka kami berusaha mencari dan mempergunakan sumber primer terutama dari arsip. Namun demikian buku Zahari, di sana sini masih kami pergunakan, karena ada bagian-bagian yang tidak kami temukan di Sumber arsip.

Adanya seorang di dalam tim kami (drs. M. Said) yang berasal dari daerah Buton, telah mempermudah sebagian pekerjaan penelitian. Ia telah menyumbangkan sejumlah sumber yang tidak kami peroleh di Jakarta. Kerjasama seperti ini kami rasakan sangat bermanfaat.

Sudah tentu masih banyak kekurangan dalam naskah ini, Kritik dan saran dapat menyempurnakan hasil penulisan ini, kami sangat harapkan dari para pembaca budiman.

Jakarta, Maret 1995

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktorat Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup	2
1.5 Metodologi dan Sumber	4
Bab II Kekuasaan Kesultanan Buton	
2.1 Keadaan Geografi dan Penduduk	5
2.2 Bentuk dan Corak "Negara" Awal dan Pengaruh Islam	11
2.3 Birokrasi Kesultanan	26
2.4 Barata sebagai Sistem Pemerintahan dan Pertahanan	50
Bab III Kesultanan Buton dari Perjanjian Bungaya 1667 sampai Perjanjian Bungaya yang diperbaharui 1824	
3.1 Interaksi dengan Kerajaan Ternate, Gowa, dan Bone	63
3.2 Menghadapi konflik dari Dalam Kerajaan	84

3.3	Kontak dan Reaksi dengan VOC	95
3.4	Reaksi terhadap kekuasaan VOC	110
Bab IV Masuknya Kesultanan Buton ke dalam kekuasaan Kolonial Hindia Belanda (1824--1906)		
4.1	Perjanjian Bungaya yang diperbaharui 1824 : Antara Isi dan Implikasi	117
4.2	Perjanjian 1873 : Masuknya Buton ke dalam wilayah Pemerintahan Hindia Belanda	124
4.3	Perjanjian Panjang "Asyikin-Brugman" 1906	129
Simpulan		135
Daftar Pustaka		137
Lampiran		145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu upaya untuk memahami sejarah Indonesia yang mencakup kurun waktu panjang dan berdimensi banyak, kiranya dapat disederhanakan dengan mengkategorisasikan menjadi 3 perkembangan : Masa Kerajaan-Kerajaan Tradisional, Masa Kolonial dan Masa Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian ketiga perkembangan itu bukan merupakan pembabakan yang ketat. Sebab Perkembangan itu di dalam prosesnya dapat berjalan secara tumpang tindih.

Konsep 'tradisional' yang digunakan disini mengacu kepada bentuk dan ciri-ciri lokal yang telah lama berakar pada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada umumnya unsur integratif kerajaan itu adalah faktor agama-agama Hindu, Budha dan Islam memperlihatkan proses-prosesnya sendiri yang memberikan corak Nusantara. Periode ini dapat pula disebut sebagai Masa Nusantara. Ada Corak-corak kerajaan agraris dan ada pula yang maritim, atau campuran dari keduanya.

Sebagai suatu negara-negara (*nation-state*), akar nasion Indonesia belumlah lama. Gejalanya baru dapat diamati pada awal abad ke-20. Sebelumnya periode itu sejarah 'Indonesia' dalam artian politik pada umumnya mengacu pada kerajaan-kerajaan yang ditopang oleh salah satu suku-bangsa yang dominan nasion "Indonesia lama" sebagai bandingan dengan nasion yang "baru". Dengan lain perkataan nasion lama dapat dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan tradisional, yang

merupakan pengejawantahan secara politik sukubangsa-sukubangsa, yang tiada lain dikenal sebagai 'nasion lama' itu.

Sampai sekarang historiografi Indonesia belum banyak yang mengkaji kerajaan-kerajaan tradisional dalam kerangka permasalahan diatas, apalagi kerajaan yang bercorak aspek-aspek maritim. Salah satu dari kerajaan bercorak maritim di Indonesia adalah Kesultanan Buton. Kerajaan Buton memiliki sejarah yang panjang dan sekaligus merupakan kerajaan yang dapat mengintegrasikan wilayahnya terutama di daerah Sulawesi Tenggara sekarang. Dilihat dari perkembangan sejarah Indonesia, maka penting sekali untuk mengkaji periode kerajaan tradisional ini.

1.2 Permasalahan

- (1) Bagaimana bentuk, struktur dan corak birokrasi kerajaan Buton?
- (2) Seberapa jauh Kesultanan Buton dapat mengintegrasikan wilayahnya?
- (3) Faktor-faktor apa yang mendukung proses integrasi itu?
- (4) Bagaimana proses perkembangan Kesultanan Buton dalam menghadapi persoalan internal maupun eksternal sampai dengan masuk ke dalam kekuasaan kolonial Hindia Belanda?

1.3 Tujuan

Penulisan ini bertujuan memaparkan bentuk dan corak Kesultanan Buton sebagai kerajaan tradisional dan memberikan uraian mengenai kemampuannya menjawab persoalan-persoalan baik yang datang dari dalam dan luar.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan berkisar dari pemaparan cikal bakal kerajaan Buton dan pengaruh Islam sampai masuk ke dalam kekuasaan Hindia Belanda. Dilihat dari jangkauan periodisasi maka akan mencakup mulai sekitar abad XV sampai awal abad XX. Tema

pembahasan akan lebih diberikan kepada aspek politik dengan tidak mengabaikan aspek-aspek sosial dan budaya.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka penulisan ini disajikan dalam empat bab yang terdiri atas; bab Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sumber serta sistematika penulisan. Dalam bab II dengan judul Kekuasaan Kesultanan Buton menguraikan tentang keadaan geografi dan penduduk kesultanan yang merupakan hasil asimilasi berbagai suku bangsa yang saling bertemu di wilayah yang berada di jalur perdagangan. Bab ini menguraikan juga tentang bentuk dan corak negara awal yang sangat tradisional kemudian berproses menuju suatu bentuk yang lebih formal dan kemudian dipengaruhi oleh agama Islam yang masuk ke sana pada sekitar abad 13. Selanjutnya diuraikan tentang birokrasi kesultanan dan Barata sebagai sistem pemerintahan dan pertahanan.

Bab III yang diberi judul Kesultanan Buton dari Perjanjian Bungaya sampai dengan Perjanjian Bungaya yang diperbaharui, menguraikan tentang interaksi kerajaan Buton dengan kerajaan Ternate Goa dan Buton serta kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya. Bagaimana Buton menghadapi permasalahan-permasalahan intern diuraikan dalam sub bab menghadapi konflik dari dalam kerajaan, kemudian kontak kerajaan Buton dengan VOC dan reaksi yang timbul akibat kontak tersebut. Selanjutnya diakhir bab ini dikemukakan reaksi terhadap kekuasaan Compani Belanda (VOC). Pada bab IV yaitu masuknya Kesultanan Buton ke dalam kekuasaan Kolonial Hindia Belanda diuraikan tentang Perjanjian Bungaya yang diperbaharui dan perjanjian tahun 1873 yang memasukkan Buton ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda serta Perjanjian Panjang antara Sultan Asyikin dan pihak Compani yang diwakili Brugman.

Sajian ini diakhiri dengan simpulan bahwa Buton adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang berinteraksi dengan pihak luar serta perkembangannya yang ditentukan oleh berbagai faktor terutama faktor internal dan external.

1.5 Metodologi dan Sumber

Yang dimaksud dengan metodologi disini meliputi metode penelitian dan pendekatan terhadap obyek kajian, terutama dalam hal penulisannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Langkah awal dari metode ini adalah heuristik, yakni kegiatan mengumpulkan sumber yang dianggap relevan dengan rumusan atau topik penelitian. Langkah kedua adalah menilai sumber yang terkumpul itu, dengan pertanyaan apakah sumber patut dapat dipercaya. Tahap kedua ini menyangkut masalah kredibilitas sumber. Langkah ketiga dan keempat merupakan rangkaian kegiatan interpretasi atau menafsirkan fakta dan mensintesakannya dalam bentuk penulisan sejarah.

Dalam hal pendekatan kajiannya dipakai konsep-konsep ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Politik. Beberapa konsep mengenai hegemoni politik dalam hubungan patron dan hamba (*Patron-client*), maupun hegemoni kultural digunakan juga sebagai pendekatan terhadap kajian tentang Kesultanan Buton.

Sumber-sumber penulisan antara lain berupa *Sejarah Darul Fij Butuni*. Buku ini dijadikan kerangka yang menyeluruh. Akan tetapi rinciannya dilengkapi dengan kontrak-kontrak perjanjian antara Kesultanan Buton dengan VOC maupun Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Lebih dari itu secara metodologi, sumber buku itu harus dicocokkan dengan sumber-sumber arsip, karena sebagian berdasar dari tradisi lisan. Artikel sezaman yang diterbitkan oleh majalah masa kolonial Belanda juga digunakan sebagai sumber.

Sumber-sumber itu sebagian besar dapat diperoleh di Arsip Nasional dan Perpustakaan. Sedapat mungkin sumber-sumber naskah yang tersimpan di Buton dan Kendari akan digunakan juga.

BAB II

KEKUASAAN KESULTANAN BUTON

2.1 Keadaan Geografi dan Penduduk

Buton adalah salah satu pulau terbesar diantara pulau yang berada di selatan/tenggara jazirah Sulawesi Tenggara. Sejak awal abad 14 nama Buton telah terkenal di Nusantara, sebagai daerah yang berada dalam batas pengawasan Majapahit. Hal itu seperti yang ditulis Mpu Prapanca dalam *Negarakertagama* pupuh XIV bait ke 5. Pulau-pulau lain yang ada disekitarnya adalah pulau Muna, pulau Kaba Ena, pulau Wowoni dan kepulauan Tukang Besi atau Wakatobi (pp. Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko). Ternyata pulau-pulau tersebut kemudian diketahui berada dibawah kekuasaan dan pengaruh Buton sebagai suatu pemerintahan. Menurut Ligtoet wilayah pengaruh Buton atau wilayah Kesultanan Buton meliputi : pulau-pulau Buton, Muna, Kabaena, pulau-pulau kecil sekitar Buton dan Muna, yaitu p.Tikola, p.Tobeya, p. Kadatowang, p. Makasar, p. Bata Oga, p. Masiring, p.Siompu dan Talaga. Kearah selatan terdapat kepulauan Tukang besi yang terdiri dari pulau Wangi-wangi atau Wanci, Kaledupa atau Caydoepa, Tomiya, Kapota, Langkesi dan Binongko, serta daerah-daerah Poleang dan Rumbia di ujung Barat daya jazirah Sulawesi Tenggara. (A. Ligtoet : 1878).

Dengan wilayah kekuasaan seperti tersebut diatas maka dapat ditentukan bahwa batas-batas kerajaan/kesultanan Buton adalah :

- Di Utara berbatasan dengan kerajaan Luwu, Laiwui dan pulau Wawoni yang merupakan daerah pengaruh kerajaan Ternate;

- Sebelah Timur berbatasan dengan laut Banda/Selat Maluku;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Wilayah Kerajaan Buton tersebut terletak pada 121 40' Bujur Timur dan 124 50' Bujur Timur serta 4 2' Lintang Selatan dan 6 20' Lintang Selatan. Dengan batas-batas kerajaan tersebut maka wilayah Buton langsung berhubungan dengan laut Flores, laut Banda dan laut Seram sehingga keadaan lautnya banyak dipengaruhi oleh laut-laut tersebut. Seperti diketahui laut-laut itu sangat dipengaruhi angin muson Barat dan angin muson Timur. Disamping itu perairan Buton dipengaruhi pula oleh teluk Bone dan teluk Tolo. Wilayahnya terdiri dari pulau-pulau sehingga terdapat banyak selat. Didekat garis pantai terdapat banyak gosong dan karang serta muara-muara sungai. Wilayah kekuasaan yang relatif luas itu dahulu berawal dari suatu areal yang sangat kecil saja di pulau Buton.

Cikal bakal wilayah kesultanan Buton adalah daerah Kalampa di desa Katobengeke kecamatan Betoambari kota Bau-bau Pulau Buton. Menurut tradisi lisan setempat wilayah ini merupakan pemukiman pertama dari tokoh-tokoh utama (primus interparis) kerajaan Buton Wolio. Di tempat inilah mereka membatilkan (Welia) untuk mendirikan tempat tinggal mereka. Dari wilayah ini kemudian berkembang ke arah timur di daerah Tobe-tobe. Daerah ini adalah suatu "Kerajaan" lain yang bersatu dengan Wolio atas jalan damai karena kepala daerahnya (rajanya) menjalin hubungan baik dengan Wolio. makin lama Wolio terus berkembang dengan berdirinya pemukiman-pemukiman baru di sekitar Kalampa dan Wolio. Pemukiman-pemukiman tersebut berkembang menjadi kampung dan yang terkenal adalah Kampung Gundu-gundu dan Barangkatopa. (Haziroyen : Agustus 1994).

Sering dengan perkembangan wilayah, masyarakatnya pun terus berkembang. Pimpinan masyarakat Gundu-gundu dan Barangkatopa dikukuhkan dengan gelar "Bonto" atau Menteri. Kemudian masuk pula daerah Kamaru akibat perkawinan putri raja Kamaru dengan putra penguasa di Barangkatopa. Beberapa lama kemudian tumbuh dua kampung lagi yaitu Peropa dan Baluwu. Dengan demikian sudah

terbentuk empat kampung sebagai wilayah awal kerajaan Buton yang masing-masing dipimpin atau dikepalai seorang *bonto* atau menteri.

- (1) Wiayah Barangkatopa dikepalai bonto Sitamanajo.
- (2) Wilayah Gundu-gundu dikepalai bonto Sijawangkati.
- (3) Wilayah Peropa dikepalai bonto Betoambari.
- (4) Wilayah Baluwu dikapalai bonto Sangiariarana.

Keempat bonto atau menteri ini merupakan suatu lembaga atau badan pemerintahan yang disebut Patalimbona (Adat Fiy Darul Butuni I : 1977).

Dari waktu ke waktu wilayah kekuasaan wolio semakin meluas dan lembaga pemerintahan pun semakin berkembang dan bervariasi. Tumbuh lagi empat orang menterinya hingga menjadi delapan, ditambah lagi seorang menteri dengan gelar *Melai* menjadi sembilan orang . Kesembilan orang menteri ini kemudian didalam lembaga kerjaan/kesultanan Buton dikenal dengan Siolimbona artinya sembilan menteri utama.

Pada masa Raja Buton ketiga yaitu Batara Guru yang nama aslinya Pancapatola, daerah kekuasaan bertambah luas lagi. Daerah baru tersebut diserahkan kepada Ki Jula Putra Batara Guru dari selirnya dengan Gelar *Sapati*. Sapati pertama yang dikenal dengan nama La Manjawari diberitakan berkedudukan di pulau Koba-Ena. Pulau ini terkenal sebagai daerah yang subur ditumbuhi tanaman padi atau "Koba". Mungkin karena ditumbuhi tanaman padi itulah orang Buton menamakannya Koba Ena artinya tempat tanaman padi yang banyak atau banyak padi. Mungkin hal itu pula yang mendorong kerajaan Buton berusaha menguasai pulau Koba Ena sebagai lumbung persediaan makanan.Sapati La Manjawari berkuasa disana sampai akhir hayatnya. Makamnya ditemukan disana dipegunungan Enano. (Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara : 1980).

Selanjutnya dalam masa pemerintahan Raja Buton keempat yaitu Tuarade, wilayah kekuasaan bertambah luas sampai kedaerah Todanga. Bataoga dan Wawoangi. Kemudian dalam masa pemerintahan Raja Buton kelima dan Raja Buton keenam Wolio telah menjalin hubungan politik dengan Luwu, Konawe dan Muna atau

Pancana. Melalui perkawinan “politik” antara putra putri raja, daerah-daerah tersebut berada dibawah pengaruh kekuasaan Buton. Demikian pula daerah Poleang dan Rumbia di selatan jazirah Sulawesi Tenggara mengakui kekuasaan kerajaan Buton.

Dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan Buton yang mencakup hampir seluruh pulau-pulau diselatan Sulawesi Tenggara, maka wilayah pemerintahan kerajaan tersebut dapat dibedakan atas :

- (a) *Wilayah inti* yaitu meliputi wilayah bonto dan wilayah *bobato*. Wilayah bonto adalah pengembangan dari wilayah utama yang terdiri dari empat kampung (Mia Patamiana) menjadi tigapuluh negeri yang disebut *kadi*. Sedangkan wilayah bobato adalah pengembangan dari sembilan kampung atau *Siolimbona* atau *Siolimpuna* menjadi tiga puluh kadi masing-masing dikepalai seorang *Lakina*.
- (b) *Wilayah Moronene* terdiri dari pulau Koba Ena, Poleang dan Rumbia. Ketiga wilayah ini merupakan penopang ekonomi yang utama bagi kerajaan Buton. Kepala pemerintahan di Koba Ena disebut Sapati sedang di Poleang dan Rumbia disebut *Mokole*. Kedua wilayah ini berada dibawah Bontona Wandailolo dan Bontona Somba Marusu.
- (c) *Wilayah Barata* yaitu daerah yang dianggap dan diharapkan dapat menjaga keamanan dan kestabilan kerajaan dari kekuasaan asing. Daerah Barata meliputi Muna, Tiworo, Kalingsusu dan Kaledupa.
Pulau-pulau lainnya yang berdekatan dengan Kaledupa yaitu Tomia, Wangi-wangi, Wanci-wanci dan Binongko dalam perkembangan kemudian berada pula dibawah kekuasaan Buton.

Dengan wilayah seluas itu dan pulau-pulau yang tersebar diperairan antara laut Banda, laut Maluku dan laut Flores yang selalu mengalami berbagai pergantian musim, maka dapat diramalkan bahwa penduduk Buton mestilah orang-orang pemberani yang dapat menembus badai dan gelombang dalam mempertahankan eksistensi wilayahnya dari usaha interfensi asing.

Wilayah kesultanan Buton ini dikenal oleh dunia luar pada masa pemerintahan Sultan Dayyanu Ikhsanuddin antara tahun 1597/1631.

Pada masa tersebut bangsa Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Buton dalam suatu ekspedisi yang dipimpin Commodor Afolonius Schot. Ia tiba pada 5 Januari 1613 dan membuat perjanjian atas nama Belanda (VOC) dengan Kesultanan Buton. VOC diizinkan membangun benteng (loji) di Buton dan berdagang dalam daerahnya. sebaliknya Belanda (VOC) berjanji untuk melindungi Buton dari musuh-musuhnya (A. Lightvoet :1878).

Sejak masa tersebut kerajaan Buton dan P. Buton sendiri mulai dieksploitasi oleh VOC. Buton kemudian semakin dikenal berkat hasil tambangnya butas (aspal). Pertanian didaerah ini kurang menghasilkan karena tanah di pulau Buton dan di sekitarnya kurang baik untuk ditanami. Namun pada masa lalu penduduk pernah menanam cengkeh dan pala untuk didagangkan. Konon pada masa tersebut kesultanan buton merupakan salah satu penghasil rempah-rempah yang cukup berarti disamping kepulauan Maluku. Penduduknya hidup dari hasil ladang dan kebun serta melaut menangkap ikan. Selain itu penduduk juga hidup dari berniaga, baik didaerah kepulauan tersebut maupun ke pulau-pulau atau daerah-daerah lain.

Penduduk Buton termasuk ras deutro Melayu yang penyebarannya dimulai dari daratan Asia melalui Annam, Tonkin, Indo Cina, Kamboja terus ke Asia Tenggara kepulauan. Ada pula informasi yang menyebutkan bahwa penyebaran penduduk di Sulawesi Tengah, Timur dan Tenggara dimulai dari sentral gelombang penyebarannya di sekitar danau Metana di Sulawesi Tengah. (Sejarah Kebangkitan Daerah Sulawesi Tenggara : 1978/1979). Gelombang penyebaran tersebut boleh jadi akibat peperangan antar suku dan penyakit menular yang mewabah. Penduduk yang menyebar ke arah selatan secara berangsur-angsur, dengan melalui sungai Lasolo dan Konawe Eha di Jazirah Sulawesi Tenggara dan terus melalui pelayaran-pelayaran lokal yang membawa suku-suku Tolaki, Moronene, Buto dan Muna ke daerah-daerah tempat tinggal mereka sekarang ini. Gelombang perpindahan/penyebaran penduduk seperti ini hampir sama dengan penyebaran penduduk di beberapa daerah lain, yang dikemukakan oleh beberapa tulisan “asing” seperti buku “Structure of Central Selebes”. (Sejarah Kebangkitan Daerah Sultra 1978/1979).

Sementara itu penduduk setempat memiliki ceritera-ceritera rakyat yang juga mengisahkan asal-usul nenek moyang mereka. Menurut cerita yang sudah didiskripsikan bahwa penduduk Kesultanan Buton adalah turunan dari 4 orang tokoh yang pertamanya menginjakkan kakinya di pulau Buton. Keempat orang utama itu disebut Mia Patamia. Diceritakan di dalam buku "Sejarah Adat Darul Fij Butuni I bahwa ± pada akhir abad 13 tiba disana empat orang tokoh yaitu Sipanjonga, Sitamanajo, Sijawangkti dan Simalui seorang wanita.

Konon mereka berasal dari tanah semenanjung Johor di Malaka. Sipanjonga dan Simalui, ketika tiba di Buton mendarat di Kelampa sedang Sitamanajo dan Sijawangkti mendarat di Welalagusi. Mereka kemudian bersatu di Kalampa dan berusaha membangun tempat tinggal. Daerah yang dibangun masih merupakan belukar dan ilalang, sehingga mereka harus menebas dan membersihkan belukar dan ilalang tersebut. Pekerjaan pembersihan itu disebut "Welia", yang kemudian berubah menjadi Wolio. Lama kelamaan penduduk di daerah ini dan keturunannya disebut orang Wolio. Kemudian dalam perkembangannya menjadi Kerajaan Buton Wolio.

Geografi wilayah yang terdiri dari kepulauan dan sebagian besar terdiri dari lautan, membentuk penduduk Buton terkenal ulet dan pemberani. Mungkin juga karena asal-usul mereka dari tanah Semenanjung Malaka yang jauh, yang harus mengarungi lautan dan atau penyeberangan mereka dari sumber penyebarannya dari danau Matana di jazirah Sulawesi Tenggara. Kondisi itu menempa mereka menjadi pelaut-pelaut yang ulung dan manusia yang penuh daya juang untuk mempertahankan hidupnya. Sebelum kedatangan kelompok tersebut diatas diduga telah berdiam suku-suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk asli atau unsur dari Proto Melayu. Mereka itu adalah orang-orang Katobengke, orang Wara di Buton, orang Labora di Muna dan orang Moronene dan Toare di daratan Sulawesi Tenggara. Percampuran antara suku-suku bangsa tersebut dan suku-suku lainnya yang mungkin singgah disana dalam pelayaran-pelayaran mereka, telah membentuk orang-orang Buton sekarang ini dengan beraneka ciri fisik dan antropologisnya.

Orang-orang Kaledupa dan Tomia misalnya memiliki ciri-ciri Kaukasia, yang masih dominan. Mereka memiliki bentuk kepala yang memanjang, wajah oval dengan dagu yang menggantung agak ke depan, hidung mancung, mata bulat, rambut ikal dan tinggi badan yang lumayan. Sementara orang Wolio terutama keluarga Keraton Wolio, lebih menampakkan ciri-ciri Deutro melayu dan Mongoloid. Diantaranya kulit kuning, mata ada yang sipit ada yang bulat, rambut kejur (lurus), tinggi sedang, bentuk wajah bulat dan bulat telur. Disamping kedua ciri itu, orang Buton maupun penduduk Kesultanan Buton memiliki beberapa kesamaan dengan penduduk atau orang-orang di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bahkan Sulawesi Selatan. Mereka adalah orang-orang yang kreatif dan penuh vitalitas, ulet dan pemberani dengan jalinan kekerabatan yang kuat dan akrab. Kekerabatan itu diperkuat lagi dengan komunikasi antara penduduk yang tersebar di berbagai pulau dengan menggunakan satu lingua franca atau bahasa pengantar yaitu “Bahasa Wolio” padahal di daerah bekas Kesultanan Buton itu dewasa ini, dikenal beberapa bahasa dengan dialek-dialek yang berbeda di antaranya Bahasa Muna (Wuna), Bahasa Wolio (Buton), Bahasa Pancana, Bahasa Cia-cia, dan Bahasa Suai.

Pada umumnya penduduk beragama Islam setelah Sultan Morhum mengumumkan dirinya sebagai penganut agama Islam sejak tahun 1500 an

2.2 Bentuk dan Corak “negara” Awal dan Pengaruh Islam

Berdasarkan beberapa sumber lokal menjelaskan bahwa wilayah Buton semula berbentuk pemerintahan kerajaan, yang diperintah oleh keturunan Dinasti Wa Khaa-Khaa yang berkuasa selama \pm 2 abad. Pemerintahan Raja I, dimulai \pm tahun 1332 dan berakhir pada tahun 1538 yang ditandai dengan pelantikan Raja Lakilaponto sebagai Sultan I dengan gelar Sultan Muhammad Kaimuddin atau Sultan Marhum.

Perubahan bentuk pemerintah dari sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan disebabkan oleh masuknya pengaruh agama Islam di Buton yang dibawah oleh Syeikh Abdul Wahid, seorang penyebar agama Islam berkebangsaan Arab berasal dari semenanjung Melayu (Johar).

2.2.1 *Bentuk dan Corak negara Awal*

Adalah jasa para imigran yang datang dari Sumatera dan Semenanjung Melayu serta daerah lain di Nusantara, memberikan arti penting bagi proses pembentukan Kerajaan Buton. Diceriterakan bahwa pada abad ke-13 dan awal abad 14 daerah Buton menerima kedatangan dua rombongan imigran yang berasal dari Melayu-Johor. Rombongan tersebut dipimpin oleh empat orang tokoh yang masing-masing bernama Sipanjonga, Sijawangkti, Sitamanajo dan Simalui. Kedua rombongan ini mendarat di Buton pada tempat yang berbeda yaitu rombongan pertama dipimpin oleh Sipanjoga dan Sijawangkti mendarat di Sulaa Kalampa wilayah Betoambari sekarang. Rombongan ini masuk ke Buton melalui laut Flores ke perairan Buton Selatan bagian Barat, yang sesungguhnya telah merupakan jalur pelayaran Nusantara yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang. Sedangkan Rombongan kedua yang dipimpin oleh Sitomanajo dan Simalui, masuk melalui perairan Buton Utara bagian Barat kemudian menyusuri Selat Buton masuk di daerah Buton Tengah bagian Barat dan akhirnya memilih tempat pendaratannya di Welalagusi wilayah Kapontori sekarang. Kedua rombongan itu meninggalkan daerah asalnya Johor karena masalah-masalah politik dalam negeri di kerajaannya (Haziroyen : September 1994). Mereka berangkat secara terpisah, bersama para pengikutnya masing-masing yang akhirnya bertemu dalam pengembaraan, lalu mereka menetap bersama-sama di Wolio tempat yang telah dirintis oleh rombongan pertama.

Sudah dijelaskan bahwa "Wolio" yang berasal dari kata bahasa Buton Welia artinya "tebas" (menebas) guna membuat perkampungan. Kemudian tempat ini berkembang dan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan.

Dalam tradisi lisan masyarakat Buton dan naskah-naskah lokal menuturkan bahwa sebelum berdirinya Kerajaan Buton Wolio telah ada kerajaan sebelumnya yaitu kerajaan-kerajaan kecil yang belum dipersatukan seperti: Kerajaan Tobe-Tobe, Kerajaan Ambuau, Kerajaan Wabula, Kerajaan Todonga, Kerajaan Bombonaarelu dan kerajaan yang ada di Pulau Kabaena dan Muna.

Kedatangan rombongan yang dipimpin 4 tokoh tersebut di atas, oleh masyarakat Buton disebut dengan "Mia Patamiana" (empat

orang pemimpin dan rombongan). Rombongan “Mia Patamiana” ini dianggap sebagai cikal bakal atau primus interparis dari Negara Awal di Buton, karena mereka mempunyai peran yang sangat besar dalam menelusuri dan merekonstruksi kelanjutan sejarah Buton. Merekalah yang mengintegrasikan beberapa kelompok etnis yang telah berdatangan dan menetap di Buton sejak abad ke-13. Ada dugaan bahwa para pemimpin rombongan adalah para pembesar kerajaan dinegeri asalnya. Hal ini karena pada mereka terlihat keterampilan dalam mengorganisasi pemerintahan secara teratur dan mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Terbukti setelah berada di Buton mereka berhasil mendirikan cikal bakal Kerajaan Buton dan mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah-pisah satu sama lain dan tersebar dalam wilayah Pulau Buton dan sekitarnya. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana bentuk pemerintahan dari kerajaan-kerajaan kecil tersebut, namun berdasarkan sumber-sumber lokal kerajaan-kerajaan tersebut sudah berdiri jauh sebelum berdirinya Kerajaan Buton. Namun-nama seperti Ambuau, Tobe-Tobe, Kamaru, Todanga, Wabula dan Bombona-Wulu sudah dikenal sebelum Wolio.

Akan tetapi sayang sekali sumber-sumber tertulis tentang kerajaan-kerajaan tersebut belum ditemukan. Sedang sumber lisan yang dituturkan oleh setiap etnis di Buton sebagai pewarisnya diceritakan secara turun-temurun dan sangat minim informasi yang menyebutkan tentang berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut. Padahal kerajaan-kerajaan itu memiliki raja-raja dan kekuasaan pemerintahan masing-masing.

Selain cerita rakyat setempat diungkapkan bahwa mula-mula Sipanjonga dan kawan-kawan membangun perkampungan tidak jauh dari tepi pantai. Akan tetapi karena letaknya yang dekat dengan pantai itu, sering terjadi gangguan-gangguan keamanan dari para bajak laut yang berasal dari Tobelo, Maluku. Untuk menghindari dari gangguan-gangguan bajak laut Tobelo, Sipanjonga dan kawan-kawan meninggalkan Kalampa dan menuju arah gunung yang jauhnya kurang lebih 5 sampai 7 km dari pantai. Disinilah mereka mulai menebas belukar untuk membangun tempat tinggal. Pekerjaan ini disebut dalam

bahasa Buton dengan Welia, yang kemudian berubah menjadi Wolio, pusat kebudayaan dan pemerintahan Kerajaan Buton.

Diriwayatkan bahwa ketika Sipanjonga dan teman-temannya menebas belukar, ditemukan banyak pohon enau, terutama di sebuah bukit yang bernama Rahantulu. Bukit ini kemudian masyhur namanya dengan “Lelemangura” yang artinya adalah “Berita Gembira” atau “berita Baru”. Tentu sangat berkaitan dengan akan dimulainya suatu kehidupan baru atau kerajaan baru dengan sejarah barunya pula (Adat Fij Darul Butuni, 1977).

Dalam ceritera selanjutnya dikisahkan bahwa salah seorang teman dari Sipanjonga yang bernama “Sijawangkati” dengan diam-diam menyadap enau milik orang lain yang ada disitu. Ketika yang empunya enau yang bernama “Dungkucangia” datang untuk menyadap enaunya, didapatinya enaunya sudah disadap orang. Hal ini berulang kali terjadi sehingga timbullah amarah Dungkucangia. Serta merta ditebasnya sebatang pohon kayu yang cukup besar hingga terpotong. Melihat potongan batang kayu itu, timbul dalam pemikiran Sijawangkati betapa besar dan kuat orang yang memotong kayu itu. Namun tidak menimbulkan rasa takut yang berlebihan pada diri Sijawangkati. Untuk mengimbangi potongan kayu itu, dipotongnya rotan yang panjangnya satu jengkal yang cukup besar, kemudian batang rotan itu disimpulnya. Karena kekuatan simpulan pada rotan itu hampir tidak kelihatan, kemudian diletakkannya diatas bekas sadapan itu. Keesokan harinya datang lagi Dungkucangia menyadap enaunya, dilihatnya simpulan rotan yang menakjubkan itu. Tentu orang yang menyadap enau ini adalah orang yang sakti dan bukan manusia biasa, pikirnya.

Suatu waktu secara kebetulan keduanya bertemu ditempat itu. Terjadilah perkelahian yang sengit dengan mengadu kesaktian. Masing-masing tidak ada yang kalah. Pada akhirnya karena kepayahan keduanya lalu berdamai. Mereka bermufakat untuk hidup damai dan saling membantu dan bagi anak cucu mereka di kemudian hari akan hidup di dalam alam kesatuan dan persatuan. Ternyata Dungkucangia adalah kepala negeri (raja) dari Tobe-tobe, yang berjarak kira-kira 7 km dari Wolio. Dengan adanya perdamaian Sijawangkati dan Dungkucangia maka negeri Tobe-tobe dipersatukan dengan Wolio.

Selanjutnya perkampungan baru itu diawali dengan dua Limbo (kampung) sebagai simbol bahwa yang memulai kehidupan baru di tempat itu adalah dua rombongan diatas. Kedua Limbo tersebut adalah Gundu-Gundu dan Barangkatopa yang masing-masing dipimpin oleh seorang “Bonto”. Penentuan Bonto ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, sehingga terpilih Sitamanajo dan Sijawangkti sebagai “Bontona”. Bontona Gundu-Gundu dijabat Sitamanajo dan Bontona Barangkatopa dijabat Sijawangkti (Gazali, dkk, 1994; 19).

Sebelum kedua Bonto tersebut menjalankan tugasnya, mereka harus melalui suatu upacara pelantikan yang berlangsung di atas sebuah batu di Limbo (kampung) masing-masing. Pelantikan itu disaksikan pula oleh Raja Tobe-Tobe Dungkucangia.

Kedua perkampungan ini mengalami perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat. Para imigran baik yang berasal dari kerajaan yang ada di pulau Buton, maupun pendatang asing yang berasal dari luar pulau Buton tertarik ingin menetap di Wolio. Akibat perkembangan itu terbentuk lagi dua perkampungan baru yaitu : Peropa dan Baaluwu. Kedua perkampungan baru ini juga harus dipimpin oleh seorang Bonto. Dan berdasarkan musyawarah ditetapkan bahwa yang akan menjadi pemimpin kedua Limbo (kampung) yang baru itu adalah generasi yang lahir di Buton. Dalam hal ini cerita rakyat mengungkapkan bahwa Sipanjonga yang menikah dengan Siba'ana melahirkan Betoambari. Dalam usia yang masih sangat muda ia melakukan perjalanan hingga tiba di negeri Kamaru yang sedang mengadakan suatu perhelatan. Setelah diketahui siapa sebenarnya Betoambari, ia diterima sebagai tamu Raja Kamaru. Disinilah Betoambari jatuh cinta pada Waguntu putri Raja Kamaru. Sebaliknya Raja Kamaru mengagumi ketinggian martabat dan akhlak serta sopan santun Betoambari, sehingga pinangan Betoambari kepada Waguntu tidak menemui kesulitan. Raja Kamaru menerimanya dengan baik. Dikawinkanlah Betoambari dengan Waguntu didalam suatu upacara adat kebesaran raja-raja.

Beberapa waktu kemudian Betoambari meminta izin dari mertuanya guna membawa Waguntu ke Wolio. Dengan pengiring yang

cukup banyak Betoambari bersama istrinya berangkat meninggalkan Kamaru menuju Wolio.

Kedatangan Betoambari disambut dengan meriah. Kedua orang tuanya tidak menduga bahwa putranya masih hidup karena sudah sejak lama tidak ada khabar beritanya. Dari perkawinan itu Betoambari mempunyai seorang putra yang diberi nama Sangariarana (Zahari : 1977).

Adapun perkawinan Betoambari dengan Waguntu tersebut membawa pengaruh besar didalam perkembangan Kerajaan Wolio. Negeri Kamaru masuk menjadi bagian dari Wolio. Perkembangan pendudukpun kian bertambah disamping adanya perpindahan dari negeri-negeri sahabat terutama Tobe-Tobe dan Kamaru sendiri.

Betoambari dan putranya Sangariarana setelah mencapai aqil balig ditunjuk sebagai Bonto. Betoambari diangkat sebagai Bontona Peropa dan Sangariarana sebagai Bontona Baaluwu. Dengan penambahan dua kampung itu, Wolio menjadi empat kampung yang dipimpin oleh empat Bonto. Keempat kampung ini disebut "Patalimbona".

Sebagai wadah awal atau cikal bakal Kerajaan Buton Patalimbona ini berfungsi sebagai dewan (Sara Wolio), yang menetapkan pengangkatan raja pertama. Maka berdasarkan musyawarah dan mufakat Patalimbona serta atas dukungan raja Tobe-Tobe Dungkucangia atau Labukutorende, La Asamana alias Caoching, Wa Kaa-Kaa diangkat sebagai Raja Buton pertama pada tahun 1332 dengan wilayah kekuasaannya meliputi empat Limbo tersebut diatas dan dua negeri (kerajaan kecil) yaitu : (1) Limbo Baaluwu, (2) Limbo Peropa, (3) Limbo Gundu-Gundu dan Limbo Barangkatopa; sedangkan dua negeri kecil adalah Kamaru dan Tobe-Tobe. (Zahari, 1977 ; 291).

Siapa sebenarnya Raja Putri Wa Khaa-Khaa tidak diketahui dengan pasti kecuali dari cerita rakyat meriwayatkan bahwa putri ini ditemukan dari dalam sebatang "buluh gading" (bambu kuning) oleh seorang pemburu bernama Sangia Langkuru di bukit Lelemangora. Singkat cerita putri tersebut lalu diangkat oleh Betoambari sebagai putrinya sendiri dan dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Buton.

Dalam perkembangan kemudian keempat kampung atau Limbo tersebut diatas semakin berkembang, bukan saja karena bertambah jumlah penduduknya tetapi juga bertambahnya jumlah kerajaan-kerajaan kecil yang berintegrasi dengan Kerajaan Buton. Arus migrasi penduduk makin bertambah karena banyaknya pendatang baru yang tinggal dan menetap di Wolio. Hal itu disebabkan antara lain karena negeri asal mereka sering diganggu oleh para Tobelo yaitu bajak laut dan perampok. Banyaknya arus migran ini menyebabkan bertambahnya jumlah perkampungan baru ataupun negeri yang masuk bergabung dengan Kerajaan Buton. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Bataraguru (1411-1460). Wilayah dan jabatan pemerintahan bertambah menjadi sembilan kampung yang kemudian disebut "Siolimbona" yang juga berarti sembilan jabatan Bonto. Kesembilan kampung itu adalah : (1) Limbo Peropa dipimpin oleh Bontona Peropa, (2) Limbo Baaluwu dipimpin oleh Bontona Baaluwu, (3) Limbo Gundu-Gundu juga dipimpin oleh Bontona Gundu-Gundu, (4) Limbo Barangkatopa dipimpin oleh Bontona Barangkatopa, (5) Limbo Gama dipimpin oleh Bontona Gama, (6) Limbo Rakia dipimpin oleh Bontona Rakia, (7) Limbo Siompu dipimpin oleh Bontona Siompu, (8) Limbo Wandailolo dipimpin oleh Bontona Wandailolo, dan (9) Limbo Melai dipimpin oleh Bontona Melai. (Zahari, 1977 : 127). Negeri (Kerajaan kecil) yang bergabung masih tetap hanya dua negeri yaitu Kerajaan Kamaru dan Kerajaan Tobe-Tobe.

Sejak tahun 1332 sampai tahun 1611 raja-raja buton memerintah secara bergantian dan turun temurun. Raja pertama Wa Khaa-Khaa digantikan oleh puterinya Bulawambona sebagai raja kedua. Puteri ini adalah hasil perkawinannya dengan bangsawan Majapahit bernama "Sibatara". Raja ketiga adalah Bataraguru, putera Bulawambona dari perkawinannya dengan La Baaluwu, kemudian raja ke empat adalah Tuarade putera Bataraguru dari perkawinannya dengan Waelancsugi puteri Dungkucangia. Selanjutnya Raja Tuarade tidak memiliki keturunan sehingga digantikan oleh kemenakannya yang juga sebagai anak angkatnya bernama Raja Mulae sebagai raja kelima. Raja keenam adalah menantu Raja Mulae bernama Lakila-ponto yang berhasil menumpas pemberontakan bajak laut di Sulawesi Tengah (Luwuk Banggai) pimpinan La Bolontio. Raja Buton keenam inilah yang

dinobatkan secara Islam pada tahun 1538 sehingga beliau disebut raja terakhir dan “Sultan Pertama”.

Pada masa pemerintah Raja kelima Mulae yang bergelar Islam Muhammad Idham (1511-1538), Kerajaan Buton mengalami kekacauan karena serangan Tobelo (bajak laut) yang dipimpin La Baloutio menyebabkan rakyat di pesisir pantai yang dilaluinya sangat ketakutan. Pasukan bajak laut ini kemudian dapat dipadamkan oleh Lakilaponto, sehingga La Baloutio terbunuh di Bone. Peristiwa kepahlawanan ini mengantarkan Lakilaponto menjadi Raja Buton ke enam menggantikan mertuanya dan memerintah pada tahun 1538-1584. Dalam masa pemerintahannya empat kerajaan kecil berintegrasi ke dalam wilayah Kerajaan Buton, yaitu Kerajaan Wabula, Kerajaan Todanga, Kerajaan Bombona Wulu, dan Kerajaan Batanga. (Zahari, 1977, Ghazali, dkk, 1994; 20)

Dari uraian di atas terlihat bahwa sistem pemerintah kerajaan dikuasai dinasti Wa Khaa-Khaa secara turun temurun. Sejak penetapan raja pertama dan pengangkatan raja kedua sampai dengan “Sultan” kelima adalah menggunakan sistem tersebut. Sistem pemerintahan “monarki” yang digunakan ini prakteknya dapat dilihat dalam pergantian raja-raja yang berkuasa, yaitu seorang raja yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, mesti digantikan oleh puteranya atau jika tidak mempunyai putera, adalah anak angkatnya dan atau keponakannya. Sistem pemerintahan “Monarki” ini berlangsung kurang lebih dua setengah abad lamanya dan baru berakhir setelah Buton menerima ajaran agama Islam. Sejak masa itu bentuk ketatanegaraan awal (kerajaan) dirobah menjadi kesultanan yang berdasarkan konstitusi Islam yang disebut Murtabat Tujuh.

Dalam kedudukannya sebagai sultan, Lakilaponto telah mulai menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam kerajaannya menurut hukum Islam sehingga dikenallah semboyan yang menjadi falsafah kerajaan sebagai dasar pegangannya di dalam mengendalikan pemerintahan atas kerajaannya, yaitu :

“Bolimo arataa somanamo karo”

“Bolimo karo somanamo lipu”

“Bolimo lipu somanamo agama”.

Artinya :

“Tiada perlu harta asalkan diri selamat”

“Tiada perlu diri asalkan negeri aman damai”

“Tiada perlu negeri asalkan agama tetap hidup di tengah-tengah masyarakat”.

Kemudian mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman di dalam menjalankan pemerintahannya adalah terdiri dari tiga bagian pokok utama yang masing-masing bagian terdiri lagi atas empat pasal yaitu : (1) Syara-wolio 4 pasal, (2) Syara-jawa 4 pasal dan (3) Syara-pancana 4 pasal.

Setelah 26 tahun lamanya menjadi Sultan atau seluruhnya 46 tahun dalam kedudukannya sebagai pimpinan Kerajaan Buton, Lakilaponto berpulang kerahmatullah dan jenazahnya dikebumikan di atas bukit Lelemangura dalam benteng Keraton. Sesudah wafatnya beliau masyhur dengan nama pengganti “Murhum”.

Sekalipun bentuk negara berubah menjadi kesultanan, pengangkatan raja/sultan masih berlangsung secara warisan. Sultan pertama digantikan oleh dua puteranya secara bergantian, La Tumparasi (1584-1591) dan La Sangaji (1591-1597) masing-masing sebagai Sultan kedua dan ketiga. Sultan keempat La Elangi (1597-1631) adalah putera dari La Sangaji, sedang Sultan kelima adalah putera La Elangi bernama La Balowo alias Kamaruddin (1631-1632). (Zahari, 1977; 33-63).

Pengangkatan Kamaruddin adalah berdasarkan hasil perjanjian Schoot-Elangi. Kamaruddin dan Saudaranya Syamsuddin kelak menggantikan ayahandanya setelah wafat. Namun campur tangan VOC ini, akhirnya menimbulkan insiden dalam kesultanan, sehingga sejak saat itu pengangkatan Sultan harus berdasarkan pemilihan sesuai amanah Undang-Undang Kesultanan (Murtabat Tujuh).

Sebelum sampai pada uraian tentang masuknya pengaruh Islam, ada baiknya diperlihatkan perkembangan organisasi pemerintahan pada masa bentuk kerajaan. Struktur organisasi pemerintah masa kerajaan mengalami fase perkembangan yang dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- (1) Fase pertama masa pemerintahan raja pertama dan kedua, struktur pemerintahannya sama, raja sebagai kepala negara dan pemerintahan dibantu oleh suatu Dewan kerajaan yang disebut "Patalimbona", kepala-kepala wilayah disebut Bonto dan dibantu oleh 60 orang pegawai kerajaan.
- (2) Fase kedua masa pemerintahan raja ketiga terjadi penambahan jabatan baru sebagai pembantu raja yaitu Sapati (patih). Dewan Pata Limbona bertambah menjadi "Siolimbona". Penambahan personil pembantu utama raja ini berlangsung hingga fase ketiga.
- (3) Dalam fase ketiga ini ada penambahan lagi jabatan baru, setingkat dibawah "Sapati" yaitu "Kenepulu".
- (4) Dalam fase keempat masa pemerintahan raja kelima dan keenam terus disempurnakan dengan kehadiran yang mengurus masalah pajak serta pegawai staf kerajaan; ditambah dengan raja-raja kerajaan yang bergabung dalam wilayah Kerajaan Buton.

Secara lengkap struktur organisasi pemerintahan saat itu adalah :

- (a) Raja, sebagai kepala negara yang berkuasa penuh atas keseluruhan wilayah kerajaan.
- (b) Sapati, adalah pembantu utama raja, yang mengepalai urusan pemerintahan serta menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.
- (c) Kenepulu, adalah Staf pembantu raja/sultan dalam urusan pemerintah ke dalam dan menjalankan tugas-tugas Sapati khususnya bidang peradilan.
- (d) Bonto atau menteri (patalimbona kemudian Siolimbona) adalah para kepala pemerintah wilayah, juga berfungsi selaku Dewan Kerajaan yang menetapkan pengangkatan raja dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan kerajaan ini (Siolimbona) di Ketuai oleh Bontona (Menteri) Peropa Bontoambari. (Gazali, dkk. 1994; 21).

2.2.2 *Masuknya Pengaruh Islam*

Islam masuk di Buton sejak paroh pertama abad ke-16 tepatnya tahun 1511 telah tiba seorang mubaliqh pengajar Islam bernama Syeikh Abdul Wahid, sedangkan menurut sumber lokal di bagian timur Pulau Buton di daerah Lasalimu, jauh sebelumnya telah dimasuki oleh rombongan para pengajar Islam yang menuju timur Nusantara (Ternate). Bahkan lebih jauh lagi kedatangan rombongan “Mia Patamiana” atau rombongan Sipanjonga dan kawan-kawan pada akhir abad 13 sesungguhnya telah mengenal ajaran agama Islam, namun pada saat itu masyarakat Buton masih kuat meyakini agama yang dianutnya. Seberapa jauh pengaruh Islam terhadap masyarakat Buton pada saat kedatangan dua rombongan sebelum Syeikh Abdul Wahid menginjakkan kakinya di Buton untuk mengislamkan masyarakatnya, belum banyak diungkap dan masih perlu penelitian dan penelusuran sumber-sumber yang ada.

Menurut teori Islamisasi yang dikemukakan oleh para ahli bahwa, sebelum Islam menjadi kekuatan politik terlebih dahulu menjadi kekuatan sosial. Hal itu disebabkan penyebarannya secara “ilegal” dikalangan keluarga dan handai tolan yaitu dengan menjalankan beberapa kewajiban agama dan pemberian contoh tingkah laku yang baik untuk ditiru dan diteladani. Sesudah kekuatan sosial terutama adanya unsur keyakinan dari masyarakat yang didatangi untuk menerimanya, maka diteruskan dengan legitimasi sebagai kekuatan politik. Para pejabat kerajaan secara legal mulai menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena itu pula kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton langsung disambut oleh raja Buton kelima dan menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Peristiwa itu tentunya tidak lepas dari teori tersebut di atas bahwa jauh sebelumnya masyarakat Buton telah mengenal akan adanya ajaran agama baru, sehingga begitu raja mendengar Abdul Wahid membawa ajaran Islam, raja terus menyatakan diri bersedia menerima dan menjadi pemeluknya.

Teori ini diperkuat pula dengan alasan bahwa jauh sebelum Abdul Wahid, Islam telah dikenal karena Buton adalah daerah persinggahan para saudagar Islam yang berdagang baik dari Ternate, Tidore di

Maluku, maupun dari kerajaan-kerajaan Pesisir Utara Pulau Jawa. Selain itu masyarakat Buton adalah masyarakat Bahari (pelaut) yang telah berlayar membawa barang-barang dagangannya ke kota-kota dagang yang telah menerima ajaran agama Islam seperti Ternate, Tidore atau ke kota-kota Demak, Tuban, Gresik dan lain-lain, sehingga tidak mustahil para pelaut Buton itu telah berkenalan dengan para saudagar Islam dari segala penjuru Nusantara.

Menurut sumber di Buton, Syeikh Abdul Wahid tiba di Buton mendarat di suatu tempat di bagian selatan pulau Buton yang disebut pantai Burangasi. Kedatangan beliau kesana memang disengaja untuk mengislamkan daerah ini, atas perintah gurunya Syeikh Ibnu Batutah yang pernah mampir di Buton sekembali dari Ternate menuju Jawa. Masyarakat Buton memang telah merindukan kedatangan seorang mubaligh yang akan mengajarkan agama Islam. (Dokumenta, 1978; 199, Said, 1990; 33-35).

Dengan diterimanya agama Islam oleh masyarakat Buton, membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh dalam aspek politik dan pemerintahan terlihat dari keinginan Raja Buton (Raja Mulae) untuk menjadikan agama Islam sebagai agama resmi Kerajaan yang sekaligus merubah ketatanegaraan yang berbentuk kerajaan menjadi bentuk kesultanan. Sebelum resminya ketatanegaraan Islam itu Raja Mulae terlebih dahulu mengutus Syeikh Abdul Wahid yang telah ditetapkan sebagai penasehat/guru agama di kerajaan agar pergi menyampaikan keinginan raja Buton pada Mufti Kerajaan Turki di Istambul untuk menjadikan Buton kerajaan Islam yang berbentuk kesultanan. Dalam perjalanan pulang itu Abdul Wahid meninggalkan Buton selama 15 tahun. Ketika tiba kembali di Buton Raja Mulae telah berpulang kerahmatullah dan digantikan oleh menantunya Lakilaponto. Sesuai pesan Mufti kerajaan Islam di Istambul, Abdul Wahid melantik Lakilaponto sebagai Sultan Buton pertama dengan gelar Muhammad Kaimuddin pada tahun 1538 (Zahari, 1977;). Masa inilah awal berdirinya kerajaan Islam di Buton.

Masa pemerintahan Sultan I Muhammad Kaimuddin (1538-1632) ini, masih merupakan masa transisi, sekalipun pada masa ini pula telah terjadi perubahan politik sosial budaya dengan munculnya struktur

masyarakat baru berdasarkan agama Islam. Pada tahapan ini Islam mulai dikenal luas oleh masyarakat Buton yang ada dilingkungan Keraton Wolio kemudian di teruskan ke wilayah pemerintah Kadie. Pada tingkat pemerintahan pusat pengaruh Islam juga terlihat dari lahirnya suatu Lembaga baru yang mengatur tentang masalah-masalah keagamaan yaitu “Sarana Hukumu” pemerintahan agama yang dipimpin oleh seorang pejabat “Lakina Agama” yaitu semacam Jabatan Menteri Agama yang dibantu oleh staf yang terdiri atas Imam, Khatib, Moji (bilal) dan Tunggana Ganda atau penjaga mesjid. (Said, 1984; 92).

Dalam bidang politik pengaruh Islam termanifestasi pula dalam pemilihan pejabat mulai dari Sultan sampai jabatan terendah dibawahnya. Salah satu kriteria yang selalu diperhatikan adalah apakah dia seorang Islam yang baik, yang memiliki kesempurnaan lahir bathin, mempunyai ilmu tentang Islam, Siddiq, Tabliq, Amanah dan Fatonah. (Mulku Zahari, 1978;). Disamping itu pula diciptakan falsafah hidup yang ditanamkan kepada seluruh masyarakat yaitu “Pabinci-binci-Ki Kuli” maksudnya saling mencubit diri masing-masing kalau kita merasakan sakit pada diri kita, maka demikian pula pada diri orang lain. Falsafah hidup yang menjadi pegangan setiap orang Buton itu tidak lepas kaitannya dari pengaruh Islam yang mengajarkan bahwa semua pemeluk Islam bersaudara. Sehingga pada masyarakat Buton, Islam menjadi akhir dari perjuangan yang harus dipertahankan. Hal ini terlihat pula dalam perjuangan yang dilandasi Islam, yaitu “biar hancur harta, negara, pemerintah (sara) asalkan agama (Islam) selamat”. (Said, 1990;).

Demikian pula pada aspek sosial budaya Islam mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan watak dan ahlak bagi masyarakat Buton. Pada bidang pendidikan misalnya Islam mempunyai pengaruh yang besar dan penting bagi masyarakat pada pendidikan pertama yang ia kenal melalui pendidikan Islam dan hingga sekarang masih dijumpai istilah yang digunakan oleh masyarakat “Apoguru antona Islamu” artinya belajarlah tentang kandungan agama Islam (Said, 1984; 38-39). Pengaruh Islam itu terlihat juga pada seni bangunan rumah (arsitektur) dan seni yang berkembang pada masyarakat Buton.

Bagi para penguasa Buton, kekuatan Islam dijadikan sebagai jaringan untuk membulatkan wilayah kekuasaannya hingga pulau-pulau sekitarnya. Penguasa kerajaan mengundang pada bangsawan di wilayah Kadie untuk mengikuti pendidikan Islam di pusat pemerintah kesultanan di Wolio, atau mengirim para mubaligh Islam ke wilayah Kadie, karena setiap pemimpin di samping pemimpin pemerintahan juga pemimpin agama di wilayahnya. Dengan diselenggarakannya cara-cara seperti ini menyebabkan proses pertumbuhan dan perkembangan agama Islam memperlihatkan kemajuan yang pesat.

Dalam menjaga eksistensinya sebagai kekuatan baru dalam mengembangkan Islam, setiap penguasa di Buton senantiasa memelihara martabatnya sebagai penguasa dan pemimpin Islam. dengan demikian maka negeri harus memiliki sistem kekuasaan yang dapat menjadikan setiap orang yang tinggal di dalam wilayah pemerintahannya mengakui kekuasaannya. Pengakuan rakyat atas kekuasaan penguasa merupakan syarat mutlak yang dimilikinya untuk mendapat pengakuan dari dunia luar sebagai suatu kerajaan yang berdaulat.

Mubaligh Islam yang datang di Buton sesudah Abdul Wahid adalah Syarif Muhammad. Di Buton ia dikenal dengan Saidi Raba yang giat menyebarkan Islam keseluruhan wilayah kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1597-1631) dan banyak pembantu Sultan dalam menyusun Undang-undang Murtabat Tujuh. Hal ini diberitakan dalam sebuah riwayat bahwa dalam masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin telah berhasil ditetapkan Undang-undang kerajaan secara tertulis dinamakan Murtabat Tujuh. (Yunus, 1994; 8).

Dengan diundangkannya Murtabat Tujuh sebagai Undang-undang kerajaan pada tahun 1610, maka sistem pemerintahan monarki dengan pengangkatan raja/sultan secara turun-temurun berakhir. Kerajaan/ Kesultanan Buton memilih sistem pemerintahan baru dan diberlakukan secara resmi yaitu demokrasi-oristokrasi. Disebut demikian karena penguasa tertinggi bergelar "Sultan" diangkat oleh suatu Dewan Siolimbona melalui pemilihan.

Sultan dipilih dari golongan bangsawan yang disebut Kaomu, berdasarkan hasil pemilihan dari Dewan Siolimbona. Dewan ini terdiri dari para Bonto yang berjumlah sembilan orang. Mereka ini adalah kepala-kepala wilayah disekitar ibu kota kesultanan dan yang berasal dari golongan Walaka.

Dengan sistem pemerintahan seperti ini, terlihat bahwa pengaruh Islam dalam pelaksanaan pemerintahan kesultanan Buton sangat dominan dan bahkan falsafah perjuangan dan kehidupan bernegara dan masyarakat sangat dijiwai oleh ajaran agama Islam. Hal itu seperti terlihat dalam falsafah mereka yang memandang agama dan negara sebagai “Apogaa Indakoolata” berpisah tidak ada antara, dan “Aporomu Indao Saangu” berkumpul tidak berarti satu. (Haziroen : 1994; Said : 1984).

Demikian pula kehidupan beragama yang menjadi tujuan akhir adalah kepentingan agama. “Balino Lipu Somanamo Syara” balino Syara samano agama”, jadi keselamatan agama adalah akhir dari perjuangan yang perlu dipertahankan.

Penentuan seorang pemimpin yang akan menduduki jabatan tertentu dalam kesultanan pun, sangat dipengaruhi ajaran agama Islam, misalnya sebelum pilihan dijatuhkan kepada seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu terlebih dahulu harus diseleksi dengan kriteria seperti dibawah ini. Apakah layak ia memegang jabatan tersebut. Sifat-sifat yang harus dimiliki adalah : (1) bersifat “*Sidig*” yaitu benar jujur dalam segala hal, rela dijalan kebenaran, tidak boleh berbohong, (2) bersifat *Tabliq*, yaitu menyampaikan segala perkataan yang memberi manfaat terhadap kepentingan umum, tidak boleh menyembunyikan sesuatu maksud, (3) bersifat *Amanah* yaitu mempunyai rasa kepercayaan terhadap umum, tidak boleh mempertukarkan sesuai hal sehingga pendengar tidak sesuai dengan bathin atau perasaan dan (4) *Fathonah* yaitu fasih lidah dalam berbicara, tidak boleh berbicara kaku. (Murtabat Tujuh pasal 3).

Selain kriteria yang telah disebutkan, seorang pemimpin juga dituntut memiliki beberapa persyaratan sebagai profil kepemimpinan kharismatik, yaitu : (1) *Amembali*, maksudnya Sakti, kuat, kuasa, dipercaya ditaati oleh masyarakat yang dipimpinnya, (2) *Atomaeka*,

memiliki kewibawaan (*gezaag*), (3) *Aumane*, pemberani, (4) *Akoadati*, berlandaskan adat hukum dalam menjalankan pemerintahan, (5) *Atomasiaka*, pemimpin yang disenangi, (6) *Atoperangoi*, perintahnya ditaati, didengar suaranya oleh rakyat, (7) *Atobungkale*, kepemimpinannya terbuka, dan (8) *Akosabara*, ia tidak cepat emosi tetapi harus bersikap dingin (sabar).

Dalam praktek pelaksanaan pemerintahan kesultanan, kriteria penentuan calon pejabat/pemimpin seperti yang telah dijelaskan di atas sangat diperhatikan sehingga menjadi suatu persyaratan yang serasi.

2.3 Birokrasi Kesultanan

Wilayah Kesultanan Buton yang berawal dari empat negeri tersusun dalam suatu sistem tata pemerintahan dimana tiap-tiap wilayah besar dan kecil menempatkan dirinya sesuai dengan sejarah dan tradisinya masing-masing. Wilayah Kesultanan Buton tersebut terdiri atas Wilayah Inti, Moronene dan Barata. Dalam perkembangannya agama Islam menjadi agama resmi bagi masyarakat Kerajaan Buton. Wilayah Kesultananannya meliputi pulau Buton secara keseluruhan, pulau Muna bagian selatan, kepulauan Tukang Besi, pula Wawoni'i dan Jazirah Tenggara daratan pulau Sulawesi. Undang-undang "*Murtabat Tujuh*" ditetapkan sejak tahun 1610 di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1579-1631). Undang-undang tersebut mengenal tiga tingkatan pemerintahan.

Pertama; Pemerintahan Pusat "*Sarana Wolio*" meliputi tiga unsur yaitu; (1) *Sultan*, (2) *Badan Sarana Wolio* yang terdiri atas *Pasopitumatana*, *Siolimbona*, *Sarana Hukumu* dan (3) Staf khusus kesultanan.

Kedua; Pemerintahan Wilayah "*Sarana Kadie*" meliputi para *Bobato*, *Bonto*, *Parabela*, *Akanamia*, *Kaosa* dan *Talombo*.

Ketiga; Pemerintahan Barata "*Sarana Barata*", meliputi *Lakinal Kepala Barata*, *sapati*, *Kanepulu*, *Bonto Ogena*, *Kapatilau*, dan *Lakina Agama*.

Dengan susunan dan tingkatan seperti demikian maka jabatan tertinggi adalah Sultan. Pada tingkat pemerintahan wilayah (Kadie)

dipimpin Babato atau Bonto dan pada tingkat pemerintahan Barata dipimpin oleh Lakina Barata

Secara rinci struktur organisasi pemerintahan kesultanan Buton adalah sebagai berikut :

1) Pemerintahan Pusat "*Sarana Wolio*"

a) Sultan, adalah kepala Negara yang memimpin pemerintahan, pemimpin umat dan keagamaan yang memegang kebijaksanaan dan keadilan tertinggi. Dalam rangka mengemban tugas yang mengabdikan kepada kepentingan dan kemaslahatan rakyat lahir dan bathin. Sultan menjalankan kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif.

b) *Pasopitumatana* (Paku berjumlah tujuh) yang berfungsi sebagai Kabinet Kesultanan yang membantu tugas-tugas Sultan. Dewan Kabinet ini terdiri dari : Sapati, Kenepulu, Kopitalao, Bontoogema, Lakina Sarawalio dan Lakina Ba'adia. Adapun tugas masing-masing pejabat (pangka) ini adalah sebagai berikut :

(1) Sapati, adalah jabatan yang dipegang oleh golongan bangsawan (Kaomu), sebagai Ketua Dewan Kabinet atau Perdana menteri yang mengurus pemerintahan, berfungsi sebagai pelindung Sultan dan rakyat. Dalam melaksanakan tugas bertindak tegas terhadap pelanggar hukum adat. Seperti juga menguatkan hasil keputusan, menegakkan adat yang telah disepakati bersama, mengawasi pelaksanaan peradilan dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Sara. Kedudukan dalam Dewan Sara sebagai anggota.

(2) Kanepulu, adalah jabatan yang dipegang oleh golongan bangsawan (Kaomu) dengan tugas utamanya adalah menampung aspirasi rakyat dan diteruskan kepada Dewan Sara, disamping bersama-sama Sapati membantu Sultan. Selaku orang ketiga dalam kesultanan Kanepulu mengamati pula situasi politik dalam rangka pengamanan

hak dan kewajiban Sapati dan sebagai pendamping Sapati, keduanya bertanggungjawab langsung kepada Sultan. Kedudukannya dalam Kabinet sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, sedang dalam Dewan Sara sebagai anggota.

- (3) *Kapitalao* atau *Kapitaraja* adalah jabatan untuk golongan bangsawan (*Kaomu*), *Kapitalao* dipegang dua orang sebagai menteri pertahanan dan panglima perang. Pembagian tugas pengawasan yaitu *Kapitalao Matanaayo* dan *Kapitalao Sukanaayo*. Dalam tugas pengamanan apabila terjadi gangguan keamanan, *Kapitalao* bertindak tegas tanpa menunggu komando atau perintah dari Dewan Sara langsung menumpas kekacauan tersebut.
- (4) *Bonto Ogena*, jabatan ini untuk golongan Walaka yang terdiri dari dua orang. Dalam Dewan Kabinet Pasopitumatana sebagai lembaga Eksekutif, *Bonto Ogena* adalah salah satu anggota kabinet. Sedang dalam Dewan Siolimbona sebagai badan Legislatif, *Bonto Ogena* sebagai Ketua Dewan yang anggotanya adalah manterimanteri (*Bonto Siolimbona*). Tugas yang diemban oleh *Bonto Ogena* dalam pemerintahan kesultanan adalah mengawasi dan mamajukan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan usul serta kehendak rakyat.
- (5) *Lakina Agama (Kadhi)* adalah Jabatan untuk golongan bangsawan (*Kaomu*). Dalam Dewan Kabinet Pasopitumatana ia sebagai anggota, sedangkan dalam *Sarana Hukumu* (Lembaga Keagamaan) ia sebagai Kepala. Lembaga ini mengurus dan mengawasi pelaksanaan masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaam.
- (6) *Lakina Sarawolio* dan *Lakina Baadia*, (Kepala Wilayah/Raja Daerah Khusus), adalah jabatan yang diberikan kepada golongan bangsawan (*Kaomu*), sebagai penguasa daerah khusus ibu kota (Keraton Wolio) bertugas

melancarkan pelaksanaan pusat pemerintahan Kesultanan, tugas utamanya adalah mengawasi keamanan dan ketentraman umum. Bila terjadi kekacauan dan perlunya meningkatkan kewaspadaan dan peningkatan pertahanan, logistik dan mobilisasi secara umum, kedua pejabat ini mengupayakan persiapan-persiapan pertahanan yang tangguh. Oleh karena itu sebagai "Kepala/Raja" pada dua daerah khusus ibukota diberi hak otonomi untuk mengatur mengurus rumah tangga daerahnya.

- c) *Siolimbona*; *Sio* = Sembilan, *Limbo* = Kampung/kadie. *Bonto Siolimbona*, adalah sembilan Kepala-Kepala Wilayah pemerintahan Daerah. *Siolimbona* ini dapat dipandang sebagai Badan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Jabatan ini diberikan kepada golongan "*Walaka*" yang dipimpin oleh *Bonto Ogena* (Mantri Besar). *Siolimbona* juga merupakan Dewan Sarana Wolio atau dewan kesultanan yang bertugas :
- (1) Mengangkat dan menetapkan dan bahkan memecat pejabat tinggi kesultanan, seperti Sultan, Sopati, Kanepulu (Kempala) dan anggota Pasopitumatana.
 - (2) Bersama Sultan dan Pasopitumatana menetapkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - (3) Memberikan persetujuan terhadap adanya undang-undang dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh pemerintah kesultanan.

Tugas lain yang juga diberikan adalah secara bersama-sama dengan Dewan Kabinet Pasopitumatana mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah peradilan selaku Badan Yudikatif kesultanan.

- d) *Sarana Hukumu*; adalah badan yang bertugas mengurus dan mengawasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran Islam dan masalah-masalah ibadah. Badan Sarana Hukumu ini dipimpin oleh *Lakina Agama*.

e) Staf khusus kesultanan.

Staf khusus kesultanan ini terdiri dari 3 bagian masing-masing :

- (1) *Bantoynunca* yaitu *Staf Istana*; Staf ini tugasnya sehari-hari adalah membantu kelancaran tugas Sultan, memberikan usul dan pertimbangan kepada Sultan, juga mengawasi tindakan dan perbuatan Sultan dalam melaksanakan pemerintahan. Jabatan *Bantoynunca* ini diberikan kepada kaum *Walaka* yang beranggotakan 11 orang dipimpin oleh *Bontona Gampikaro*, anggotanya adalah : *Bontona Dete*, *Bontona Katapi*, *Bontona Waberongalu*, *Bontona Kalau*, *Bontona Wajo*, *Bontona Sumbamarusu*, *Bontona Litao*, *Bontona Tanailandu*, *Bontona Galampa* dan dua orang *Bontona Gampikaro* dari *Sukanayo* dan *Matanayo*.

Dari sebelas anggota *Bantoynunca* ini yang paling berperan sekali adalah,

- *Bontona Gampikaro* dengan tugas; (1) mengawasi para petugas pengawal istana, (2) mengawasi benda-benda pusaka peninggalan kesultanan yang ada di dalam istana dan (3) pemberi informasi atau penghubung antara sultan dengan aparat kesultanan.
 - *Bontona Dete* dan *Bontona Katapi*, tugas khususnya adalah : (1) penasihat pribadi sultan, (2) mengawasi tindakan-perbuatan sultan serta turut serta mempertanggung jawabkannya, dan (3) selaku pelindung dan penjaga keselamatan pribadi sultan.
- (2) *Bontona Lencina Kanjawari*, selaku staf khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas tertentu. Jabatan ini diberikan kepada golongan *Walaka* yang beranggotakan 8 orang *Bonto*, yaitu : *Bontona Silea*, *Bontona Jawa*, *Bontona Lanto*, *Bontona Waborobo*, *Bontona Lantongau*, *Bontona Pado*, *Bontona Kancadoa*, dan *Bontona Barangka* (Dokumen DPRD Tk.I, 1978; 196).

(3) Staf Kesultanan lainnya, adalah

- Juru basa (juru bahasa) yang bertugas sebagai juru bahasa sultan.
- Sabandara, bertugas mengawasi pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan.
- Talombo, pembantu khusus bonto Ogena dalam hal penyampaian informasi atau pengumuman penting kesultanan.
- Pengalasa, juga pembantu khusus Bonto Ogena yang berhubungan dengan pembayaran pajak kepada kesultanan dan lain-lain.

2) Pemerintahan Wilayah "*Sarana Kadie*"

Pemerintahan kadie adalah bagian wilayah yang mempunyai hukum adat dan majelis sendiri yang disebut "*Sarana kadie*". Kedudukannya dalam organisasi pemerintahan adalah wilayah-wilayah yang terdiri dari 72 Kadie yang mempunyai hukum adat, hak atas tanah dalam wilayahnya masing-masing, penggunaannya atas dasar hak pakai. Pemerintahan kadie juga diberi kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat mempertahankan tanah dan wilayah kekuasaannya, berkewajiban mengatur penggunaan tanah, menguasai hutan dan pengambilan hasil hutan.

Pejabat yang ditugasi oleh pemerintah pusat di wilayah disebut Bobato dan Bonto sebagai pengawas pemerintahan di tingkat wilayah. Jabatan ini merupakan wakil Sultan dalam pelaksanaan tugas-tugas kesultanan ditingkat wilayah.

Pejabat-pejabat ditingkat wilayah ini, dipimpin oleh Bonto sebagai kepala wilayah, dan diserahkan kepada golongan Walaka. Sedangkan pejabat-pejabat wilayah yang dipimpin oleh Bobato sebagai wilayah adalah dari dua golongan bangsawan. Para pejabat atau Bonto yang dua golongan bangsawan. Para pejabat atau Bonto yang mengepalai wilayah ini seluruhnya ada 70 sedang 2 Kadienya adalah daerah khusus ibukota yaitu Sarawolio dan Baadia. Empat puluh (40) Kadie

dijabat oleh golongan bangsawan kaum dengan sebutan Bobato atau Lakina dan 30 orang memimpin pemerintahan Kadie dengan sebutan Bonto dari golongan Walaka.

Kepala-kepala wilayah yang dijabat Bobato itu antara lain : 1. Lakina Tobe-tobe, 2. Lakina Batauga, 3. Lakina Lasalimu, 4. Lakina Ambeua, 5. Lakina Kumbewaha, 6. Lakina Kamaru, 7. Lakina Kalende, 8. Lakina Lawela, 9. Lakina Baruta, 10. Lakina Karoni, 11. Lakina Wasaga, 12. Lakina Kokalukuna, 13. Lakina Halimambo, 14. Lakina Todanga, 15. Lakina Lipumalanga 16. Lakina Lambelu, 17. Lakina Takimpo, 18. Lakina Sampalawa, 19. Lakina Taaloki, 20. Lakina Bambona Wulu, 21. Lakina WOU, 22. Lakina Kamelanta, 23. Lakina Labalawa, 24. Lakina Boneage, 25. lakina Kundowa, 26. Lakina Lolibu, 27. Lakina Mone, 28. Lakina Inulu, 29. Lakina Wawoangi, 30. Lakina Bola, 31. Lakina Kambekambero, 32. Lakina Lowu-lowu, 33. Lakina Tumada, 34. Lakina Lea-lea, 35. Lakina Kaesabu, 36. Lakina Lakudo, 37. Lakina Kaluku, 38. Lakina Kambowa, 39. Lakina Lawele, 40. Lakina Burukene, 41. Lakina Lia, 42. Lakina Lete, 43. Lakina Lakalogou, 44. Lakina Bumbu, 45. Lakina Pure, 46. Lakina Wance, 47. Lakina Pangkowulu, 48. Lakina Kopota, 49. Lakina Kancinaa, 50. Lakina Labuandiri, 51. Lakina Wasuamba, 52. Lakina Labulusao, 53. Lakina Watumatabe, 54. Lakina Watulea dan 55. Lakina Wasilomata.

Setiap pemerintahan Kadie mempunyai dewan Sara, yang terdiri dari Bonto, Bonto Siolimbona, Parabela, Wati dan Pangalasa. kalau ditingkat pusat dijabat oleh golongan Walaka, maka di tingkat kadie dijabat oleh golongan “papara” yang bertugas di wilayah Kadie masing-masing.

3) Pemerintahan Barata atau Sarana Barata

Penjelasan mengenai Sarana Barata akan dikemukakan secara khusus dalam sub bab “Barata sebagai sistim pemerintahan dan pertahanan”.

Kesultanan Buton ini mencapai puncak kebesarannya pada jaman Sultan Muh. Idrus yang memerintah pada 1824-1851. Sesudah Sultan ini, dua orang putranya memerintah berturut-turut yaitu Sultan Muh.

Isa (1851-1871) dan Sultan Muh. Shalihi (1871-1885). Mereka ini dari golongan bangsawan *Kaumu Kumbewaha*.

Dalam kesultanan Buton ada tiga golongan bangsawan dan disebut *Kamboru-mboru Talu Palena* (kamboru- mboru = tiang, Talu = tiga, pale = batang, na = nya), yaitu *Kumbewaha*, *Tana I landu*, dan *Tapi-Tapi*. Penetapan adanya tiga golongan ini bermula pada awal abad XVII, yang juga diundangkan oleh Sapati La Singga. Cikal-bakal dari tiga golongan ini adalah tiga orang pejabat kerajaan tertinggi pada waktu itu yakni : (a) Sultan La Elangi (1597-1631) sebagai golongan Tana I landu, (b) Sapati La Singga sebagai golongan Tapi-tapi, dan (c) Kanepulu La Bula sebagai golongan *Kumbewaha*.

Ketiga golongan bangsawan ini secara bergilir memerintah Kesultanan Buton. Tetapi pergiliran ini bukan berarti giliran yang tertib karena didasarkan atas pemilihan Dewan Kerajaan (Sio Limbona) dan juga ada kekecualian yaitu yang disebut *Anana Bangule*.

Anana Bangule adalah putra Sultan yang lahir dalam mas jabatannya, sehingga menurut adat dia mempunyai hak langsung untuk menggantikan bapaknya tanpa melalui pemilihan. Sultan Muh. Isa adalah Anana Bangule sehingga ia langsung menggantikan bapaknya Sultan Muh. Idrus. Saudaranya Sultan Shalihi (1871-1885) menjadi Sultan akrena hasil pemilihan.

Sesudah Sultan Muh. Shalihi, memerintah Sultan Muh. Umar (1885-1904) dari golongan Tanailandu yang disusul dengan Sultan Muh. Asyikin (1904-1911) dari golongan Tapi-tapi. Sebelum Muh Idrus memerintah Sultan La Dani (1822-1824) juga dari golongan Tapi-tapi.

Perkawinan antar golongan bangsawan amat sering terjadi sehingga untuk menentukan jenis golongan dilihat dari garis keturunan ayah. Seperti sudah disinggung di muka bahwa "Dewan" yang mempunyai wewenang mengangkat Sultan dan pejabat-pejabat kerajaan tertinggi adalah Sio Limbona yaitu sembilan orang Bonto (Kepala Negeri) dari sembilan limbo. Sembilan limbo ini merupakan wilayah inti kesultanan yang terletak dalam ibukota kerajaan (keraton). Kesembilan Bonto dari sio Limbona itu adalah : Bontona Baluwu,

Bontona Peropa, bontona Gundu-gundu, Bontona Barangkatopa, Bontona Gama, Bontona Siempu, Bontona Wandailolo, Bontona Rakyat, dan Bontona Melai.

Dua dari sembilan Bonto ini yaitu nomor 1 dan 2, Bonto Baluwu dan Peropa mempunyai kedudukan khusus karena tanggung-jawabnya dalam memimpin pemilihan-pemilihan dan pelantikan-pelantikan Sultan serta pengawasan atas benda-benda upacara kerajaan, Empat Bonto lainnya (Pata Limbona) dianggap paling tua dalam kedudukannya dan merupakan inti dari Sio Limbona.

Sio Limbona ini juga bertugas mengawasi jalannya peraturan adat istiadat pemerintahan dan mencatat silsilah ketiga golongan *Kaumu*, meneliti gerak-gerik, tingkat laku para bangsawan khususnya dan rakyat pada umumnya.

Anggota dari Sio Limbona berasal dari kaum Walaka yaitu kaum yang berasal dari *Mia Patamiana* dan kaum bangsawan (*Kaumu*) kerabat dekat raja. Dalam perjalanan sejarah kedua golongan ini menjalin kekerabatan yang erat melalui perkawinan yang tentunya membawa pengaruh bagi keturunan masing-masing. akan tetapi kemudian ada larangan perkawinan antar kedua golongan ini yang dilakukan oleh *Sultan Langkariri* (1712-1750) dari golongan bangsawan Kumbewaha.

Dimuka telah diuraikan tentang pemerintahan "*Sarana Kadi*" yang terdiri dari 72 orang Kepala Kadi. Tiga puluh orang diantaranya yang bergelar bonto berasal dari kaum Walaka, termasuk Sio Limbona. Yang terpenting diantaranya adalah *Bonto Gampikaro* yang merupakan pengawal pribadi atau ajudan Sultan dan memegang protokol istana kerajaan. Karena dia ini dari kaum Walaka maka sering terjadi Bonto Gampikaro merupakan informan dari Sio Limbona tentang tindak-tanduk Sultan dan jalannya pemerintahan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh : Sapati, Kanepulu, Lakina Surowolio, Lakina Baadiya, Kapitalau Matanayo, Kapitalau Sukanayo, Bonto Ogena Matanayo, dan Bonto Ogena Sukanayo.

Tugas utama dari Sapati adalah menjalankan pemerintahan dan undang-undang kerajaan, dengan kata lain bahwa Sapati adalah semacam Perdana Menteri atau Mahapatih. Sapati juga menurut adat mempunyai kuasa atas wilayah Pulau Kabaena. Sementara itu Kanepulu merupakan pembantu utama Sapati dalam menjalankan pemerintahan, terutama hal-hal yang menyangkut rakyat banyak. Dia juga dikenal sebagai Kepala Hukum.

Lakina Sarawolio dan *Lakina Baadiya* adalah Kepala dari Wilayah Sarawolio dan Baadiya yang merupakan bagian penting dari Keraton (ibukota kerajaan). Selain itu ada dua pejabat Kapitalau yang mempunyai tugas mengamankan kerajaan dari luar dan dari dalam. Hal ini karena Kerajaan Buton adalah kerajaan kepulauan sehingga pengamanannya dilandaskan atas kekuatan di lautan. Kedua Kapitalau ini membagi tugas atas wilayah timur (*Matanayo*) dan wilayah barat (*Sukanayo*).

Bonto Ogena (*Oge* dari *Maoge* = besar) yang terdiri dari dua orang, masing-masing untuk wilayah Matanayo (Timur) dan Sukanayo (Barat) mempunyai tugas-tugas utama untuk pengurusan penghasilan kerajaan (pajak) dan pembendaharaan kerajaan. Mereka juga bertugas untuk mengamati terlaksananya keadilan dalam pemerintahan yang dilaksanakan Sapati. Kedua Bonto Ogena berasal dari kaum Walaka, sedang pejabat kerajaan lainnya dari Sultan sampai Kapitalau dari golongan bangsawan Kaumu. *Bonto Ogena* merupakan jabatan tertinggi bagi Walaka, sehingga dianggap *Raja Walaka* dan karena tugasnya yang langsung berhubungan dengan rakyat kebanyakan atau papara maka secara adat dia juga disebut sultannya Papara. Sio Limbona dengan pimpinan bonto Ogena bersama "Kabinet" dengan pimpinan Sapati merupakan Dewan Tertinggi Kesultanan Buton (*Sarana Wolio*) yang sidang-sidangnya dipimpin oleh Sapati.

Dewan Tertinggi Kesultanan tersebut di atas bersama aparat pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas berlandaskan pada Undang-Undang Kerajaan "*Murtabat Tujuh*". Undang-undang Murtabat Tujuh tersebut selengkapnya diterjemahkan dan telah diuraikan sebagai berikut :

KATA PEMBUKAAN

Man-arafa nafsahu fakad arafa rabbahu artinya barang siapa yang mengenal keadaan dirinya yang sejati, tentunya ia mengenal keadaan Tuhannya yang kekal.

Pa'binci-binciki kuli

Binci-binciki kuli adalah bahasa adat, artinya mencubit sendiri. Apabila sakit tentu akan sakit pula bagi orang lain. Untuk menjamin maksud tersebut pengsyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Pomae-maeka artinya takut menakuti;
2. Popia-piara artinya pelihara memelihara;
3. Pomaa-maasiaka artinya sayang menyayangi;
4. Poangkaa-ngkataka artinya hormat menghormati.

Pokok adat yang menjadi dasar kewajiban namanya "pintu tanah" terdiri dari :

1. Syarat artinya Undang-Undang;
2. Tuturaaka artinya Peraturan;
3. Bitara artinya Peradilan;
4. Gau artinya Politik.

Kebalikan dari binci-binciki kuli

Segala hal yang menjadi penentang maksud binci-binciki kuli adalah :

1. Sabaragau artinya hak bersama dimiliki dan dikuasai oleh seseorang;
2. Lempagi artinya si A menyimpan barang pada si B kemudian si A mengambilnya tanpa setahu si B;
3. Pulu mosala tee mingku mosala artinya :
 - a. Pulu mosala yaitu mengeluarkan perkataan yang sifatnya menghina dan lain-lain yang semacam;

b. Minggu mosala yaitu :

- (1) gerak-gerik yang menunjukkan ketinggian hati atau keangkuhan, sehingga berpakaian yang tidak selaras dengan kedudukannya. Gila pangkat, gila harta dan ketinggian bangsa.
 - (2) melakukan kejahatan maupun pelanggaran.
4. Pebulan dan zina di dalam kampung dan mencari keuntungan pada rakyat dengan jalan menipu.

Syarat-syarat pegawai kerajaan

Pegawai kerajaan diwajibkan memiliki syarat dan sifat-sifatnya :

1. Sidik artinya benar dan jujur dalam segala hal serta ridla berkorban untuk kebenaran;
2. Tablig artinya mampu menyampaikan segala perkataan yang mendatangkan manfaat kepada rakyat;
3. Amanat artinya mempunyai rasa kepercayaan terhadap rakyat dan sebaliknya dipercayai oleh rakyat;
4. Fathona artinya pandai dan fasih berbicara.

Selain daripada syarat-syarat dan sifat-sifat di atas yang disebut "amanat kerasulan", maka seorang pegawai juga wajib memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti tercantum di bawah ini guna kelengkapannya :

1. Pegawai kerajaan harus bersifat hiyaat;
2. Pegawai kerajaan harus bersifat ilmu;
3. Pegawai kerajaan harus bersifat kodrat;
4. Pegawai kerajaan harus bersifat iradat;
5. Pegawai kerajaan harus bersifat basyara;
6. Pegawai kerajaan harus bersifat samaa;
7. Pegawai kerajaan harus bersifat kalam;

Susunan Pegawai Kerajaan

Pangkat Pembesar Kerajaan :

1. Sultan jabatan untuk kaum bangsawan;
2. Sapati jabatan untuk kaum bangsawan;
3. Kenepulu jabatan untuk kaum bangsawan;
4. Kapitaraja jabatan untuk kaum bangsawan terdiri dari dua orang;
5. Bontoogena jabatan untuk kaum Walaka juga dua orang.

Menteri Siolimbona jabatan untuk kaum Walaka 9 orang.

1. Menteri Peropa;
2. Menteri Baluwu;
3. Menteri Gundu-Gundu;
4. Menteri Barangkatopa;
5. Menteri Gama;
6. Menteri Siompu;
7. Menteri Wandailolo;
8. Menteri Rakia;
9. Menteri Melai.

Menteri dalam : Bonto Inunca” adalah juga jabatan untuk kaum Walaka, berjumlah 11 orang :

1. Menteri Dete;
2. Menteri Katapi;
3. Menteri Waberongalu;
4. Menteri Kalau;
5. Menteri Wajo;
6. Menteri Sombamarusu;
7. Menteri Litao;
8. Menteri Tanailandu;
9. Menteri Galampa;
10. Menteri Gampikaro Matanayo;
11. Menteri Gampikaro Sukanayo.

Menteri Lencina Kanjawari jabatan untuk kaum Walaka, banyaknya 8 orang :

1. Menteri Silae;
2. Menteri Jawa;
3. Menteri Lanto;
4. Menteri Waborobo;
5. Menteri Lantongau;
6. Menteri Pada;
7. Menteri Kancoda;
8. Menteri Barangka.

Jumlah Menteri Siolimbona, Menteri Dalam, Menteri Lencina Kanjawari seluruhnya berjumlah 28 orang, digenapkan menjadi 30 orang dengan 2 orang Menteri Besar sebagai Kepala.

Bobato atau *Lakina* 40 orang jabatan untuk kaum bangsawan.

1. Lakina Tobe-Tobe
2. Lakina Batauga (x) (xx)
3. Lakina Lasalimu
4. Lakina Ambeau
5. Lakina Kumbewaha
6. Lakina Kamaru (x) (xx)
7. Lakina Kalende
8. Lakina Lawele
9. Lakina Baruta
10. Lakina Koroni
11. Lakina Wasaga
12. Lakina Kokalukuna
13. Lakina Holimombo
14. Lakina Todanga (xx)
15. Lakina Lipumalanga
16. Lakina Lambelu
17. Lakina Wawoangi (xx)
18. Lakina Takimpa
19. Lakina bola (xx)
20. Lakina Samplawa (xxx)
21. Lakina Kambe-Kambero
22. Lakina Tolaki
23. Lakina Lowu-Lowu

24. Lakina Bombonawulu (xx)
25. Lakina Tumada (xx)
26. Lakina Wou
27. Lakina Lea-Lea
28. Lakina Kamelanta
29. Lakina Kaesabu
30. Lakina Labalawa
31. Lakina Lakudo
32. Lakina Boneoge
33. Lakina Kaluku
34. Lakina Kondowa
35. Lakina Kamobwa
36. Lakina Lolibu
37. Lakina Lawela
38. Lakina Mone
39. Lakina burukene
40. Lakina Inulu.

Sabandara 1 orang.

Jurubahasa 20 orang.

Talombo 6 orang.

Gampikaro 60 orang.

Pangalasa 6 orang.

Watina Gampikaro 6 orang.

Kenipau 2 orang.

Belobaruga 8 orang.

Tamburu limaanguna 35 orang.

Kompanyia isyara 14 orang.

Tamburu pataanguna 28 orang.

Syara agama = pegawai mesjid Keraton 60 orang.

Tugas Pokok Pegawai Kerajaan

Sultan

Sultan karena hukum adat bergelar “khalifatul- khamis”.
Kewajibannya adalah :

1. Memiliki dengan mata-hatinya lautan kalbu hati nurani rakyat;
2. Menjadi penuntun dan pemimpin dalam dan di luar kerajaan;
3. Menjadi bapak rakyat di dalam kerajaan;
4. Memegang keadilan dalam arti memperbaiki sesuai atau tidak menurut adat bertujuan kepada kebaikan yang banyak.

Pedoman yang menjadi dasar pegangan Sultan adalah “fa aalun limaa yuridu” artinya “aku berbuat sekehendakku”. Kemudian Sultan diberi kelengkapan yang tersimpul di dalam syarat yang 12 orang dalam bahasa adat disebut “sara sapulu ruaanguna”. Ketentuan tersebut terdiri atas tiga bagian di mana tiap bagian itu diperinci menjadi empat pasal.

A. Syara Jawa

1. Payung kain;
2. Permadani;
3. Gambi isoda;
4. Somba.

Keempat unsur ini merupakan simbol penghasilan Sultan yaitu :

1. Perahu yang terdampar atau pecah = tawang karang.
2. Rampa yaitu barang yang hanyut yang dipungut rakyat.
3. Ambara yaitu semacam hasil laut.
4. Ikan besar yang dipikul oleh dua orang.

B. Syara Pancana

1. Bante
2. Kabutu
3. Pomua
4. Kalonga

Keempatnya adalah merupakan hasil perkebunan yang di dalam bahasa adat “antona tanah” yang dipersembahkan kepada sultan. Adapun isi syarat pancana itu adalah :

1. Popene.
2. Suruna Karo.
3. Tali-tali.
4. Karambau.

Popene artinya orang yang membawa keberatan pada Sultan. Yang bersangkutan itu harus membayar uang sebagai pengikut dirinya yaitu suruna karo dalam bahasa adat.

“Tali-tali” yaitu tambahan denda. “Karambau” maksudnya pada barang siapa yang membunuh kerbau tanpa izin dari Sultan, kepadanya dikenakan hukuman denda sebesar 120 boka = Rp 144,- yang kesemuanya menjadi penghasilan Sultan.

C. Syara Wolio

1. Isalaaka artinya yang menjadikan bersalah.
2. Ikodosaaka artinya yang menjadikan berutang.
3. Ibatuaaka artinya yang menjadikan budak.
4. Imateaka artinya yang menjadikan mati.

Adapun isi dari syara wolio itu adalah :

1. Belobaruga laki-laki 8 orang.
2. Belobaruga perempuan 12 orang.
3. Susua wolio.
4. Susua papara.

Belobaruga laki-laki berasal dari keturunan anak-anak dari Menteri khususnya anak dari kaum walaka yang berumur 7 tahun keatas; Belobaruga perempuan adalah anak-anak gadis pilihan dari rakyat papara yang disediakan sebagai selir Sultan. Kedua belas orang anak-anak gadis tersebut didatangkan dari berbagai kadie yang telah ditentukan, seperti misalnya Belobaruga Kambowa, Belobaruga Busoa, Belobaruga Talok dan lain-lain.

Susua Wolio berasal dari keturunan kaum walaka asal Limbo yang tugasnya sebagai pengasuh putra-putri Sultan yang banyaknya menurut kebutuhan.

Susua Papara berasal dari kaum papara yang bertugas pula sebagai pengasuh putra-putri Sultan menurut kebutuhan.

Sapati

1. Sapati artinya pendebat dari kesalahan hukum atau bicara dengan tidak memandang bulu sampai kepada Sultan sekalipun. Karena itu Sapati disebut juga "aroana syara" artinya "pemuka syarat".
2. Dolango artinya penahan atau pelindung dari Sultan dan rakyat.
3. Salambi artinya menguatkan segala kesimpulan musyawarah.
4. Basarapu artinya meneguhkan pembicaraan yang telah menjadi ketetapan.
5. Menilik lidah neraca artinya senantiasa berlaku adil.
6. Menilik atas dua lautan yaitu batin sendiri kemudian rakyat.
7. Semua mufakat harus dipegang teguh tidak boleh dirubah dengan berpegang kepada dalil "innal laaha laa yukhliful miy aadi" artinya "sesungguhnya Tuhan itu tidak merobah-robah janjinya".
Bandingkanlah dengan pegangan Sultan yang berbuat sekehendaknya.

Oleh karena itu maka perhubungan Sapati dan Sultan adalah sebagai perhubungan dua mata rantai yang tidak dapat bercerai satu dengan yang lain. Dalam kata adat hubungan itu disebut "pokaina rante rua seana".

Kemudian kepada Sapati diberikan pertanggung jawaban atas :

1. Kamali yaitu istana Sultan dan mesjid Keraton.
2. Baruga yaitu tempat musyawarah dan pasar.
3. Baluara yaitu benteng pertahanan beserta kelengkapan perang, bedil, meriam dan lain-lain.
4. Batu tondo molele artinya kota dan talangera yaitu tempat meriam dibuat daripada kayu.
5. Pintu gerbang benteng dan penutupnya.
6. Parit dan patua saka-saka atau ranjau.
7. Perahu dan banteanya yaitu tempat pembikinannya.
8. Tiang bendera dan pararoana jaga.

Kepada Sapati diberikan pula hak untuk memutuskan perkara yang disebut antona kakaana seperti :

1. Dosa artinya utang yaitu uang denda yang belum dibayar oleh terhukum;
2. Pasabu artinya memecat orang yang bersalah;
3. Pomurusi artinya membeslag barang bukti dari orang yang bersalah;
4. Papasi artinya mengasingkan orang yang bersalah;
5. Pekamate artinya membunuh orang yang bersalah.

Yang menjadikan penghasilan Sapati adalah :

1. Tambena toba;
2. Botu bitara arataa pusaka;
3. Oaba mopoosena italiku;
4. Mopalapasina anana;
5. Obangu tee tobata;
6. Okaroro 7 boka dan 2 suku;
7. Okasabe;
8. Pupuna katepi.

Kanepulu

1. Arataa inda kawi-syaha = harta orang yang tidak kawin syah;
2. Arataa inununa anana = harta yang dituntut anaknya
3. Arataa inuna opuana = harta yang dituntut cucunya;
4. Arataa inununa opuana itoputu = harta yang dituntut oleh cicitnya;
5. Arataa imanako = harta asal curian.

Tugas rahasia daripada Kanepulu yang utama adalah memperhatikan segala pengeluaran rakyat. Perhubungan Kanepulu dengan Sapati adalah seperti perhubungan suami isteri yang kawin syah, hubungan mana dalam bahasa adat dikatakan "Kanepulu Siyut osakawina Sapati". Kanepulu adalah juga sebagai pelindung Sultan.

Kapitaraja

Kapitaraja ada dua orang masing-masing :

1. Kapitaraja matanyo.
2. Kapitaraja sukanayo.

Kapitaraja mengepalai tentara kerajaan yang dinamakan “Kompanyia-pataanguna”. Kapitaraja hanya mengenal menerima perintah satu kali saja dalam tugasnya mengamankan sesuatu kekacauan. Kapitaraja juga mengepalai bobato dalam keadaan perang.

Bontogena

Menteri Besar ada dua orang juga masing-masing :

1. Menteri Besar matanayo;
2. Menteri Besar Sukanayo;

Menteri Besar karena adat adalah sebagai “gundik” dari Sapati. (Kiaskan dengan perhubungan antara Kanepulu dengan Sapati). Menteri Besar adalah juga sebagai salah satu belah pedang dari rakyat papara. Menteri besar adalah Sultan bathin dari papara. menteri Besar berhak untuk menguasai rakyat papara. Menteri Besar dinamai juga “tolowiwi” dari Sapati maksudnya = pelanggaran yang dibuat oleh Sapati, Menteri Besarlah yang menentangnya menurut adat dan bila perlu ditindaki.

Menteri Besar bertanggung jawab atas 9 pasal tersebut di bawah ini yang berada di dalam pengawasan dan tanggung jawabnya :

1. Weti atau pajak yaitu sebagai persembahan dari rakyat berupa hasil tanah/kebun.
2. Bante juga asal dari tanah yang dipersembahkan rakyat.
3. Kabutu juga hasil tanah yang dipersembahkan rakyat.
4. Pomua juga hasil tanah yang dipersembahkan rakyat.
5. Kahoti mamata juga hasil tanah yang dipersembahkan rakyat.
6. Kahoti mamata juga hasil tanah yang dipersembahkan rakyat.
7. Polanggaana kampua artinya pasar dan mata uang dari kerajaan = kampua atau mata uang dari kerajaan terbuat dari kapas yang ditunen.

8. Kalongana papara yaitu bantuan rakyat pada pesta sederhana yang diadakan oleh Sultan berupa hasil perkebunan dan bila pesta besar disertai dengan uang.
9. O-aba tee posanga artinya bertanya dan minta izin.

Siolimbona

1. Mengetahui hubungannya dengan Sultan yang genap menjadi sepuluh dan berasal satu jelasnya bersaudara.
2. Mengetahui kaum bangsawan dari ketiga aliran kamborum-boru.
3. Mengetahui segala persoalan orang-orang besar kerajaan (pangkat).
4. Mengetahui pulanga kaum walaka dan bangsawan.
5. Mengetahui kesalahan kecil maupun besar.
6. Mengetahui "matalapu"
7. Mengetahui segala ketentuan syarat.
8. Berhak menegur dan menasehati kepada umum yang melanggar adat.
9. Siolimbona bergelar "ulama" dalam syarat Buton dan menjadi pimpinan dalam adat istiadat.
10. Siolimbona wajib mengetahui dasar-dasar kelepasan dan keangkatan pegawai kerajaan.
11. Siolimbona wajib mengetahui dasar-dasar peradilan dari kadie.
12. Siolimbona disebut juga "tunggu-tunggu" dari kadie yang dikepalainya.
13. Siolimbona wajib mengetahui segala pembicaraan dengan Sultan dan lain-lain pejabat kerajaan.
14. Menteri Peropa dan Menteri Baluwu secara khusus wajib mengetahui kewajiban Sultan yang 12.
15. Menteri Peropa dan Menteri Baluwu disebut juga dalam adat "mangedaina laki-wolio", karena hubungannya yang erat sekali dengan Sultan.
16. Siolimbona wajib mengetahui asal-usul kaum bangsawan dan walaka.

Bonto Inunca = Menteri Dalam

Kewajiban yang utama dari Menteri Dalam adalah mengamati segala persoalan di dalam istana yang dalam hal ini bertindak sebagai mata-mata dari surat kerajaan untuk menjadi tindakan-tindakan dari Sultan yang bertentangan dengan adat.

Secara langsung kewajiban itu dibebankan kepada Menteri gampikaro yang setiap waktu mendampingi Sultan yang dalam hal ini bertindak sebagai “ajudan” dari Sultan.

Menteri Lencina Manjawari

Pada umumnya sama dengan kewajiban Menteri Dalam. Beberapa diantaranya disamping tugasnya sebagai penunggu juga erat hubungannya dengan petugas tertentu.

Bobato

Tugas kewajiban Bobato juga seperti halnya dengan Menteri yang disebut juga penunggu di dalam daerah pengawasannya. Di dalam menerima dan menyelesaikan sesuatu persoalan yang dimajukan oleh rakyatnya, kalau bersifat perkara yang memerlukan penyelesaian daerah secara hukum, maka wajib didampingi oleh seorang Menteri yang terdekat dengan hukumnya. Tugas yang lain dari Bobato adalah juga mengepalai tentara kerajaan apabila kerajaan mendapat serangan dan atau juga mengepalai tentara bantuan yang diberikan kepada negeri sahabat.

Jurubahasa

Kewajiban jurubahasa adalah :

1. Atalinga maksudnya jurubahasa itu adalah alat pendengar dari syarat dan Sultan;
2. Amata maksudnya jurubahasa itu adalah alat penglihatan dari syarat dan Sultan;
3. Adela maksudnya jurubahasa itu adalah lidah dari syarat dan Sultan;

4. Arindi maksudnya jurubahasa itu adalah pelindung dari syarat dan Sultan.

Di pagi buta sejak matahari terbit jurubahasa sudah berada di Lawana Lanto guna menjaga kapal masuk. Apabila ada kapal yang akan masuk, maka dengan segera ia menghadap Sultan guna mengadakan persiapan seperlunya kalau kapal itu berasal dari sahabat seperti kompeni, Ternate, atau Bone.

Dari Kompeni memberikan kepada kerajaan “kalu” dan “jasitara” yang menjadi pakaian dari jurubahasa sebagai tanda pengenalnya.

Sabandara atau syahbandar

Sabandara bertugas sebagai pengawas pelabuhan yang erat sekali hubungannya dengan Sultan dan Jurubahasa. Pada umumnya petugas sabandara adalah anggota keluarga dekat dari Sultan yang sementara bertugas.

Talombo

Talombo adalah pembantu dari Menteri Besar yang masing-masing Menteri Besar diperbantukan 3 orang. Tugasnya adalah menurut apa yang diperintahkan oleh Menteri Besar terutama di dalam pengumpulan weti dari setiap kadie di dalam kerajaan Buton yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tugas-tugas pokok dari Talombo :

1. Talombo wajib menjalan kewajibannya pada waktu siang ataupun malam hari bila menjalankan undangan syarat kerajaan;
2. Tidak ada alasan bagi Talombo untuk menolak perintah syarat yang melalui Menteri Besar dari masing-masing kecuali di dalam keadaan sakit.
3. Talombo berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan undangan menurut semestinya, bonto, bobato, atau pembesar kerajaan yang diperlukan.
4. Bila ada pelarian dari kadie misalnya melarikan dirinya dari tunggu-tunggu dan datang berlindung pada Talombo atau yang

dapat ditangkapnya tidak boleh langsung dihadapkan kepada Menteri Besar melainkan diselidiki lebih dahulu tentang sebab-sebabnya dan bila sudah seharusnya dihadapkan kepada Menteri Besar, barulah dihadapkan dan sebaliknya apabila belum cukup alasan maka orang itu dikembalikan ke kampungnya dengan cukup diberi nasehat oleh Talombo.

5. Bila Talombo karena tugasnya dari syarat kerajaan atau diundang oleh bobato dan sementara berada didalam kadie, tidak ada haknya untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan kadie itu. Apabila dimintai padanya untuk membagi orang-orangnya oleh tunggu-tunggu atau syarat kadie yang bersangkutan atau membagi tanah perkebunan Talombo hanya mempunyai hak sebagai berikut :

Untuk membagi orang hanya sebelah yang dalam bahasa adat dikatakan "saweta" dan bagi tanah perkebunan hanya sepotong yang dalam bahasa adat disebut "sasolo".

6. a. Bila Sapati atau Kanepulu pergi menuju ke tempat upacara pelantikan Sultan yang dikatakan dalam bahasa adat "bulilingianapau" Talombo berjalan di muka untuk diketahui umum agar umum berhenti sambil menunggu dan bila tidak dihiraukan tegasnya tidak mematuhi peringatan Talombo itu maka Talombo karena hukum adat memukul orang itu dengan tongkatnya walaupun anak bangsawan atau anak dari pembesar kerajaan sekalipun.
- b. Sementara Talombo menjalankan pengumuman syarat dalam kata adatnya "batata" dan pada waktu itu dilalui orang atau seakan-akan diejek maka Talombo karena adat wajib memukul orang itu dengan tongkatnya.
7. a. Talombo itu adalah juru-penerangan dalam bahasa adat disebut "pande batata" dan "pande tata-lima" yaitu tukang potong tangan.
- b. Jaminan khusus berupa bahan makanan bagi yang dimaksud dengan tukang potong tangan didatangkan dari kampung-kampung :

(1) *Wabula* = 1000 biji jagung dan 2 keranjang kalame;

(2) *Lapandewa* = 1200 biji jagung dan 3 keranjang kalame;

- (3) *Takimpo* = 1200 biji jagung dan 3 keranjang kalame;
 - (4) *Holimombo* = 400 biji jagung dan 2 keranjang kalame;
 - (5) *Kondawa* = 600 biji jagung dan 2 keranjang kalame;
 - (6) *Burangasi* = 2 keranjang kalame.
8. Apabila Talombo pergi ke kadie maka kepadanya ada pemberian khusus yang dinamakan “bawona kandean” yang besarnya menurut “jupandana” dari kadie yang bersangkutan.
 9. Apabila segala sesuatu yang tersebut di atas yang menjadi tugas kewajiban Talombo tidak dipatuhi semestinya oleh Talombo maka sebagai resikonya, Talombo itu dilepaskan dari jabatannya yang dalam bahasa adat dikatakan “apoajalakea”.

Pangalasa

Pangalasa adalah pegawai yang diperbantukan kepada Menteri dimana tiap Menteri mendapat 6 orang. Tugasnya adalah sama dengan tugas Talombo atas perintah Menterinya menurut batas kewajiban Menteri terhadap kadie yang diawasinya. Pangalasa dapat pula dianggap sebagai ajudan dari menterinya, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh menterinya seperti halnya Talombo menjalankan apa yang diperintahkan oleh menteri besarnya. Perlu diketahui bahwa Pangalasa pada masing-masing syarat kampung tertentu juga ada dan disebut *Pangalasa Kecil*.

2.4 Barata sebagai Sistem Pemerintahan dan Pertahanan

Wilayah kesultanan Buton secara geografis adalah merupakan suatu gugusan pulau yang terletak di kawasan laut Banda dan laut Flores, dan diantara dua wilayah kerajaan besar, Ternate dan Gowa-Makasar. Kawasan ini merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan bagian timur Nusantara sebagai pusat penghasil rempah-rempah dengan kota dagang yang berada di bagian barat. Jalur ini termasuk jalur yang cukup ramai dilayari kapal-kapal pengangkut rempah-rempah.

Di gugusan pulau tersebut banyak ditemukan pulau karang yang belum dihuni oleh manusia, sehingga perairan Wilayah Buton ini

merupakan daerah yang rawan bagi perampok dan para bajak laut. Posisi kepulauan yang berdekatan dan hampir berdempetan memungkinkan para bajak laut menjadikan daerah ini sebagai basis operasi mereka sekaligus sebagai tempat persembunyian para bajak laut yang disebut "Tobelo". Para bajak laut ini sering mengganggu para pelayar yang membawa barang dagangan mereka mengarungi laut Banda dan laut Flores. Sumber-sumber di Buton menyebutkan bahwa para bajak laut yang sering mengganggu masyarakat Buton yang tinggal di tepi pantai itu adalah para perampok dari Tobelo Maluku Utara. Begitu mengerikan orang Tobelo ini sampai sekarang masih sering dilakukan para orang tua jika menakut-nakuti anaknya yang nakal dengan menyebut "Jaga O. Tobelo". (Susanto Zuhdi, 1994:2)

Posisi geografis dan kondisi yang tercipta mendorong Kesultanan Buton mengambil kebijaksanaan untuk membangun suatu wilayah pertahanan yang dapat melindungi dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Para pemimpin Kesultanan Buton menyadari posisi dan kondisi tersebut. Sepanjang sejarahnya kerajaan Buton telah menjadi daya tarik bagi kerajaan-kerajaan atau kekuatan-kekuatan lain yang ingin menguasainya, seperti serangan Kerajaan Ternate tahun 1658 dan 1676, Kerajaan Gowa tahun 1655 dan 1666 dan bahkan Kompeni Belanda (VOC) pada tahun 1655 dan 1775. Adanya serangan-serangan yang silih berganti itu menyebabkan masyarakatnya ketakutan dan menjadi beban psikologis, seperti terlihat pada penuturan secara lisan yang hidup ditengah-tengah masyarakat Buton yaitu, "akowiy bara ajagaaka Gowa, akowiy timbu ajagaaka Tarnate" Maksudnya kalau saat bertiup angin barat Kesultanan Buton bersiap-siap menangkis serangan kerajaan Gowa dan kalau bertiup angin Timur bersiap-siap menangkis serangan kerajaan Ternate".

Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Buton lalu mempersiapkan strategi pertahanannya, dengan menggunakan diplomasi dan membina hubungan kerja sama dengan kerajaan tetangganya atau kekuatan lain yang mungkin akan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan pada kepentingan keutuhan dan kelangsungan hidup Kesultanan Buton, juga tidak terlepas dari adanya falsafah hidup

sebagai azas dan ideologi kerajaan yang menjadi doktrin pemersatu wilayah kekuasaannya yaitu “Yuda-yudamo arrata somanamo karo, yuda-yudamo karo somanamo lipu, yuda-yudamo lipu somanamo sara, yuda-yudamo sara somanamo agama” maksudnya biar hancur harta asal kesultanan pribadi, biar hancur pribadi asal kesultanan tanah air, biar hancur tanah air asal kesultanan pemerintahan dan biar hancur pemerintahan (kesemuanya) asalkan keselamatan agama tetap dipertahankan. (Zahari : 1977; Dokumentasi DPRD Sultra: 1977). Selain itu Azas kehidupan sosial dalam kesultanan Buton yaitu “pabinci- binciki kuli” yang bermakna kebebasan dan kemerdekaan dan persamaan hak, sehingga mendorong kesultanan Buton dapat bertahan sebagai salah satu kerajaan tradisional hingga tahun 1960.

Di sisi lain sejak abad 17 hingga memasuki abad 19, Buton merupakan arena pertikaian dua kutub kekuatan yaitu Ternate dan VOC di satu pihak dan Goa-Makassar dipihak lain. Buton harus menghadapi tekanan-tekanan yang dilancarkan VOC, kemudian Hindia Belanda di satu pihak, dan di pihak lain ancaman dari bajak laut. (Rahim, 1994 : 7).

Menyadari akan hal ini para penguasa kesultanan Buton berusaha untuk menangkal akibat negatif bagi kelangsungan wilayah kekuasaannya. Para penguasa Buton dengan caranya sendiri mencoba dan berusaha agar dapat menanggulangi segala tantangan dan ancaman yang dihadapinya, sehingga ia lolos dan berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai negeri yang merdeka sampai abad ke 20.

Cara yang digunakan dalam menangkal kekuatan asing dan para bajak laut adalah membangun “ Sistem Pertahanan Empat Penjuru Berlapis” yang berintikan kekuatan pertahanan rakyat dengan persenjataan tradisional dan senjata semi modern yang sangat terbatas, serta membangun sistem pertahanan “Barata” dengan menjalin hubungan kerja sama dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya membentuk suatu pakta pertahanan. (Said, 1989 : 37).

Dalam pandangan Buton, Barata merupakan salah satu bagian dari wilayah Kesultannya sekaligus sebagai salah satu unsur dalam sistim pemerintahan Kesultanan Buton yang terdiri atas : a) wilayah inti; b) wilayah moronene; c) wilayah barata. Wilayah Inti yaitu wilayah

yang diperintah oleh para Bonto dan Bobato dan merupakan “pengembangan” dari Patalimbona kemudian Siolimbona. Wilayah Moronene, terdiri dari tiga wilayah yaitu Pulau Kabaena, Poleang serta Rumbia dan merupakan daerah yang diperintah langsung secara adat atau hukum, tetapi tidak langsung dalam pemerintahan.

Barata berarti cadik (cadik perahu). Dengan demikian wilayah *Barata* adalah wilayah yang dianggap dan diharapkan untuk menjaga kestabilan kerajaan. Dalam hal ini termasuk pula pengertian menjaga keamanan dari luar. Ada empat wilayah yang berkedudukan sebagai Barata bagi Kesultanan Buton yaitu 1) Muna, 2) Tiworo, 3) Kalingsusu, dan 4) Kaledupa.

Muna dan Tiworo pada mulanya merupakan kerajaan-kerajaan yang bersamaan munculnya dengan Kerajaan Buton. Kerajaan Muna menguasai wilayah di Pulau Muna bagian tengah sedangkan wilayah Tiworo meliputi bagian utara dan pulau-pulau di Selat Tiworo. Tidak lama setelah timbulnya kerajaan ini, ketiganya menjalin hubungan kekerabatan. (Monografi daerah Sulawesi Tenggara : 1978).

Dalam masa pemerintahan La Elangi (1579-1631) sebagai Sultan Buton IV, keempat wilayah (kerajaan) tersebut di atas ditetapkan sebagai wilayah barata dari Kesultanan Buton. Keempat wilayah barata Kesultanan Buton itu masing-masing mengatur dirinya dengan Dewan Legislatif dan Dewan Pemerintahannya sendiri-sendiri. Pada pertengahan abad XIX semua Barata kecuali Muna sudah merupakan wilayah yang menyatu dengan Kesultanan Buton. Muna dengan berpegang teguh pada tradisi hubungannya dengan Buton sebagai dua kerajaan bersaudara, selalu menolak kedudukan sebagai Barata dari Buton. Persaudaraan kedua kerajaan itu terjalin ketika diangkatnya Murhum yang menjabat Raja Muna, diangkat juga sebagai Raja (kemudian Sultan) di Buton. Sementara itu, di Muna dia digantikan oleh adiknya La Posasu, dan sejak itu pula Muna Selatan digabungkan ke dalam Kerajaan Buton. Namun demikian sepanjang sejarahnya, Muna sering bertentangan dengan Buton yang selalu menempatkan Muna di pihak yang merugi. Setiap kekalahan Muna dalam menghadapi Buton, Buton selalu menempatkan pejabatnya sebagai pejabat Raja Muna. Hal itu merupakan pangkal pertentangan Muna

terhadap Buton. Konon pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Kerajaan Muna juga berada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Ternate. Ketika pada tahun 1655, Sultan Hasanuddin dari Gowa menyerang Buton dan berhasil menguasai Muna dan Tiworo, Raja Muna Sangia Kaindea menjadikan kesempatan ini untuk bebas dari pengaruh Ternate tanpa sepengetahuan Ternate sendiri (Abdul Razak Dg patunru 1967).

Akan tetapi pada tahun 1664, Sultan Ternate menyerahkan kembali Muna atau Pansiano kepada Sultan Buton dengan tidak setahu Raja Gowa. Penyerahan ini ditentang oleh Raja Muna dan tidak mau mengakui kekuasaan Buton. Atas bantuan VOC dan Ternate, Sangia Kaindea dapat ditangkap dan dibawa ke Ternate. Selama di Ternate jabatan Raja Muna dipegang oleh isterinya Wa Ode Wakelu anak dari La Manempa Sapati Buton waktu itu. Sesudah peperangan Gowa, Sangia Kaindea kembali ke Muna sebagai Raja Muna tetapi pemerintahan sebenarnya dijalankan oleh La Ode Idris seorang Kapitalau dari Buton. Pemerintahan La Ode Idris ini disebut Muna sebagai *Sarano Kraindeadea*. Cucu Sangia Kaindea Raja Muna *La Ode Husai Omputo Sangia* pada masa pemerintahannya selalu tidak mengakui kekuasaan Buton atas Muna. Malah Belanda menganggap Muna "*Vrij en on van Boeton*" (lightvoot : 1878).

Pada tahun 1816 Muna bersama Tiworo dengan bantuan Syarif Ali dari Sulawesi Selatan kembali menentang Buton. Perang ini berlangsung sampai akhir 1823 dengan kekalahan Muna dan Tiworo. Seorang Kapitalau dari Buton ditunjuk oleh Sultan Buton sebagai pejabat Raja Muna yaitu *La Ode Ngkumabusi*. (Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara : 1978).

Uraian diatas memperlihatkan bahwa sepanjang abad XVI sampai abad XIX, disamping adanya hubungan persaudaraan Muna merupakan wilayah Barata dari Buton, walaupun Muna berdaulat ke dalam. Dipihak lain orang Muna sampai masa-masa terakhir ini tidak mengakui negerinya sebagai bawahan Buton. wilayah Barata yang lain yaitu Kalisusu, Tiworo, dan Kaledupa dalam perkembangannya secara bertahap menjadi wilayah kesultanan Buton dengan kedudukan khusus sebagai Barata dan pejabat-pejabatnya selalu ditentukan dari Keraton Buton.

Penjabaran tugas “Barata” sebagai sistem pertahanan harus dilihat dari aspek pertahanan kesultanan Buton, terkait secara bersama dengan kerajaan-kerajaan yang berada dalam lingkup kawasan perairan Buton disekitarnya, dengan pusat pertahanan ada di keraton Wolio sebagai ibukota pemerintahan kesultanan Buton. Oleh sebab itu membicarakan Barata sebagai sistem pertahanan terlebih dahulu diawali dengan melihat kepentingan Buton dalam menguasai kerajaan-kerajaan sekitarnya. Untuk merelisasikan cita-cita tersebut dan menangkal gangguan dari kekuatan asing, maka strategi Buton adalah dengan membuat pertahanan yang kokoh ke dalam yaitu membangun *Benteng Wolio* sebagai pusat pertahanan dan Benteng-benteng lain di setiap Kadie Matana Soromba. Oleh karena pemusatan kekuatan dan kendali komando ada di pusat pemerintahan yakni di ibukota kesultanan, maka lebih dahulu dibangun Benteng Wolio sebagai pusat pertahanan. Pembangunannya dimulai pada tahun 1634 hingga selesai pada tahun 1645 hanya dalam waktu 11 tahun lamanya di masa pemerintahan Sultan La Bukeyang bergelar Gafural Wadud dan sangat berjasa dalam membangun pertahanan kesultanan Buton. Begitu selesai Benteng Wolio dibangun beliau sendiri minta kepada Siolimbona untuk berhenti sebagai Sultan.

Dengan selesainya pembangunan Benteng pertahanan itu tidak berarti Buton terbebas dari gangguan keamanan, bahkan semakin tidak aman khususnya bagi masyarakat Buton yang hidup dipesisir. Lagi pula serangan-serangan kerajaan Ternate dan Gowa semenjak akhir abad 16 sampai dengan paroh pertama abad 17, dua kerajaan di Nusantara bagian Timur yang mengapit Buton itu, tampil sebagai kerajaan yang termasuk kuat dan besar. Keduanya saling memperebutkan kekuasaan di wilayah Nusantara bagian Timur. Kebesaran dan kekuatan kerajaan Ternate pada masa itu ditandai dengan keberhasilan menaklukkan 72 pulau di kawasan tersebut pada tahun 1580. (Vellentyn, 1724; 3). Sementara kebesaran Gowa ditandai dengan supremasinya terhadap kerajaan-kerajaan Wajo, Soppeng dan Bone di Sulawesi Selatan. (Patunru, 1983; 17).

Melihat keinginan kedua kerajaan ini, Buton dengan sendirinya berusaha tampil sebagai kekuatan baru yang mengimbangi kedua kekuatan yang telah ada, setidaknya strategi Buton harus pintar

memainkan peran diantara dua kutub tersebut. Selain berusaha membangun pertahanan dalam negerinya, juga membangun pertahanan kolektif bersama kerajaan disekitar agar wilayah kekuasaan Buton dan perairan disekitarnya terbatas dari gangguan Bajak Laut dan interfensi kedua kerajaan itu. Atas dasar pengalaman itu para pemimpin Buton sadar bahwa supaya wilayah kesultanan Buton tetap utuh dan bertahan haruslah menyusun dan mempersiapkan sistem pertahanan yang kuat serta membina suatu kerjasama ke dalam. Untuk mengurus masalah-masalah pertahanan di kesultanan Buton adalah Kapitalau (Kapitaraja) terdiri dari dua orang yaitu Kapitalau Matanaeyo dan Kapitalau Sukanaeyo, sebutan ini sama dengan panglima perang atau menteri pertahanan wilayah Timur dan Wilayah Barat.

Dalam organisasi sistem pertahanan Kesultanan Buton yang dikenal dengan "*Sistem Pertahanan Empat Penjuru Berlapis*"; Barata merupakan sistem/benteng pertahanan terluar (Ofensif). Secara keseluruhan keempat lapisan pertahanan itu adalah sebagai berikut :

- 1) Pertahanan "*Patalimbona*" dalam Benteng Keraton Wolio, inti kekuatan ini ada pada Pata-Limbona; empat kampung (limbo) dalam Benteng Keraton Wolio yang dipimpin oleh bonto yang sekaligus berperan selaku pengaman di wilayahnya dengan pengawasan khusus dalam ibu kota kerajaan bersama-sama dengan pasukan kesultanan/pengawal Sultan.
- 2) Pertahanan kedua adalah, pertahanan "*Bhisa Patamiana*" semacam ahli kebathinan, masyarakat Buton menyebutnya "*Moji*" yang terdiri atas empat orang. Fungsi mereka dalam pertahanan adalah pertahanan kebathinan yang sekalipun berada dalam keraton Wolio akan tetapi jangkauan pengindraannya bisa keluar batas wilayah kesultanan untuk mengetahui musuh yang menyerbu. Karena itu atas izin Yang Maha Kuasa, Bhisa Patamiana berusaha dengan kekuatan bhatinnya untuk menghancurkannya. Adapun Bhisa Patamiana yang diberi tugas mengawal pertahanan kesultanan secara bathiniah adalah :
 - (1) *Mojina Kalau*, wilayah pengawasannya di Selatan mulai dari Batu atas hingga Moromohu.

- (2) *Mojina Silea*, mengawasi wilayah Timur dari Moromohu hingga ke Wawoni'i.
- (3) *Mojina Peropa*, mengawasi wilayah Utara dari Pulau Wawoni'i hingga Pulau Sagori.
- (4) *Mojina Waberongalu*, mengawasi wilayah Barat mulai dari Pulau Sagori sampai pula Batu Atas. (Zahari, 1980; 115, Said, 1989; 5).

Pembagian tugas wilayah penguasaan dari keempat Bhisia ini berdasarkan pula dari empat penjuror mata angin yaitu : di wilayah utara Kesultanan Buton, timur, selatan dan barat. Para Bhisia ini tinggal menetap di dalam Benteng Keraton Wolio sebagai pusat pertahanan.

- 3) Pertahanan "*Matana Soromba*" yaitu empat laskar pertahanan, yang terdiri dari empat tempat/kampung yang berada di tapal batas wilayah utama kesultanan Buton. Mereka ini adalah masyarakat Buton yang telah terpilih dan ditempatkan sebagai prajurit utama di luar istana keraton Wolio yang ditugasi mengawal dan menjaga tapal batas wilayah kedaulatan kesultanan Buton, terutama terhadap para pengacau seperti bajak laut, perampok dan pengganggu keamanan yang ingin memasuki wilayah kesultanan. Keempat kelompok/perkampungan yang diberi tugas sebagai *Matana Soromba* itu adalah :
 - a) Masyarakat/kampung *Lapandewa*, mengawasi keamanan dan menghalau musuh yang datang dari arah utara Kesultanan.
 - b) Masyarakat/kampung *Watumotobe*, yang ditugasi mengawasi keamanan dan menghalau musuh dari arah Timur Kesultanan.
 - c) Masyarakat/kampung *Wabula*, ditugasi mengawasi keamanan dan menghalau musuh yang datang dari arah Selatan.
 - d) Masyarakat/kampung *Mawasangka*, bertugas mengawasi keamanan dan menghalau musuh yang bergerak dari arah Barat Kesultanan. (Said, 1984 : 19).

Pembagian penugasan pertahanan *Matana Soromba* berdasarkan empat penjuror mata angin itu sangat bertalian erat dengan

posisi geografi kesultanan Buton yang selalu mengundang kehadiran kekuatan asing yang ingin menguasainya. Maka penempatan laskar pertahanan ini sesuai dengan jalur pelayaran yang juga sering dimanfaatkan oleh para bajak laut maupun kekuatan asing untuk memasuki Buton. Masyarakat Mawasangka umpamanya ditugasi mengawasi gerak maju musuh dari barat yang datang dari teluk Bone kemudian masuk Selat Buton, dan secara kebetulan penyerangan Gowa Makassar pada tahun 1666 menggunakan jalur barat ini. Demikian pula pada masyarakat Watumotobe dan Lapandewa masing-masing diberi tugas mengawasi gerak maju musuh dari Timur yang juga berhadapan dengan laut Banda, dan jalur utara Selat Buton. Kedua jalur penyerangan ini pernah digunakan oleh Ternate yang dipimpin Sultan Baabullah tahun 1580, pasukan bajak laut La Balontio dan pasukan Gowa-Makassar yang dipimpin oleh Daeng Mangaga pada tahun 1666. (Lightvoet : 48). Sedangkan bagian selatan yang ditempati oleh masyarakat Wabula langsung berhadapan dengan laut Flores; medannya cukup berat untuk dijadikan pendaratan kecuali disekitar Burangasi yang pernah digunakan oleh Abdul Wahid yang membawa agama Islam masuk ke Buton.

- 4) *Pertahanan Barata* dalam pengertian masyarakat Buton Barata adalah penguat yang saling mendukung/membantu agar tetap bertahan dan seimbang tidak gampang hancur, karena yang satu menunjang yang lain, demikian pula sebaliknya. Jadi sistim barata ini diibaratkan seperti perahu jarangka (bersayap).

Tugas utama "Barata" adalah bertanggung jawab terhadap pertahanan keamanan, wilayah kekuasaannya masing-masing. Setiap kerajaan yang tergabung dalam Barata ini secara mandiri mengusahakan sistem pertahanan yang kuat, sedangkan pertahanan secara kolektif apabila salah satu anggota Barata tidak dapat lagi menghadapi musuh, baru meminta bantuan kepada kesultanan Buton. Atas perintah Kapitalao di Buton semua anggota Barata sebagai inti kekuatan bersama memberikan bantuan kepada salah satu kerajaan yang sedang berperang. Dalam arti politis "Barata" adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri di dalam lingkungan kesultanan Buton. Kerajaan-kerajaan ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu

kerajaan Muna (Wuna), kerajaan tiworo, kerajaan Kalisusu dan kerajaan Kaledupa, tetapi diberi otonomi untuk mengatur pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi dari segi tanggung jawab pertahanan dan keamanan wilayah secara kolektif berada di bawah komando Kapitalao Kesultanan Buton. Dalam hal ini Panglima tertinggi Barata ada pada Kapitalao yang berkedudukan di kesultanan Buton, sedangkan di kerajaan-kerajaan itu bertugas mengamankan wilayah kerajaannya.

Hubungan dengan Kesultanan Buton bersifat tradisional, pengaturan sistem pertahanan Barata ini berdasarkan kesepakatan diantara empat kerajaan tadi bersama pemerintah kesultanan Buton. Berdasarkan kesepakatan bersama itu keempat kerajaan ini masing-masing saling menunjang, membantu dan bertukar informasi, khususnya bila terjadi ancaman musuh yang mengganggu teritorialnya, sebab ancaman pada salah satu kerajaan berarti merupakan ancaman bagi keseluruhannya. Maka tugas masing-masing adalah :

- a) Kerajaan Muna (Wuna), Barata yang berada di bagian Utara kesultanan Buton mewaspadaai wilayah utara,
- b) Kerajaan Kalisusu (Kolea Casu), Barata yang berada di bagian Timur kesultanan Buton mewaspadaai wilayah timur,
- c) Kerajaan Kaledupa, Barata yang berada dibagian selatan mewaspadaai wilayah selatan.
- d) Kerajaan Tiworo, sebagai Barata yang berada di bagian Barat mewaspadaai wilayahnya di bagian barat. (Said : 1989, Sahiruddin : 1984).

Pada dasarnya "Barata" ini sebagai pertahanan terluar atau lapisan keempat yang lebih dahulu menghancurkan musuh sebelum masuk dalam wilayah inti. Menurut teori strategi perang modern adalah pertahanan secara ofensif, yaitu mengawal dan mengintai musuh serta menghancurkannya sejak dari tapal batas wilayah kedaulatannya.

Kesepakatan tradisional dari lima kerajaan dalam sistem pertahanan Barat ini diperbaharui kembali pada masa pemerintahan Sultan Buton Kaimuddin Muhammad Idrus pada tahun 1840 yang disepakati menjadi "Sarana Barata" (pemerintahan Barata) yang ditandatangani oleh Sultan Buton dan raja-raja keempat kerajaan.

Pihak Buton yang ikut bertandatangan adalah Sultan Kaimuddin Muhammad Idrus, Sapati La Tobelo, Kanepulu La Kasorana, Kapitalao Latia dan Ismail, Bonto Ogena Matanaeyo La Peropa dan Bonto Ogena Sukanaeyo Haji Abdul Rachim. Penandatanganan dari empat kerajaan adalah Raja Muna Ismail atau la Ode Sumaili, Raja Tiworo Muhammad, Raja Kalisusu La Madja dan Raja Kaledupa Adam. (Dokumen DPRD Tk. I, 1978 : 198).

Adapun tugas-tugas yang diemban oleh sistem pertahanan Barat adalah terutama mempersiapkan persenjataan di setiap kerajaan yang ada dalam lingkungan Buton dengan tujuan untuk menjaga keamanan di wilayahnya. Apabila terjadi penyerahan, maka terlebih dahulu mengadakan perlawanan dan apabila tidak bisa menghadapinya barulah ia meminta bantuan dari Barata yang lain atau pada Sultan Buton. Selain itu Barata juga ditugasi memantau keadaan wilayahnya kalau-kalau ada orang asing yang terdampak karena mengalami kecelakaan kapal, perahu pecah atau tenggelam di wilayah perairan Buton dan sekitarnya, terutama bagi pelaut-pelaut Bone dan Ternate. Pelarian politik dan budak yang mencari perlindungan supaya ditolong dan diperlakukan dengan baik dan diberi perlindungan, kemudian dikembalikan ke negeri asalnya dengan selamat. (Zahari, 1976 : 30).

Dalam sarana Barata juga diatur tentang kunjungan para pejabat kesultanan Buton di wilayah Barata, khususnya Kapitalao dan pengawas Sultan. Bagi rakyat dan aparat atau pembesar kerajaan di wilayah Barata melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai kesalahannya. Mulai dari hukuman ringan seperti diberi sanksi, dipecat sampai pada hukuman gantung. Sarana Barata juga mengatur perkawinan antar kerajaan yang tergabung dalam Barata, baik antara orang-orang dari kesultanan Buton dengan keempat kerajaan maupun sebaliknya. Hal ini merupakan suatu politik dan strategi jangka panjang bagi kesultanan Buton untuk memperluas jangkauan pengaruhnya ke seluruh wilayah termasuk kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam "Barata".

Demikian strategi pertahanan yang dikembangkan oleh kesultanan Buton dalam menjaga keutuhan wilayah kekuasaannya dari gangguan para bajak laut untuk melindungi rakyatnya dari serangan dan tekanan kerajaan Gowa dan Ternate serta VOC dan pemerintah

Hindia Belanda. Dengan caranya sendiri kesultanan Buton menjalankan sistem pertahanan Barata ini, sehingga ia selalu luput dari serangan dan kepungan pihak asing untuk menguasai wilayahnya. Bahkan sebaliknya terjadi perluasan wilayah pengaruh dan kekuasaan kesultanan Buton tidak hanya sebatas Pulau Buton melainkan meluas hingga ke pulau-pulau sekitarnya, sampai ke jazirah Tenggara pulau Sulawesi dan menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sana. Sistem pertahanan Barata ini berakhir setelah masuknya Belanda di Buton pada tahun 1906, dan berkuasa secara *de facto* dan *de jure* dengan mengurangi dan mengatur kembali jabatan-jabatan Kesultanan dalam jumlah yang lebih kecil dan di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda.

BAB III

**KESULTAN BUTON DARI PERJANJIAN
BUNGAYA 1667 SAMPAI PERJANJIAN BUNGAYA
YANG DIPERBAHARUI 1824**

3.1 Interaksi dengan Kerajaan Ternate, Gowa, dan Bone

Kesultanan Buton sebagai salah satu kerajaan yang pernah berdiri dengan memiliki kedaulatan di atas wilayah kekuasaannya secara de iure dan de facto, dalam perjalanan sejarah telah ikut berperan dalam perkembangan sejarah kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kesultanan Buton memiliki letak geografis yang sangat strategis bagi pelayaran dan perdagangan, dan pada akhirnya kesultanan Buton kemudian berkembang menjadi Bandar persinggahan untuk keperluan akomodasi, baik bagi para pedagang dari arah Barat Nusantara ke bagian Timur Nusantara maupun sebaliknya.

Selain karena letak geografis, juga masyarakat Kesultanan Buton adalah masyarakat bahari yang memiliki kegemaran berdagang. Kebiasaan ini telah diwariskan dan diterima secara turun temurun dari nenek moyangnya, sehingga disejajarkan dengan pelaut-pelaut Bugis-Makasar. Kesultanan Buton juga memusatkan perhatian pada laut sebagai sumber penghasilan kerajaan. Kedua faktor tersebut memudahkan Kesultanan Buton untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, seperti Kerajaan Ternate, Gowa dan Bone serta beberapa kerajaan kecil lainnya di sekitar perairan Buton.

Mengingat posisi geografis Kesultanan Buton terletak di jantung lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Timur Nusantara dan potensi sumber daya manusia sebagai pelaut serta kekayaan alamnya, sehingga untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya kerajaan, kesultanan Buton harus membina hubungan kerja sama dengan kerajaan-kerajaan tetangga yang mengapitnya.

Disamping itu, menyadari akan keinginan kerajaan Ternate dan Gowa untuk menguasai Buton, maka kesultanan Buton membina jaringan hubungan kerja sama dengan beberapa kerajaan tetangga dan membangun memperkuat pertahanan yang handal supaya mampu menangkis serangan-serangan dari mana saja yang ingin menguasai Buton. Kerajaan Bone misalnya, sejak lama telah menjalin hubungan persahabatan yang harmonis dengan Buton. Bagi Bone Kesultanan Buton telah mempunyai jasa-jasa baik kepada Bone, terutama karena telah menyelamatkan raja Arupalaka dari pasukan Gowa yang mengejarnya. Ada beberapa wilayah kerajaan Bone yang terletak di daerah Sulawesi bagian Tenggara dengan berbagai dasar pertimbangan, raja Bone telah menyerahkan wilayah Poleang dan Moronene kepada Kesultanan Buton. Kedua wilayah ini mempunyai penghasilan beras sehingga dengan diserahkannya kedua wilayah tersebut maka akan terpenuhi kebutuhan beras bagi Kesultanan Buton. Peristiwa penyerahan kedua wilayah ini kepada Buton oleh masyarakat Bone menyebutnya "*Nadaoangi*" yang berarti yang dirangkul (Thalha, 1982 : 30-31). Sedangkan *Kotua* (Kabaena) telah terlebih dahulu diserahkan kerajaan Luwu kepada Buton.

Tempat pertemuan raja Bone dan Sultan Buton dalam perjanjian penyerahan kedua wilayah tersebut berlokasi di "*Lueno (Pajjongang)*" negeri Poleang Moronene. Daerah ini oleh kedua kerajaan dijadikan sebagai tempat bertemunya kedua kepala pemerintahan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedua kerajaan. Disamping itu sebagai tempat rekreasi berburu bagi raja Buton dan Sultan Buton. Kini lokasi pertemuan raja Bone dan Sultan Buton itu tetap dilestarikan dibawah pengawasan Departemen Pertahanan dan Keamanan karena daerah ini pada masa perang Dunia II merupakan lokasi pertahanan Jepang dan hingga sekarang di lokasi ini masih ditemukan tangki-tangki, bangkai pesawat, Pungker, benteng pertahanan dan alat-alat berat lainnya.

Pembinaan hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan bertujuan agar Kesultanan Buton tetap eksis dan ikut memainkan peranannya melalui pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara. Meskipun Kesultanan Buton sering diganggu oleh para bajak laut (tobelo), terutama serangan yang dipimpin oleh Panglima La Baloutio dari kerajaan Luwuk Banggai yang masuk wilayah kerajaan Ternate dan serangan-serangan lainnya yang cukup membahayakan keberadaan Kesultanan Buton, namun Buton tetap bertahan dan bahkan semakin berkembang wilayah kekuasaannya dengan berintegrasinya beberapa kerajaan kecil di sekitarnya.

Atas dasar pengalaman yang dilaluinya, di samping membangun pertahanan, juga harus membina persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga serta kekuatan-kekuatan yang membahayakan kelangsungan kerajaannya. Ternyata politik kebijakan pemerintahannya tetap berlandaskan pada falsafah dan ideologi "Pabinci-binciki kuli dan Balimo karo somanamo tipu dan Balimo lipu Somanamo Syara. Falsafah ini menjadi pedoman bagi setiap Sultan Buton dalam melaksanakan pemerintahan.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka akan dibicarakan bagaimana upaya yang dilaksanakan Kesultanan Buton membina hubungan kerja sama dengan kerajaan-kerajaan tetangganya dan mengadakan perjanjian dengan Kompeni (VOC). Dalam bab ini akan dikemukakan interaksi kesultanan Buton dengan kerajaan Ternate, kerajaan Gowa dan kerajaan Bone, menghadapi konflik di dalam negeri kesultanan, kemudian interaksi dengan Kompeni (VOC) dan akhirnya reaksi kesultanan Buton terhadap kekuasaan Kompeni (VOC) di Kesultanan Buton.

Interaksi dengan Kerajaan Ternate

Sebelum kekalahan Gowa terhadap VOC dan perjanjian Bungaya pertama "Cappaya ri Bungaya" 18 November 1667. (Patunru,19). Kesultanan Buton berada dalam penguasaan kerajaan Ternate. Sejak masa pemerintahan Sultan Baabullah aparat pemerintahan dari Ternate selalu berkunjung ke Buton. Sultan Babullah sendiri berada di Buton tahun 1580 dalam perjalanan mengunjungi daerah-daerah yang

termasuk wilayah kekuasaannya dan sekaligus menjalankan misi agama Islam, yaitu menyampaikan ajaran agama Islam kepada daerah-daerah yang dikuasainya.

Pada saat Baabullah berada di Buton, ternyata ia baru mengetahui dan menyaksikan bahwa masyarakat Buton telah memeluk agama Islam, sejak tahun 1511 yang dibawa oleh seorang saudagar keturunan Arab dari Johor bernama Sayid Abdul Wahid, bahkan Agama Islam ditetapkan sebagai agama kerajaan oleh Raja Murhun. Baabullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Selayar salah satu wilayah yang dikuasainya, untuk diserahkan kepada kerajaan Gowa. Sebelumnya kerajaan kecil Tiworo telah diserahkan pula kepada kesultanan Buton.

Hubungan antara Buton dan Ternate pada masa pemerintahan Sultan La Elangi (Dayanu Ikhsanuddin) dan Sultan Baabullah berjalan baik, hal itu terbukti dengan seringnya diadakan dengan pertukaran kunjungan dan kedua belah pihak selalu saling mengirim utusan bahkan Sultan Madar Syah pengganti ayahandanya (Baabullah, mengawini putri bangsawan Buton. Namun selama kurun waktu membina hubungan ini terjadi pula krisis yang diakhiri dengan peperangan di sebabkan tidak tersalurnya keinginan-keinginan kedua belah pihak dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Secara politik kontak hubungan Buton dan Ternate pada awalnya bertolak dari perjanjian antara Kompeni dengan Ternate dan antara Kompeni dengan Buton yang menyebabkan kedua kerajaan ini bertahun-tahun lamanya membina hubungan persahabatan diantara keduanya bersama kompeni (VOC).

Penyerangan Gowa atas Kesultanan Buton yang dipimpin oleh Karaeng Bonto Maranu merupakan awal dari lahirnya perjanjian persahabatan antara kompeni (VOC) yang diwakili oleh Speelman dengan Kesultanan Buton yang diwakili oleh Sultan Adilil Rakhiya (La Simbata) pada tanggal 25 Juni 1667 di atas kapal Thoff Van Zaeland milik VOC yang berlabuh di Teluk Bau-bau (Ligtvoot, 877 : 57 dan Zahari. 1977 :55).

Dalam perjanjian itu menjadi jelas kontak hubungan kerajaan Ternate dan Kesultanan Buton, dimana pada beberapa pasal dari isi

perjanjian menyebutkan bahwa perutusan dari raja dan atau anak raja yang bersahabat dengan Kompeni (VOC) dan Ternate boleh diterima di Buton, sekalipun tidak ada surat keterangan dari kompeni dan raja Ternate segera melaporkan kepada Kompeni atas kejadian itu. Sedang pada pasal lain juga dijelaskan bahwa wafatnya raja/sultan, pengangkatan dan pemecatan raja/sultan dan termasuk semua jabatan penting dalam kesultanan terlebih dahulu di beritahukan kepada Ternate dan Kompeni untuk mendapatkan persetujuan. Raja/Sultan yang akan dilantik terlebih dahulu menyatakan kesetiiaannya kepada Ternate dan Kompeni.

Pada dasarnya hubungan persahabatan antara kerajaan Ternate dengan kesultanan Buton telah berlangsung lama yaitu sejak masa pemerintahan Baabullah ayahanda Sultan Mandar Syah. Hubungan itu berjalan intim, hal ini terjadi karena antara keduanya mempunyai pertalian darah dan sama-sama sebagai pemeluk agama Islam. Untuk melukiskan hubungan itu oleh masyarakat Buton sampai sekarang masih hidup cerita lisan di kenal dengan “a Sambahea Juma’a iy Ternate” artinya para pembesar Buton setiap hari Jumat selalu sembahyang di Ternate” dengan menggunakan kapal tumpangan “wasalamata” maksudnya “kapal yang karena cepatnya tidak bisa dijangkau dengan mata. Juga kedua kerajaan sama-sama sebagai kerajaan Islam, dan para penyebarannya yang pertama berada dalam kelompok yang sama, sehingga memperkuat tali persahabatan kedua kerajaan.

Akan tetapi seperti yang dilukiskan di atas bahwa persahabatan antara Ternate dan Buton mengalami pula masa-masa kritis. Penyebabnya adalah salah satu poin dari isi perjanjian dengan kompeni yaitu setiap sultan dan pembesar kesultanan Buton yang dipecat dan diangkat menjadi pejabat sultan atau jabatan kesultanan lainnya terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ternate dan Kompeni. Isi pasal ini kemudian menjadi penyebab retaknya hubungan kedua kerajaan, dimana Buton melanggar secara sepihak tanpa mengkonsultasikan dengan Ternate dan Kompeni; tepatnya pada tahun 1668 dimana dalam kesultanan Buton mengatakan pemecatan terhadap Sultan La Simbata dan Sopati La Jiparamba kemudian Dewan syarat Buton mengangkat sultan penggantinya yaitu: Sultan Kaimuddin (La Tangkaraja)

peristiwa ini tidak pernah dilaporkan kepada Sultan Ternate dan bahan disusul peristiwa kedua yaitu terbunuhnya seorang pembesar kerajaan Ternate di Buton dalam perjalanannya dengan perahu Makassar kembali ke Ternate. Peristiwa ini juga tidak dilaporkan pihak Buton sehingga dalam masa pemerintahan Sultan La Tangkaraja terjadi ketegangan dengan Ternate. Ketegangan ini diperburuk pula dengan terjadinya pergolakan di dalam kesultanan Buton, yaitu pertentangan yang terjadi di kepulauan Tukang Besi dan di Barata Muna (Lohia) yang ikut membawa situasi semakin panas antara Ternate dan Buton, sehingga terjadi pertempuran terbuka pada tahun 1676 (Ligtvoot : 1877 : 66)

Persengketaan antara Ternate dengan Buton ingin diselesaikan melalui jasa baik Gubernur Maluku "David Harthowwer" dalam perjalanannya menuju Jakarta singgah di Buton untuk menyelidiki dan menyelesaikan pertentangan itu. Ternyata gubernur tsb. tidak mendapat hasil yang mengembirakan karena ia tidak mendapat sambutan dan penerimaan yang baik dari Sultan Buton.

Perang antara Buton dan Ternate berjalan terus berlokasi di kerajaan Muna. Kompeni (VOC) menunjuk Gubernur Harthowwer kembali ke Buton untuk menyelesaikan pertikaian kedua kerajaan pada tanggal 3 Februari 1677. Sesungguhnya di balik peristiwa pertentangan Ternate dan Buton adalah persaingan dan perebutan hegemoni dimana pihak Buton tidak setuju dengan salah satu poin bunyi pasal perjanjian antara Buton dan Kompeni, yaitu diwajibkannya Buton tunduk Ternate. Sebenarnya kedua kerajaan ini masing-masing saling berebut pengaruh, khususnya pada kerajaan-kerajaan kecil di sekitar pantai timur Sulawesi dan pulau-pulau kecil yang berada dibawah pengaruh Ternate. Adapun dari reaksi masyarakat dan para pembesar kesultanan Buton yang tidak setuju dengan isi perjanjian itu membuat hubungan persahabatan Ternate dan Buton selalu terganggu.

Bagi pihak Ternate sendiri dengan adanya perjanjian itu selalu ditafsirkan bahwa bangsawan Ternate dapat berkuasa di Buton. Ini terbukti setelah, Sultan La Awu meninggal dunia terjadi pertentangan para bangsawan Buton yang menyebabkan timbulnya krisis kepemimpinan. Keadaan yang tidak menentu ini telah dimanfaatkan

oleh salah seorang putra bangsawan Ternate, sehingga Dewan Syara Buton dapat mencalonkannya sebagai Sultan dengan alasan agar hubungan Ternate Buton dapat pulih kembali. Namun kehendak ini ditentang oleh golongan bangsawan dan pembesar kesultanan lain yang tidak setuju dengan sikap itu. Kelompok ini mengajukan protes karena merasa malu kalau hal itu sampai terjadi ditetapkan sebagai sultan yang belum diketahui secara jelas pribadi dan kesetiiaannya kepada kesultanan dan rakyat Buton. Lagi pula calon sultan tersebut tidak mengetahui dengan pasti latar belakang sejarah kesultanan Buton. Menyadari akan hal ini Dewan Syara Buton mencari jalan keluar dan berhasil mendapatkan calon sultan Buton dan bahkan ia merupakan calon tunggal.

Untuk menghindari kekecewaan dari putra bangsawan Ternate itu dan agar hubungan baik Ternate dan Buton tidak semakin memburuk, putra bangsawan tadi dijanjikan untuk menjadi raja Muna. kepadanya dijelaskan bahwa kedudukan antara raja Muna dan Buton adalah sama. kerajaan Muna adalah kerajaan yang berdiri sendiri bukan fasal dari kesultanan Buton lagipula kerajaan Muna masih dibawah pengaruh kekuasaan Ternate. Atas perintah Dewan Syara Buton ia berangkat ke kerajaan Muna, namun malang baginya beliau terbunuh oleh kawan bajak laut dalam perjalanan menuju kerajaan Muna.

Untuk menyelesaikan pertikaian Ternate dan Buton pada tanggal 11 Mei 1677 Sultan Ternate Kaicili Siberi yang menggantikan ayahandanya Sultan Madar Syah menyampaikan persyaratan tertulis kepada Kompeni (VOC) tentang ketentuan status daerah-daerah yang menjadi perselisihan antara Ternate dan Buton. Namun dalam perjanjian tidak jelas daerah-daerah mana yang menjadi perselisihan, maka kebijaksanaan dan penemtuannya diserahkan kepada kesultanan Buton. Pihak Buton sudah dapat menduga daerah-daerah tersebut adalah pulau Wawoni'i, kepulauan Tiworo dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya disekitar selat Tiworo dan laut Flores seperti Kalautoa dan sekitarnya. Sedangkan Kalisusu dan pulau-pulau Tukang Besi sudah terlebih dahulu diambil alih oleh Kesultanan Buton. Pada saat peninjauan daerah-daerah yang akan diserahkan tersebut turut serta pembesar dari Kesultanan Buton yaitu Bonto La Dele dan Pengalasa La Sihalouw dan La Tuwuda. (Zahari. 1977 : 65).

Setelah melewati masa-masa kritis kontak hubungan antara Kerajaan Ternate dan Kesultanan Buton, maka pada masa pemerintahan Sultan Kaimaddin (La Jampi) mengambil prakarsa untuk mengatasi situasi dan menyelesaikan ketegangan antara Buton-Ternate usaha pertama dengan mengiriskan utusan ke Makassar (Ujung Pandang) untuk bertemu dengan Gubernur yang dipimpin oleh raja Batauga di dampingi La Andi menteri Dete dan seorang lagi menteri Siompu beserta 16 orang Pangalasa. Perutusan Buton ini berhasil mencapai kesepakatan pada tanggal 22 Maret 1766. Mengapa pihak Buton harus meminta kepada Kompeni untuk menyelesaikan perselisihan Ternate dan Buton, karena sumbernya adalah perjanjian antara Buton dan Kompeni pada tahun 1667 yang mewajibkan Buton harus tunduk kepada Ternate. Dengan diterimanya usul Buton untuk menghilangkan salah satu poin bunyi pasal perjanjian yaitu “tidak lagi mewajibkan kepada Buton untuk memberitahukan kepada raja Ternate, apabila terjadi pemberhentian atau pengangkatan Sultan dan pejabat-pejabat Kesultanan”. (Zahari; 1977 : 142).

Hubungan antara kerajaan Ternate dan Kesultanan Buton tidak hanya dalam bidang pemerintahan, politik, perdagangan dan pelayaran, tetapi juga hubungan sosial budaya, yaitu terjadinya misi kunjungan kedua kerajaan dan bahkan diikuti dengan suatu ikatan perkawinan politik untuk mempererat persaudaraan kedua kerajaan, seperti perkawinan Sultan Ternate Madar Syah dengan putri bangsawan Buton pada tahun 1671 dan juga kedua pimpinan kerajaan yang saling mengundang kalau ada upacara-upacara kerajaan yang sangat penting. Pada saat Sultan Madar Syah kembali ke Ternate dari lawatannya di Buton, ikut pula dalam rombongan itu mantan sapati La Jiparamba berkunjung ke Ternate. Sedangkan salah seorang kepala suku di Ternate Sangaji Matiar tinggal di Buton hingga tahun 1671 dan kemudian ke Tiworo untuk bertemu dengan seorang diplomat Buton dan mantan Sapati yang kharismatik bernama La Manempa yang berada di Tiworo atas tugas yang diberikan Sultan Ternate sebagai penguasa di sana.

Dengan lahirnya perjanjian baru antara Kompeni dan Buton merupakan titik awal penyelesaian pertikaian Ternate dan Buton dan bahkan menjadi akhir dari kontak hubungan formal di bidang

pemerintahan dan politik antara kerajaan Ternate dengan kesultanan Buton, yang telah berlangsung kurang lebih satu abad lamanya. Akan tetapi hubungan sosial dan kekeluargaan tetap berlangsung secara terus menerus hingga tidak pernah di ketahui kapan berakhirnya.

Interaksi dengan Gowa

Meskipun sejarah menunjukkan bahwa Gowa dan Buton sering terlibat dalam peperangan karena kepentingan masing-masing, namun kedua kerajaan ini selalu mencoba menjalin hubungan persahabatan. Kerajaan Gowa-Makasar sesungguhnya telah lama mengincar kesultanan Buton untuk menguasainya dan berada dibawah pengaruhnya pada saat kerajaan ini melaksanakan politik ekspansi pada abad ke-16. Bagi pihak Gowa dengan dikuasainya kesultanan Buton dapat meluluskan jalur perniagaan dan dijadikan jembatan antara Maluku sebagai pusat rempah-rempah dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan Jawa sebagai bandar perdagangan. Hal ini bagi Gowa sekaligus dapat mewujudkan rencananya sebagai penguasa di laut bagian Timur Nusantara. Sebelum menyerang Buton untuk kedua kalinya kerajaan Gowa terlebih dahulu menyerang kerajaan Tiworo yang menguasai jalur pelayaran di Selat Tiworo dengan jazirah Tenggara Pulau Sulawesi yaitu jalur pelayaran yang menghubungkan Selat Bone dibagian Barat dan Selat Tiworo untuk menuju Laut Banda di bagian Timur. Jalur pelayaran pesisir pantai timur pulau Sulawesi kemudian terus ke Maluku melalui Laut Banda.

Serangan Gowa terhadap Kerajaan Tiworo pada dasarnya sebagai suatu strategi Gowa untuk memancing reaksi Buton karena Buton ikut menanamkan pengaruh kepada kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya melalui kerjasama di bidang pertahanan "Barata" dan sekaligus mengalihkan perhatian dan kekuatan Buton di sana. Atas peristiwa penyerangan Gowa di Tiworo Buton dan Kompeni ikut memberikan bantuan dalam perang tersebut. Sebagai lanjutan dari usaha mencari daerah strategis, Kerajaan Gowa mengadakan serangan kepada Kesultanan Buton yang dipimpin sendiri oleh Sultan Hasanuddin. Penyerangan Gowa terhadap Buton itu tidak berlangsung lama, karena kekuatan Buton tidak seimbang dibanding kekuatan pasukan yang

dimiliki Gowa, maka Gowa berhasil mematahkan perlawanan Buton hanya dalam waktu dua bulan saja. Buton mengakui keunggulan Gowa dan menyatakan diri sebagai pihak yang kalah perang. Sebagai akibat dari kekalahan perang, kepada Buton diwajibkan membayar kerugian perang kepada Gowa sebagai pihak yang menang setiap tahun 870 tail atau 13920 maas. 888 kati atau 8880 tail atau 142080 maas (Zahari, 1977 : 33).

Politik ekspansi Kerajaan Gowa yang telah dimulai akhir abad ke-16 berlanjut pada abad ke-17 dengan mengadakan serangkaian penaklukan kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Ternate, Tello Paccoe 1590, Bone 1643 dan beberapa Kerajaan kecil lainnya. Takluknya kerajaan Bone kepada kerajaan Gowa menyebabkan Raja Bone Arung Palakka (Arupalaka) bersama pembesar Kerajaan Bone lainnya melarikan diri ke Buton atas pelarian Arung Palakka itu, pihak Gowa mengadakan pengejaran. Setelah Gowa mengetahui tempat persembunyian Arung Palakka di Buton, segera Sultan Hasanuddin mengirim utusan kepada Sultan Buton agar dapat menyerahkan Arung Palakka dan kawan-kawannya kepada Gowa. Ketika utusan Sultan Hasanuddin tiba di Buton disambut baik oleh sultan La Awu, kemudian utusan Gowa ini menanyakan hal ikhwal Raja Bone Arung Palakka dan beberapa pembesar kerajaannya yang mencari perlindungan di Buton. Sultan La Awu menyatakan dan bersumpah bahwa “tidak ada Arung Palakka di atas tanah Buton”. Untuk meyakinkan utusan tersebut ia dipersilahkan untuk mencari sendiri di dalam benteng Kerajaan Wolio. Akan tetapi karena tidak menemukan apa-apa, maka utusan Raja Gowa itu kembali ke Gowa untuk melaporkan kepada Sultan Hasanuddin dengan diberikannya perlindungan terhadap raja Bone dan para pembesar kerajaan itu, menyebabkan terjadi ketegangan antara Gowa dan Buton. Sultan Hasanuddin semakin marah lagi karena sikap Sultan La Awu yang tidak memberikan kejelasan kepada utusan Gowa tentang tempat persembunyian Arung Palakka. Sementara menurut mereka, Buton dengan sengaja memberikan perlindungan kepada Arung Palakka. Menurut versi Gowa Arung Palakka tidak hanya sebagai musuh Gowa tetapi juga membuat malu raja dan bangsawan Gowa karena dalam pelariannya telah membawa serta “Daeng Talele” seorang putri

bangsawan Gowa, sehingga ia tetap dicap sebagai buronan Gowa, kemanapun perginya Gowa berkewajiban untuk menangkapnya. Sesudah beberapa waktu berselang Sultan Hasanuddin mendengar berita bahwa Arung Palakka bersembunyi di kesultanan Buton, maka pada tanggal 23 Oktober 1666 Raja Gowa itu memberangkatkan pasukan armada lautnya yang berkekuatan 20.000 orang lengkap dengan persenjataan untuk menghukum Buton. Pasukan Gowa kali ini merupakan pasukan terbesar dalam sejarah peperangan Gowa-Makasar dengan pimpinan pasukan penyerangan dipercayakan kepada “Karaeng Bontomarannu” dan pasukan bantuan dari Bone sendiri yang dipimpin oleh “Arung Amali” dan dari Sopeng dipimpin oleh La Tenrituppa to Walenae Arung ujung-palu. (Lightvoet, 1877 :49).

Setelah Karaeng Bontomarannu dan pasukannya berada diperairan Buton, pasukan dibagi menjadi dua rombongan. Rombongan pertama mendarat di Kalisusu bagian timur Buton, yang dipimpin oleh La Tenrituppa to Walenae Arung Ujung-pulu dan pimpinan pasukan di koordinasikan oleh “Daeng Mangaga”. Sedang rombongan kedua mendarat di bagian Barat (Selat Buton) dipimpin langsung oleh Karaeng Bontomarannu. Perang yang dahsyat menurut sejarah Buton ini sempat diketahui oleh Kompeni (VOC) di Batavia (Jakarta). Segera Speelman dengan kekuatan armada 13 buah kapal 500 orang tentara Kompeni menuju perairan Buton. Armada Kompeni tiba di teluk Bau-Bau dan menemukan pasukan Gowa sedang mengepung dan menyerang Buton dari arah laut sehingga perang antara Gowa dan Buton terjadi di Teluk Bau-Bau. Pasukan VOC yang dipimpin Speelman yang dalam rombongannya ikut Arung Palakka menyatakan untuk membantu Buton. Pasukan Gowa yang telah masuk ke teluk Bau-Bau terkurung dari luar sehingga tidak bisa melarikan diri. Perang berlangsung selama beberapa hari sehingga kekuatan pasukan Gowa semakin berkurang, sementara pasukan dari Timur yang mendarat lewat Kalisusu belum tiba di Bau-Bau dan secara diam-diam pasukan bantuan dari Bone Soppeng dan Bugis lainnya, berpihak kepada Buton setelah mengetahui bahwa Arung Palakka membantu Buton bersama Kompeni (VOC) melawan pasukan Gowa.

Hanya dalam waktu 4 hari setelah Arung Palakka diserahkan tanggungjawab memimpin perlawanan ia dapat mengumpulkan 4.000

orang pasukan Bone dan Soppeng yang berpihak kepadanya untuk kemudian membentuk pasukan sendiri dan akhirnya terjadi perang segitiga Buton dan Bone di satu pihak menyerang pasukan Gowa di pihak lain. Bagi Arung Palakka perang ini merupakan dendam dan pembalasan untuk merealisasikan cita-cita untuk kembali ke Bone sebagai penguasa tanpa campur tangan Gowa. Akhirnya pasukan Gowa yang semakin lemah daya tempur dan semakin sedikit jumlahnya ditawan dan pasukan gabungan Buton, Bone dan VOC yang dipimpin Speelman. Sisanya menyerahkan diri kepada pasukan Gowa yang tertawan itu kemudian ditempatkan di sebuah pulau kecil, yang berhadapan dengan pelabuhan Bau-Bau yang disebut "Liwuto Maksa" ketika tawanan pasukan Gowa ditempatkan di pulau itu, maka nama pulau itu berubah menjadi "Pulau Makassar". Pemberian nama ini oleh masyarakat Buton untuk mengenang peristiwa tersebut yaitu penempatan tawanan perang Gowa-Makassar. (Valentijn dalam Zahari, 1977 : 51-52).

Dalam perang tersebut Karaeng Bontomarannu berhasil lolos dari kepungan Pasukan gabungan, sedang Daeng Mangaga dan La Tenrituppa Arung Ujung-pulu bersama 5.500 pasukannya ikut tertawan dan ditempatkan di pulau Makassar. Atas perintah Speelman semua tawanan tidak diberi makanan. Tetapi setelah Speelman meninggalkan Buton menuju Maluku, Sultan Buton La Simbata yang dipercayakan Kompeni untuk mengawasi para tawanan itu secara diam-diam memberikan pelayanan dengan memberikan bantuan bahan makanan dan tumpangan berupa (perahu) agar mereka dapat kembali ke negerinya masing-masing. Tindakan yang dilakukan oleh Sultan Buton La Simbata ini sesungguhnya bertentangan dengan penugasan yang diberikan oleh Kompeni dalam hal ini Speelman akan tetapi bagi Sultan Buton dengan melakukan tindakan memberikan bantuan dan bahkan mereka diperintahkan untuk kembali ke Gowa, semata-mata untuk tidak semakin memberatkan permasalahan yang dihadapi dan juga agar tidak menjadi permasalahan yang secara terus menerus akan meningkat kepada perang selanjutnya. Juga pihak Buton menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Kompeni hanya untuk merusakkan hubungan beberapa kerajaan yang ada guna tercapainya politik adu domba mereka, pihak Buton tidak selamanya percaya terhadap

Kompeni dengan membatasi persahabatannya dengan kerajaan Gowa, karena itu pihak Buton selalu berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan kerja sama dengan Kompeni.

Meskipun Kesultanan Buton selalu terlibat dalam perang dengan Gowa, tetapi hubungan persahabatan Buton dengan kerajaan Gowa diharapkan dapat berlangsung secara harmonis, karena kedua kerajaan ini sama-sama mempunyai perhatian ke laut sebagai pusat kelanjutan hidup kerajaannya. Perhatian Buton terhadap Gowa dibuktikan dengan sikap yang diambil oleh Sultan La Simbata melepaskan semua tawanan perang Gowa yang ada di pulau Makassar. Hal itu merupakan salah satu strategi diplomasi Buton untuk menunjukkan simpati kepada Gowa bahwa Buton ingin bersahabat, dan agar Gowa tidak secara terus menerus menyerang Buton. Keinginan pihak Buton di sambut baik oleh Gowa, bagi mereka adalah suatu keberuntungan, karena Buton memiliki letak yang strategis dan tetap membuka pintu bagi pelayaran dan perdagangan Gowa-Makassar yang masuk ke Buton.

Sebenarnya paling tidak ada 4 kerajaan yang saling berebut pengaruh dan mempunyai perhatian di bidang pelayaran dan perdagangan yaitu Gowa, Ternate, Buton dan Bone. Keempat kerajaan tersebut saling berebut pengaruh dan ingin tampil sebagai penguasa di wilayah timur nusantara saat itu. Bagi Kesultanan Buton yang telah membaca sinyal-sinyal yang dimainkan oleh Gowa maupun Ternate, selalu berusaha untuk memperkuat diri dengan melakukan politik integrasi dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dan terhadap empat kerajaan lainnya membentuk strategi pertahanan dan kerjasama yang dikenal dengan *Barata* dan dengan Kompeni tetap menjaga kesinambungan. Hal itu merupakan suatu kecerdikan diplomasi yang dimainkan para pemimpin Buton agar hubungan Kompeni dan Buton tetap berjalan harmonis. Dengan mengatur keseimbangan ini, kerajaan Gowa pun mempunyai perhitungan untuk menyerang Buton secara terus menerus yang sejak semula telah berupaya untuk merebutnya atau setidaknya menjadi wilayah pengaruh Gowa.

Pada masa pemerintahan Sultan La Tumparasi (1709-1711) hubungan Buton dan Gowa berjalan baik, kedua belah pihak saling bekerjasama. Hubungan harmonis ini tercatat dalam sejarah Buton,

pada saat terjadi perebutan tahta kekuasaan antara La Tumparasi dengan La Angkariri, dalam perebutan tahta ini dimenangkan La Angkariri, akhirnya Sultan La Tumparasi bersama pengikutnya meninggalkan Buton menuju kerajaan Gowa yang diterima baik oleh raja Gowa. Peristiwa diterimanya La Tumparasi yang meminta perlindungan kepada Raja Gowa, dalam masyarakat Buton mengenalnya dengan istilah "*Mosubuna I Jupanda*, artinya Sultan yang turun tahta dan menetap di Ujung Pandang. Sedangkan mantan Sultan La Ibi yang ikut ambil bagian dalam peristiwa perebutan tahta tersebut kemudian juga meninggalkan Buton menuju kerajaan Bone pada tahun 1712 bersama saudaranya Raja La Wele. Tidak lama kemudian mereka dibawa Kerajaan Gowa bergabung bersama La Tumparasi yang seterusnya menetap tinggal di Bonthain dalam wilayah Kerajaan Gowa. (Zahari, 1977 : 86).

Hubungan antara Buton dengan Gowa semakin intim setelah Kompeni mengalihkan penguasaan atas Buton dari Gubernur Wilayah Ambomia ke Gubernur wilayah Ujung Pandang di Makassar dan setelah Kerajaan Gowa takluk kepada Kompeni (VOC) pada tahun 1667. Beralihnya penguasaan Buton kepada Gubernur Kompeni di Makassar menyebabkan hubungan antara Buton dan Gowa semakin lancar, khususnya mobilitas pelayaran dan perdagangan. Hal itu ditentukan pula oleh rakyat kedua kerajaan yang adalah para pelaut yang selalu menjelajahi Nusantara dengan perahu-perahu tradisional seperti pinisi, lambo, sope-sope, jerangka, padewakang dan lain-lain.

Hubungan baik antara Gowa dan Buton ini berlangsung terus dengan terjadinya pertukaran misi budaya dan saling kunjung mengunjungi oleh wakil-wakil kedua kerajaan; bahkan kesultanan Buton pernah mengirim utusan ke kerajaan Gowa dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan kedua kerajaan, antara lain misi yang dipimpin La Kabaura. Tokoh Buton ini di kerajaan Gowa di kenal dengan nama "*Raja Bau*" atau "*Bauru*", beliau lama tinggal di kerajaan Gowa dan menikah dengan anak Tomarilaleng Gowa. Dalam riwayat raja-raja Gowa La Kabaura pernah menjadi raja Soppeng. (Thalha, 1982 : 29).

Kesultanan Buton juga pernah mendirikan perwakilan di Kerajaan Gowa dan hingga sekarang perkampungan orang-orang Buton yang dikenal dengan “*Kolojia*” yaitu tanah yang pernah dihadiahkan kepada raja Buton dan orang-orang Buton yang tinggal di Kerajaan Gowa. Kampung Kolojia ini sekarang berada disekitar tempat pelelangan ikan di ujung jalan Somba Opu bagian selatan dekat pantai Losari di kota Ujung Pandang dan bahkan kata Somba Opu erat kaitannya dengan penamaan yang diberikan oleh orang-orang Buton. Bagi mereka kata ini mempunyai sejarah tersendiri sebagai bukti hubungan kerja sama diantara kedua kerajaan. Pusat aktivitas orang-orang Buton berhubungan dengan orang-orang Bugis Makassar terjadi di Pasar Butung hingga kini pasar tersebut masih tetap ada.

Interaksi dengan Kerajaan Bone

Hubungan tradisional Kerajaan Bone dan Kesultanan Buton telah berlangsung lama, bahkan sejak masa pemerintahan Raja Mulae. Hubungan Bone dan Buton tidak hanya terbatas pada politik dan pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya melainkan juga hubungan kekeluargaan yang diikat dengan pertalian darah melalui perkawinan sehingga silsilah raja-raja Buton dan Bone mempunyai hubungan darah, juga termasuk raja-raja di Luwu. Antara kerajaan Bone dan Kesultanan Buton dihubungkan oleh teluk Bone sekaligus sebagai batas wilayah kedua kerajaan. Kalau ditelusuri sejarah masa lampau kedua kerajaan mempunyai hubungan persahabatan yang harmonis dan intim tidak pernah terlibat dalam persengketaan atau peperangan, yang ada hanyalah kerjasama melalui musyawarah dan mufakat diantara keduanya. Kalau menghadapi masalah-masalah yang membahayakan mereka menyelesaikan dengan baik. Oleh karena eratny hubungan kedua kerajaan, maka Bone dan Buton disebut sebagai kerajaan kembar, bagi masyarakat Bugis Bone mengistilahkannya dengan “Bone rilau, Buntung riaja’ yang berarti “Buton adalah Bone di timur, dan Bone adalah Buton di barat” (Thalha, 1982, : 28, Susanto Zuhdi, 1994, : 13).

Hubungan persahabatan Buton dan Bone sepanjang sejarahnya dapat ditelusuri dari beberapa sumber yang telah dihimpun oleh A.M. Zahari dalam bukunya “Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni” bahwa

pada masa pemerintahan Sultan La Awu, Raja Bone Arung Palakka yang dikejar oleh Sultan Hasanuddin dari Gowa melarikan diri dan minta perlindungan Sultan Buton. Arung Palakka tiba di Buton pada tahun 1660 bersama para pengikutnya pembesar kerajaan Bone antara lain Daeng Pabila, Arung Karowangi dan La Tomparina Arung Atakka yang lebih di kenal dengan panggilan Arung Patojo, diterima dengan senang hati oleh Sultan Buton La Awu. (Lightvoet, 1877 : 46, Patunru : 41-42)

Pada saat itulah mereka mengadakan perjanjian, Kesultanan Buton. Kerajaan Bone diwakili oleh Sultan La Awu dan Raja Bone diwakili Arung Palakka yang isinya : bahwa antara kedua kerajaan (Bone dan Buton) tidak boleh saling menyerang dan apabila ada orang Bone yang mencari perlindungan di Buton, maka merupakan tempat yang aman baginya. Demikian pula sebaliknya bila ada orang Buton yang mencari perlindungan di Bone juga merupakan tempat yang aman. Perjanjian kedua kerajaan ini merupakan suatu bukti sejarah bahwa banyak kejadian sesudahnya para bangsawan dan pembesar kedua kerajaan menjadi tempat perlindungan karena persoalan-persoalan politik di negrinya dan juga termasuk bagi mereka yang ingin menetap tinggal dan bahkan termasuk orang-orang yang memberontak terhadap negerinya, karena berbagi masalah yang dihadapi terhadap penguasa.

Peristiwa pelarian Raja Bone Arung Palakka ke Buton bersama rombongan, seperti telah disinggung sebelumnya, disebabkan oleh serangan Kerajaan Gowa ke Bone. Arung Palakka meninggalkan pantai Pallette Sabtu 25 Desember 1660 menuju Buton, dan tiba di Buton pada tahun yang sama langsung diterima oleh Sultan Buton. Tidak lama kemudian pasukan Gowa yang mengejarnya tiba di Buton atas perintah Sultan Hasanuddin untuk menangkap Arung Palakka, tetapi dengan tangkas dan tegas Sultan Buton berkata Arung Palakka tidak ada di atas tanah Buton, ucapan Sultan ini dipercaya oleh pasukan Makassar dan mereka kembali tanpa membawa hasil. Ternyata Arung Palakka di sembunyikan di bawah tanah yaitu pada sebuah gua yang terletak disisi bagian Timur Benteng Keraton Buton Wolio, jadi Sultan La Awu berkata secara diplomatis demi keselamatan Arung Palakka. Bagi masyarakat Buton tempat persembunyian dan pintu yang dilalui Arung Palakka hingga sekarang

tetap dipelihara. Mulai dari pintu gerbang Benteng Keraton tempat Arung Palakka menuju persembunyian disebut “Lawana Kopeni” (pintu persembunyian rahasia) atau “Lawana Arupalaka” dan Gua yang menjadi tempat persembunyian juga disebut “Gua Arupalaka” dan nama Arung Palakka selama persembunyiannya di Buton diganti menjadi La Toondu untuk menghilangkan jejak. Selama berada di Buton rambut Arung Palakka tidak pernah dipotong, disamping karena wasiatnya sendiri juga agar tidak dikenal oleh tentara Gowa yang mencarinya. Kemudian diberi jabatan sebagai lakina Hilomambo, jabatan yang setingkat dengan Arung di kerajaan Bone yaitu kepala pemerintahan Kadie. Sedangkan pengikut beliau dan beberapa pembesar kerajaan Bone ditempatkan dipinggir kali Bau-Bau untuk membuat perkampungan yang hingga sekarang diabadikan menjadi kampung Bugis. Di samping itu perkampungan para pengikut La Tomparina yang berasal dari Wajo sampai sekarang dinamakan kampung Wajo di wilayah kecamatan Betoambari. (Lightvoet. 1877 : 44-46).

Hingga sekarang alasan-alasan dan pertimbangan Arung Palakka menjatuhkan pilihannya untuk meminta perlindungan pada Kesultanan Buton belum terungkap. Mengapa ia tidak meminta perlindungan kepada kerajaan Luwu, kerajaan Tellu Pocoe atau kerajaan lain yang ada di daratan Sulawesi ? Apakah karena Buton memiliki kekuatan pertahanan yang dapat melindunginya atau karena Buton mempunyai kemampuan untuk berdiplomasi atau karena Buton sebagai tempat persinggahan para pejabat Kompeni kemudian meminta perlindungan kepada mereka. Yang jelas bahwa para pelaut Gowa banyak yang singgah di Buton dan pada suatu ketika dapat mengetahui jejak persembunyian Arung Palakka. Pertanyaan-pertanyaan di atas belum terjawab secara tuntas. Perlu penelitian khusus tentang tokoh Arung Palakka selama persembunyiannya di Kesultanan Buton.

Ada dugaan bahwa Arung Palakka melarikan diri ke Buton karena ia masih memiliki darah bangsawan Buton yang tahu falsafah hidup orang Buton yang penuh dengan makna simbolis seperti falsafah hidup “Pabinci-binciki Kuli” yang maksudnya “ akan terasa sakit apabila saling mencubit diri masing-masing” ia juga mengetahui bahwa Buton

memiliki ideologi persatuan dan kesatuan yang kokoh yaitu “balimo anataa sumanamo karo, balimo karo sumanamo lipu. balimo lipu sumanamo syara (pemerintah), balimo syara sumanamo Agama”. Falsafah ini yang mendasari pemerintah kesultanan apabila ada orang meminta perlindungan seyogyanya dilindungi dan lagipula antara Bone dan Buton telah bersahabat jauh sebelumnya. Karena itu bagi Buton merupakan kewajiban untuk membantu apalagi Arung Palakka meninggalkan Bone untuk berjuang mempertahankan keutuhan kerajaan yang dipimpinnya dari serbuan Gowa.

Hubungan Bone dan Buton berlanjut dengan tibanya beberapa pembesar kerajaan Bone di Buton. Untuk kedua kalinya, pada tahun 1727 bangsawan Bone meminta perlindungan pada sultan Buton, Sakiyuddin Duurul Alam (Langkariri). Menurut Andi Zainal Abidin (1973) ketiga orang pembesar Bone itu dipidana “ripaoppangi tanah” artinya di usir keluar tanah Bone dan mereka memilih Buton sebagai tempat pembuangan, karena mereka dipersalahkan membunuh Arung Tiboyong, seorang anggota Dewan Pemangku Adat Bone (Zainal Abidin, 1973 : 21). Mereka yang dibuang itu adalah : La Toma Sangge Datu Baringeng punggawa Bone yang kemudian menjadi raja Bone XV setelah kembali di Bone, Arung Apalang dan Aru Bakke. Semula mereka melarikan diri ke Soppeng dengan mendapat perlindungan dari saudaranya Raja Soppeng La Padang Sejati Arung dari Palakka tetapi kemudian tidak mampu melindungi mereka, karena secara terus menerus di cari oleh pasukan Bone atas perintah Arung Kaju suami dari Ratu Battari.

Ketiga pelarian Bone ini diperlakukan dengan baik oleh Sultan Langkariri. Sesudah mengetahui ketiga pelarian politik itu berada di Buton maka Arung Ujung diperintahkan ke Buton oleh datu Battari untuk menangkap ketiga pelarian tersebut dan seterusnya dikembalikan ke Bone. Pasukan Arung Ujung berkekuatan 300 orang dengan 12 buah perahu. Tetapi tiba di Buton Sultan Langkariri menyangkal tiga orang pembesar Bone tersebut berada di Buton, beliau sendiri tidak mengetahui persoalan itu. Pernyataan Sultan ini hanya untuk menyelamatkan mereka dari ancaman penangkapan Arung Ujung bersama pengawalnya. Tindakan Sultan Langkariri menyembunyikan ketiga orang pembesar Bone ini berarti pula tetap

menghormati isi perjanjian bersama Sultan La Awu tahun 1660 bahwa bilamana ada pelarian dari Bone mencari perlindungan di Buton, maka tidak wajib bagi Buton untuk mengembalikan pelarian tersebut kepada Bone. Sedangkan pelarian dari Buton mencari perlindungan ke Bone, maka wajib bagi Bone untuk mengembalikannya ke Buton (Zahari, 1977 : 61).

Dengan peristiwa tersebut di atas pada dasarnya pihak Buton mempunyai kewajiban moral untuk tetap melindungi mereka sekalipun pelarian tersebut adalah persoalan-persoalan politik terhadap kerajaan Bone.

Ketidak berhasilan Arung Kaju menangkap ketiga pelarian tersebut, menyebabkan terjadinya kekecewaan di kerajaan Bone dan terjadi pertentangan di antara para pembesar kerajaan. Akan tetapi hubungan persahabatan dengan Buton tetap berjalan baik dan bahkan hubungan semakin terjalin melalui ikatan kekeluargaan yang harmonis. Seperti pada masa muda Sultan La Dini yang pernah tinggal dan belajar di kerajaan Bone dan di Bone di kenal dengan nama "Daeng Malaba" oleh karena La Dini diangkat menjadi "kapitaraja" di Kesultanan Buton beliau kembali ke Buton dan tidak lama kemudian menduduki jabatan Sapati dan akhirnya terpilih sebagai Sultan Buton yang memerintah tahun 1697-1704. Seperti telah dijelaskan bahwa pada tahun 1712 kerajaan Bone juga pernah menerima mantan Sultan La Ibi yang terlibat dalam peristiwa membantu Sultan La Tumparasi dalam perebutan kekuasaan bersama Langkariri, beliau meninggalkan Buton dan meminta perlindungan di kerajaan Bone.

Pada masa pemerintahan Sultan Syaifuddin (La Dini) tahun 1697 - 1704 Kapitaraja La Rabaenga yang pada saat itu bersama-sama sebagai calon sultan tidak berhasil terpilih, secara diam-diam meninggalkan Buton pergi ke Bone. Ternyata La Rabaenga memendam dendam terhadap keberhasilan La Dini yang berhasil terpilih menjadi Sultan Buton. Pada suatu waktu La Rabaenga kembali ke Buton dengan rencana merebut kekuasaan dari Sultan La Dini, dengan dikawal oleh Dewan Adat kerajaan Bone. Setibanya di Buton ternyata sultan Buton sedang mengadakan perjalanan keliling wilayah kesultanan. Sesuai rencananya La Rabaenga mengadakan semacam kudeta dengan memaksa Ketua Dewan Siolimbona untuk melantik dirinya sebagai sultan Buton. Setelah Sultan

La Dini mengetahui bahwa La Rabaenga merebut kekuasaan yang ada ditangannya, ia cepat-cepat kembali ke istana kesultanan di Benteng Keraton Wolio dan mengumumkan perang terhadap La Rabaenga. Tetapi ternyata La Rabaenga tidak mampu menghadapi Sultan La Dini yang didukung rakyat Buton saat itu. Akhirnya bersama anggota Dewan Adat Bone yang mengantarnya, La Rabaenga lari kembali berlindung di Bone. Selama 7 hari ia sempat memegang kekuasaan sebagai Sultan Buton. Sehingga dendamnya belum berakhir sampai disitu. Pada kesempatan lain dengan berpura-pura ingin kembali meminta maaf kepada Dewan Syara Buton dan memperbaiki hubungannya dengan Sultan La Dini, LA Rabaenga kembali lagi ke Buton untuk menyampaikan penyesalannya yang juga diantar oleh anggota Dewan Adat Bone. Ternyata La Rabaenga punya rencana tertentu di balik kepura-puraan itu, ia telah mempersiapkan racun bunta Toraja yang diletakkan pada taji yang ada ditangannya dan pada saat berjabat tangan dengan Sultan La Dini akan mendapat kesempatan yang baik untuk melukai tangan Sultan. Namun sayang sekali rencana tersebut pada saat akan berjabat tangan dengan sultan ternyata taji itu mengenai tangannya sendiri sehingga rencana itu merupakan pintu menuju kematiannya yang disebabkan oleh luka racun tersebut.

La Rabaengan telah meninggal, namun yang perlu dipertanyakan, mengapa rencana kudeta yang dilakukannya selalu diantar oleh Dewan Adat Bone. Adakah rencana dan kesepakatan bersama diantara La Rabaenga dan Bone bila mana itu berhasil, atau hanya karena kesetiaan Bone terhadap hasil perjanjian diantara kedua kerajaan bahwa setiap pelarian dari Buton, Bone berkewajiban untuk mengembalikannya ke Buton. Akan tetapi La Rabaenga bukan karena pelarian yang ditekan kebebasannya oleh pemerintah kesultanan Buton, tetapi atas kemauannya sendiri dan setiap kembali ke Buton ia selalu berusaha merebut kekuasaan yang syah. Apakah hal ini merupakan tindakan loyal pihak Bone atas jasa Buton yang telah lalu dalam maksud menyelamatkan pembesar dan raja Bone atau ada rencana lain dan dukungan dari Bone terhadap La Rabaenga setelah kegagalan untuk menduduki kursi kesultanan. Tidak dapat diketahui dengan pasti maksud dibalik rencana itu. Keterlibatan Bone dalam peristiwa La

Rabaenga ini oleh masyarakat Buton dikenal dengan istilah “Ibuana Bone” (selalu diantar oleh Dewan Syara Bone).

Hubungan Bone dan Buton pada tahun 1782 sedikit tegang dengan adanya keributan di Barata Muna (Wuna) yaitu para imigran asal Bone yang menetap maupun yang berdagang di Muna. Mereka sering membuat keributan atau kerusuhan, di Muna yang merupakan salah satu wilayah Barata kesultanan Buton sehingga dengan sendirinya permasalahan ini juga merupakan masalah Buton. Apapun yang terjadi di wilayah Barata, kesultanan Buton ikut bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan itu. Atas peristiwa itu Sultan Buton mengajukan keberatan kepada Kompeni melalui Gubernur Rijks. Maksud Sultan Buton agar dapat mengajak Raja Bone secara bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang Bone di Muna. Karena kedua kerajaan pernah membina hubungan baik. Akan tetapi niat baik Sultan Buton ternyata kurang mendapat sambutan dan perhatian dari Raja Bone.

Pada dasarnya hubungan Buton dan Bone telah berlangsung lama, bukan saja karena hubungan kekerabatan tetapi juga dalam bidang pemerintahan. Bone telah menyerahkan urusan pemerintahan di wilayah Paleang dan Moronene dan sekitarnya kepada kesultanan Buton. Di dua wilayah itu pihak Buton menempatkan kepala pemerintahan yang disebut “Bonto” maka kedua wilayah itu dikepalai oleh “Bontona Wandailolo dan Bontona Somba Morusu”. Daerah ini pada masa lalu merupakan tempat pertemuan dan tempat berwisata kedua pemimpin kerajaan, karena tempat ini banyak ditemukan Rusa. Dalam bahasa Bugis dikenal dengan “Pajjongang” artinya tempat mencari Jonga (Rusa). Ditempat yang dinamakan Lueno ini, kedua kepala pemerintahan menikmati keindahan alam dan berburu rusa yang sangat banyak jumlahnya dan tidak terlalu liar, bahkan dapat ditangkap tanpa senjata.

Kini daerah ini tetap dijaga dan dilindungi karena tidak hanya menyimpan sejarah masa kesultanan, tetapi juga sejarah pada masa pendudukan Jepang. sampai sekarang masih tersimpan beberapa peninggalan pertahanan Jepang seperti bangkai Tank dan pesawat, landasan pesawat yang telah dihancurkan Sekutu bongqer

persembunyian dibawah tanah, alat-alat berat lainnya dan eks lokasi pertahanan . Areal ini berada di bawah pengawasan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia

3.2 Menghadapi Konflik dari Dalam Kerajaan.

Kesultanan Buton yang berdiri sejak akhir abad ke 13 sampai berakhirnya dengan pemerintahan Swapraja pada tahun 1960. Dalam sejarah pemerintahan yang lama ini, telah banyak mengalami pasang surut dalam perkembangannya untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang tetap bertahan, hingga dihapuskan oleh pemerintah RI pada tahun 1960. Kesultanan Buton, itu pada mulanya berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan “Monarki” Pemerintahan ini berakhir setelah masuknya agama Islam dan pemerintah menetapkan Islam sebagai agama kerajaan pada tahun 1511 yang sekaligus merubah sistem pemerintahan menjadi Kesultanan. Kepala negaranya berubah dari sebutan Raja menjadi sebutan Sultan. Pada masa kerajaan telah memerintah sebanyak 6 orang raja. Pengangkatannya berdasarkan genealogis yang secara turun temurun dari keturunan dinasti “Wa Kha-Kha” selama 2 abad. Sedangkan masa kesultanan telah memerintah 37 orang Sultan yang dipilih oleh Dewan Syarat kerajaan. Pada masa kesultanan ini pemerintahannya berbentuk Monarki Konstitusional.

Selama masa pemerintahan kerajaan tidak terjadi konflik yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan atau adanya kudeta dan pemberontakan yang bersumber dari dalam kerajaan seperti dendam atau ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang syah. Bahkan pada periode ini, yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Rajamulae, merupakan masa yang penuh ketenangan dan kemakmuran di Kerajaan Buton. Sehingga Rajamulae oleh masyarakat memberinya gelar “Sangia Igola” artinya “Keramat yang neanis” maksudnya masa pemerintahannya penuh dengan kemanisan. Tentu saja ketenangan dan kemakmuran yang dialami menyebabkan Kerajaan Buton dikenal di Nusantara sebagai salah satu kerajaan yang berkembang secara dinamis. Para Saudagar dan penyebar agam Islam selalu menyinggahi daerah Buton. Namun pada masa ini pemerintahan berdasarkan Islam.

belum terlaksana dengan baik, sehingga masa ini disebut masa transisi yaitu sejak Sultan Buton I (Sultan Murham) tahun 1511 sampai Sultan Buton IV (Sultan La Elangi) tahun 1631. Pada kurun waktu ini juga tidak terjadi konflik yang berarti dalam Kerajaan Buton, karena pada saat itu sedang giat-giatnya masyarakat Buton berperang melawan para perompak dan bajak laut yang selalu mengganggu ketenangan Kesultanan Buton.

Peletakan dasar-dasar pemerintahan menurut Islam baru di mulai masa pemerintahan Sultan Buton IV Dayanu Ikhsanuddin dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton pada tahun 1610, yang dikenal dengan "Murtabat Tujuh".

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Martabat Tujuh. Maka untuk jabatan sultan di peruntukan pada golongan bangsawan. Dalam stratifikasi sosial mayarakat Buton, golongan bangsawan (Kaomu) yang berhak menduduki jabatan Sultan berasal dari Kamborumbu Talupalena artinya "Tiga tiang pancang" sebagai awal sejarah yang melahirkan tiga golongan bangsawan (kaomu) yaitu : Kaomu Tanailandu, Kaomu Tapi-tapi dan kaomu Kumbewaha. Dari ketiga golongan bangsawan inilah para sultan berasal untuk dicalonkan menjadi sultan terpilih. (Zahari, 1977).

Pada awalnya pembagian golongan bangsawan (Kaomu) kedalam tiga garis keturunan yang nantinya berhak menduduki jabatan sultan itu bermula dari kemelut dalam istana bahwa Sultan La Elangi bermaksud untuk menjadikan jabatan sultan monopoli dari Tanailandu. Keinginan itu tertuang dalam isi perjanjian yang dibuatnya bersama Pieter Both tanggal 23 Agustus 1613 yang meminta dukungan Kompeni (VOC) bahwa sepeninggalnya nanti dapat digantikan oleh kedua puteranya Syamsuddin dan Qomaruddin sebagai sultan atas dukungan Ternate dan VOC. Sebagai akibat dari penolakan terhadap Qomaruddin menimbulkan kekacauan dalam istana karena orang-orang Gowa-Makassar mempengaruhi pembesar-pembesar kesultanan lainnya. Akhirnya Qomaruddin diturunkan dari jabatan sultan digantikan La Buke dari garis keturunan Kumbewaha dalam golongan kaomu. Sejak saat itu yang berhak menduduki jabatan sultan tidak lagi dimonopoli oleh satu garis keturunan saja. Keterlibatan Gowa-

Makassar terhadap Buton, karena kedua kekuatan yang mengapit Buton, Gowa-Makassar dan Ternate. Sedang berkompetisi untuk menanamkan pengaruhnya di Buton dan campur tangan keduanya dalam urusan politik, terutama dalam hal pengangkatan sultan. Pengalaman ini menyebabkan terbentuknya suatu sistem lama yang menggunakan sistem warisan ditinggalkan dan berubah menjadi sistem pengangkatan sultan berdasarkan Undang-undang Martabat Tujuh secara bergantian atau setiap calon harus diambil dari ketiga garis keturunan golongan bangsawan yang sudah disebutkan. Masing-masing mengajukan calon kemudian dari ketiga calon difali atau dipilih yang terbaik oleh Siolimbona.

Dalam sejarah Kesultanan Buton diperoleh catatan bahwa dari ketiga golongan itu terjadi persaingan untuk menempatkan kaumnya pada jabatan sultan. Berdasarkan data di Kesultanan Buton telah terjadi 38 kali Sultan naik tahta dengan 37 orang Sultan yang berkuasa. Apabila dirinci berdasarkan ketiga golongan bangsawan tersebut, maka 15 orang Sultan yang memerintah berasal dari kaum Tanailandu, 6 orang dari kaum Tapi-tapi dan 13 orang dari kaum Kumbewaha. Keseluruhan 34 orang sultan, tiga sultan sebelumnya belum terjadi pemisahan golongan bangsawan (Kaomu) ke dalam 3 kelompok dan 1 orang dua kali menjabat sultan, jadi semuanya ada 37 orang sultan berkuasa selama 422 tahun lamanya (Silsilah raja-raja dalam Zahari, 1977 : 157).

Pada bagian ini akan disajikan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan konflik yang timbul dari dalam kesultanan, baik sultan yang berkuasa, maupun peristiwa-peristiwa lain yang mempunyai motif ketidaksetujuan terhadap pemerintahan yang dijalankan sultan bersama para pembesar kesultanan dan atau faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan kesultanan. Karena kajian ini difokuskan setelah perjanjian Bungaya pertama "Cappaya ri Bungaya 18 Nopember 1667" sampai pada perjanjian Bungaya yang diperbaharui tahun 1824, maka akan menyoroti peristiwa-peristiwa penyebab konflik dalam kurun waktu tersebut dan menjadi amat penting untuk dikaji lebih lanjut.

Konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Lacila (Mardan Ali) dengan pembesar Kesultanan yang menyebabkan Sultan

La Cila dipecat dan dihukum gantung oleh Dewan Syarat Kesultanan, karena tindakan-tindakannya yang sepihak tanpa konsultasi dengan Dewan Syarat Kesultanan dalam penandatanganan perjanjian dengan pihak Kompeni (VOC). Menurut penilaian pembesar dan Dewan Syarat Kesultanan telah merugikan pihak Buton, dimana perjanjian tersebut bertentangan dengan bunyi pasal perjanjian antara La Elangi dan Schot yang mewakili Kompeni (VOC). Selain pelanggaran tersebut Sultan La Cila melanggar adat dan agama yang menimbulkan ketidak tenangan dalam kesultanan sehingga para pembesar bersama Dewan Siolimbona bermufakat untuk menjatuhkan Sultan La Cila dari jabatan sultan.

Dalam melaksanakan kesepakatan Dewan Siolimbona tersebut, maka dibuatlah suatu skenario untuk menjatuhkan Sultan. Setiap malam istana Sultan La Cila dilempari dengan batu oleh orang-orang yang tidak dikenal. Menurut laporan penjaga istana bahwa orang-orang yang melempari istana itu selalu berlindung dirumah kediaman Kapitaraja (Panglima Kerajaan). Akibat peristiwa ini menyebabkan terjadinya konflik antara Sultan dan Kapitaraja. Berdasarkan laporan-laporan dari para penjaga istana dan diperkuat dengan para pembesar kesultanan, Kapitaraja dijatuhi hukuman gantung. Kapitaraja dengan pasrah menerima hukuman ini dan eksekusi pelaksana hukuman di Mbela-mbela. Untuk mengenang peristiwa ini masyarakat menyebutkan "Igogoli Mbela-mbela" (Zahari, 1977 : 21).

Berhasilnya skenario yang dibuat oleh Dewan Syarat Kesultanan menyebabkan terbukanya jalan untuk menjatuhkan Sultan La Cila. Kemudian Dewan Syarat Kesultanan meneliti penyebab peristiwa yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menjatuhkannya. Selain itu Sultan mempunyai kelemahan pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. Skenario ini ternyata berhasil sehingga Dewan Syarat Kesultanan (Siolim Bona) memecat dan menjatuhkan hukuman pidana mati kepada sultan La Cila dan dilaksanakan di pulau Makassar dekat kota Bau-bau. Peristiwa ini dikenal masyarakat Buton dengan Sultan I Gogoli" (Sultan di hukum gantung).

Sesudah masa pemerintahan sultan La Cila selalu terjadi perebutan kekuasaan hingga terjadi perang saudara antara kaum pendukung dari para calon sultan yang dikenal dengan perang perebutan tahta.

Sultan La Cita diganti oleh Sultan La Awu yang memerintah antara tahun 1654-1664. Sepeninggal Sultan La Awu terjadi kekosongan kekuasaan bahkan krisis kepemimpinan, sehingga Kesultanan Buton untuk sementara berada di bawah pengawasan Kesultanan Ternate. Dalam hubungan pengawasan tersebut, Sultan Ternate Madar Syah beberapa kali mengunjungi Buton. Momentum itu digunakan oleh salah seorang bangsawan Ternate untuk mendapatkan dukungan Sultan Madar Syah agar bisa menjadi Sultan Buton. Usaha dari bangsawan Ternate ternyata mendapat dukungan dari sebagian bangsawan Buton yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra di kalangan pembesar Kesultanan sehingga segera menyulut konflik di dalam Kesultanan.

Di pihak lain dalam mengatasi krisis kepemimpinan tersebut Dewan Syarat Buton memaksa La Simbata bersedia sebagai calon tunggal sultan, sedangkan putra bangsawan Ternate dipolitisir oleh Dewan Syarat Buton menjanjikan kedudukan raja padanya di Barat Muna. Akan tetapi dalam perjalanan menuju Muna ia terbunuh oleh kawan bajak laut. Peristiwa kematian bangsawan Ternate itu ada kaitannya dengan kemelut yang terjadi dalam Kesultanan Buton yang baru saja selesai, karena kemauan keras dari putra bangsawan tersebut yang berusaha untuk menjadi Sultan Buton. (Zahari, 1977 : 47).

Adanya anggapan dari putra bangsawan Ternate dapat menjadi Sultan Buton didasarkan atas hasil perjanjian Kompeni (VOC) dengan Buton, bahwa pengawasan atas wilayah Kesultanan Buton di berikan kepada Ternate. Juga ditetapkan setiap pemberhentian dan pengangkatan Sultan, Sapati, Kanepulu dan jabatan-jabatan kesultanan yang penting, maka terlebih dahulu menyampaikannya kepada Ternate. Namun hal ini mengundang kerawanan dalam negeri Buton dan termasuk hubungan baiknya dengan Kerajaan Ternate, sehingga pihak Buton tidak mematuhi ketentuan ini. Selain itu karena sering ikut campurnya Kerajaan Ternate pada penentuan jabatan Sultan maka setiap sultan yang dipecat, diberhentikan dan meninggal dunia, kemudian diadakan pengangkatan sultan baru Dewan Syarat menganggap tidak perlu berkonsultasi dan menyampaikan kepada Kerajaan Ternate terlebih dahulu. Kecuali pada upacara pelantikan sultan

biasanya Sultan Ternate diberi informasi dan diundang untuk ikut hadir pada acara tersebut. Kesalahan interpretasi terhadap perjanjian Kompeni-Buton-Ternate menyebabkan adanya keinginan yang kuat dari pihak Ternate untuk menjadi Sultan Buton. Hal itu seperti pada masa setelah Sultan La Cila dipecat Dewan Syarat Buton. Saudara Sultan Ternate Kaicili Kalamatia berusaha untuk menggantikannya. Kemudian setelah Sultan La Awu meninggal dunia, putra bangsawan Ternate yang lain berusaha untuk menjadi sultan.

Masa pemerintahan Sultan La Tangkaraja (1669-1680) dalam negeri kesultanan Buton terjadi pertentangan, bahkan menjadi benih perpecahan yang telah muncul sejak masa Sultan La Simbata, situasi yang tidak tenang itu menyebabkan Sultan La Tangkaraja secara diam-diam bersama kaumnya (Tanailandu) dan para pengikutnya membangun benteng pertahanan di wilayah Kadie La Wela 12 km dari Keraton Wolio ibukota kesultanan. Rencana pembangunan benteng ini tidak diketahui oleh Dewan Syarat Buton, sehingga keputusan sultan ditentang oleh banyak pembesar, bahkan timbul kecurigaan dari para pembesar kesultanan Buton, karena aktivitas Sultan La Tangkaraja ini dianggap ilegal. Oleh karena inilah Sultan dilepas dari jabatannya oleh Dewan Syarat Kesultanan Buton. (Zahari, 1977 :65).

Konflik dalam negeri Kesultanan Buton tidak berakhir disitu tetapi justru terlihat semakin meningkat. Pada masa pemerintahan Sultan La Umati terjadi rencana kudeta oleh seorang kanepulu tetapi dapat digagalkan. Pelakunnya dipidana hukuman mati, akan tetapi dirahasiakan agar terpidana tidak pernah mengetahui keputusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya sampai ia menjalani hukuman tersebut. Dewan Syarat Buton, telah memutuskan bahwa terpidana Kanepulu harus dibunuh di depan umum. Maka pada suatu ketika Kanepulu sebagai salah seorang pejabat kesultanan di undang oleh Dewan Syarat Buton untuk menghadap di Baruga. Setelah Kanepulu mendekati di Baruga tempat pertemuan kesultanan, tiba-tiba diserang oleh dua orang Kapatiraja (panglima kesultanan) dengan senjata tombak. Tanpa memberikan perlawanan Kanepulu terluka dan akhirnya menghembuskan napas didepan Baruga disaksikan oleh Dewan Syarat Kesultanan yang hadir saat itu. Masyarakat

Buton mengenal peristiwa ini dengan “Kanepulu I Pandanga” (Zahari, 1977 : 72-73).

Pelaksanaan hukuman seperti ini bagi seseorang yang melakukan perebutan kekuasaan, merupakan suatu pelajaran bagi mereka yang ingin melakukan tindakan yang sama. Agar peristiwa seperti itu tidak terulang, maka setiap pelakunya dihukum mati. Akan tetapi petualangan semacam itu tidak berakhir dengan peristiwa matinya Kanepulu I Pandanga, bahkan konflik semakin meningkat terutama pada masa pemerintahan Sultan La Dini yang dikudeta oleh kapitaraja La Rabaenga. Sebenarnya kedua tokoh ini pelaksana keputusan hukum yang dijatuhkan kepada Kanepulu oleh Dewan Syarat sewaktu mengeksekusi Kanepulu yang ditombak yang pada saat itu keduanya menjabat sebagai Kapitaraja. Antara keduanya telah terjadi perselisihan sekitar siapa sebenarnya yang berhasil membunuh Kanepulu. Kapitaraja La Dini berhasil menjadi Sultan Buton (1697-1704) karena mempunyai jasa dalam peristiwa Kanepulu I Pandanga dan berhasil menggagalkan kudeta yang dilakukannya. Sementara La Rabaenga secara diam-diam melarikan diri di Kerajaan Bone.

Masih pada periode pemerintahan Sultan La Umati, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Lakina Kumbewaha. Lakina ini mengorganisir kekuatan masa (pengikutnya) menyerang Keraton Wolio pusat ibukota Kesultanan Buton dengan sasaran ingin menyerang para pembesar kesultanan, khususnya Sultan La Umati. Pemberontakan yang dilakukan Lakina Kumbewaha itu tidak diketahui motif yang mendasari penyerangannya terhadap pemerintahan Sultan La Umati. tetapi kuat dugaan sangat berkaitan dengan ketegasan dan keras Sultan La Umati yang memimpin dengan tegas dan kekerasan sehingga pada masa pemerintahannya sering terjadi konflik antara golongan bangsawan dan setiap konflik yang merongrong kekuasaannya selalu ditindaknya dengan tegas. Apakah sikap yang diperankannya ini sebagai keraguan atau karena dendam terhadap orang tuannya yang mati terbunuh dihukum gantung oleh Sultan La Cila tanpa kesalahan yang pasti, tidak diketahui dengan jelas.

Perlawanan Lakina Kumbewaha dapat dipadamkan oleh pasukan kesultanan, sekalipun diawali dengan perang kecil-kecilan di wilayah Kadie Waruruma di luar Keraton Wolio. Dalam perang ini Lakina Kumbewaha selaku pemimpin perlawanan tertangkap oleh pasukan kesultanan, dan akhirnya dihukum mati pada saat itu pula dengan hukuman gantung, sehingga dikenal dalam sejarah Buton "Gogoli I Wararuma" (Zahari, 1977 : 73-74).

Kekacauan berlanjut terus, hingga mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan La Tumparasi (1711-1712). Sejak pemerintahan Sultan La Sadaha atau La Ili (1702-1707), terjadi saling berebut kedudukan, sehingga keadaan menjadi tidak tenteram. Dalam masyarakat dan golongan bangsawan terjadi kelompok-kelompok yang memihak pada kaumnya masing-masing menyebabkan pemerintahan Sultan La Sadaha tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya ia dipecat dari jabatan pada 1709.

Pengganti Sultan La Sadaha, terpilih Sultan La Ibi (Nasrarudin). Terpilihnya La Ibi sebagai Sultan hanya merupakan suatu strategi untuk menenangkan situasi kekacauan dan pertentangan antar kaum bangsawan. La Ibi sebenarnya tidak bersedia menjadi Sultan, tetapi didesak oleh kaumnya agar menerima jabatan itu dan sesudahnya dapat diserahkan kepada iparnya La Tumparasi. Sultan Nasraruddin memerintah hanya kurang lebih dua tahun (1709-1711). Jadi naiknya Sultan Nasraruddin hanya sebagai upaya pemerintah dari golongan bangsawan yang terpilah-pilah ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Setelah situasi pulih kembali, maka niat yang lebih berbakat dan potensial dapat terlaksana, setelah saingannya Langkariri ditugaskan oleh Dewan Syarat Buton keluar daerah (Zahari; 1977 : 84).

Realisasi dari upaya Sultan Nasraruddin, terlaksana dengan dilantiknya Sultan La Tumparasi (Mulahiruddin Abdul Rasyid) pada bulan Nopember 1711. (de Jong, 1916, Ligtoet, 1878, : 70). Peristiwa pelantikan Mulahiruddin Abdul Rasyid menyebabkan terjadinya perang saudara di Buton antara La Tumparasi dan kaumnya dengan Langkariri bersama kaumnya pula. Menurut Langkariri setelah kembali dari tugasnya pengangkatan La Tumparasi sebagai sultan

tidak berdasarkan prosedur pemilihan menurut adat dan undang-undang kesultanan yang telah disepakati dan menjadi acuan dalam pemilihan Sultan. Lagi pula tugas yang diberikan kepadanya merupakan suatu rekayasa politik, oleh pihak Sultan Nasraruddin bersama kubu La Tumparasi.

Peristiwa pengangkatan Sultan Mulahiruddin Abdul Rasyid tidak di terima baik oleh Langkariri, maka segera bersama kaumnya dan para pendukungnya langsung terlibat dalam perang saudara antara Sultan di pihak yang satu dengan Langkariri di pihak lain. Konflik berlangsung selama tiga bulan lamanya, sehingga ini sangat melemahkan posisi Buton, terutama sekali rakyat yang berdiam disekitar ibukota kesultanan sangat merasakan penderitaan. Mereka tidak dapat menjalankan aktivitasnya, bahkan menurut sumber dari A. Mulku Zahari “begitu hebatnya perang saudara yang terjadi dalam keraton Wolio sehingga orang tidak sempat lagi untuk melakukan sembahyang Jum’at berjamaah. (Zahari, 1977 : 87).

Perang Saudara ini berakhir dengan kemenangan di pihak Langkariri, sedangkan Sultan La Tumparasi (Mulahiruddin Abdul Rasyid) bersama pengikutnya termasuk Sultan Nasraruddin melarikan diri dan minta perlindungan Raja Gowa di Makassar (Ujung Pandang) dan seterusnya dibawa tinggal di Bonthaen. (Ligtvoet, 1878 : 79). Dengan kekalahan La Tumparasi, maka Sultan Langkariri (Sakiyuddin Duurul Aalam) dilantik menjadi Sultan Buton oleh Dewan Syarat Buton tahun 1712. Karena kekacauan tersebut, maka terjadi kekosongan selama satu tahun sebelum Langkariri dilantik.

Masa pemerintahan Sultan Langkariri (1712-1750). Selama masa pemerintahannya tidak terjadi kekacauan, dan bahkan beliau sendiri dapat membuat aturan-aturan pemerintah dan adat yang baru untuk mengatur kepentingan rakyat dalam kesultanan yang semakin meningkat jumlahnya, diantaranya aturan perkawinan dan perlengkapannya. Selama masa pemerintahannya tercipta suatu keadaan yang stabil penuh dengan ketentraman dan keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan yang berlangsung hingga tahun 1750. Sesudah Sultan Langkariri berpulang kerahmattullah tahun 1750, digantikan oleh Sultan La Karambau (Himayatuddin) yang

memerintah 1751-1752. Pada masa beliau ini terjadi konflik dengan Kompeni, sekalipun telah dikemukakan di atas bahwa sampai tahun 1760 tidak terjadi keributan yang bersumber dari dalam kesultanan, yang ada hanya dengan persoalan Kompeni Belanda, menurut Sultan Himayatuddin harus diperangi. Sebab pihak Kompeni Belanda telah banyak merugikan pihak Buton, oleh karena itu beliau dengan gigih menyatakan perang melawan Kompeni Belanda. Keinginan sultan melawan kompeni terwujud dengan terjadinya beberapa insiden yang mengakibatkan banyak rakyat Buton yang menderita dan pihak Buton mengalami kerugian, maka Sultan Himayatuddin diturunkan dari jabatannya, sebagai salah satu siasat Dewan Syarat Buton untuk memulihkan hubungan dengan Kompeni Belanda.

Ketegangan dalam negeri kesultanan Buton berlangsung kurang lebih 10 tahun lamanya. Kemudian muncul lagi pertentangan kedalam antara golongan bangsawan Wolio (Keraton) dengan bangsawan Barata (diluar Keraton) tentang jabatan Sultan yang akan menggantikan Sultan La Seha (Rafiuddin). Calon utama Sultan adalah "Kolaki" yang secara genealogis berasal dari golongan bangsawan Barata yang sebenarnya pengklasifikasian berdasarkan hukum adat antara bangsawan keraton dengan bangsawan Barata tidak perlu ada sebab pada awalnya sama. Yang membedakan hanya tempat menetap dalam wilayah Barat dan peristiwa ini sebenarnya hanyalah pristese karena keengganan dari sekelompok golongan bangsawan keraton yang tidak mau melakukan "somba" di hadapan Sultan yang berasal dari Barata. (Zahari, 1977 : 133-134).

Ketidak berhasilan Kolaki menjadi Sultan Buton, maka Dewan Syarat Buton mengangkat La Jampi dengan gelar Sultan Kaimuddin yang masih kemenakan sepupu dengan Kolaki dan mereka ini sejak masa remaja telah mempunyai persoalan pribadi oleh karena itu, akhirnya Kolaki tinggal di luar keraton Wolio yaitu di kampung Laboora dalam wilayah Barata Muna.

Perselisihan kedua tokoh ini semakin memuncak dengan melibatkan pengikut dan kedudukan masing-masing, dimana pada saat itu Kolaki menjabat sebagai Kapitaraja. Sebenarnya ia sangat tepat untuk menduduki jabatan mengingat jasa dan pengabdianya selama

memegang jabatan Kapitaraja banyak persoalan-persoalan kesultanan yang dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil. Entah itu persoalan-persoalan yang terjadi di dalam Kesultanan Buton maupun di wilayah Barata Muna.

Berhasilnya La Jampi (Kaimuddin) menjadi Sultan, membawa suasana kekhawatiran dalam kesultanan yang masih ada pertikaian-pertikaian antar golongan yang belum pulih. Sementara dengan kompeni Belanda terjadi ketegangan pula sehingga pertentangan tumbuh subur, apalagi kedua pejabat Kapitalau yang merencanakan perebutan kekuasaan pada masa Sultan Rafiuddin, masih tetap aktif memperhatikan situasi (Zahari, 1977 : 140).

Dalam keadaan yang tidak tenang ini, Kolaki secara diam-diam menyingkir ke kerajaan Muna salah satu wilayah Barata. Karena kekacauan dan dendamnya yang sangat dalam, alat-alat kebesaran dan perlengkapan jabatan kapitalau yang ada ditanganya tidak kembalikan kepada Dewan Siolimbona, tetapi dibawanya ke Muna. Setelah sampai di Muna ia mempengaruhi Syarat Muna dan berhasil menjadi Raja Muna. Tidak lama kemudian ia mengumumkan perang terhadap Buton karena menginginkan kebebasan Kerajaan Muna dari pengaruh Kesultanan Buton.

Dengan adanya pernyataan perang dari Raja Muna, pihak Buton menyambutnya dengan mempersiapkan pasukan yang dipimpin Kapitalau Ali, anak Sultan La Jampi. Sementara mempersiapkan pengiriman pasukan ke Kerajaan Muna, dari dalam negeri Buton terjadi pula kerusuhan yang dipimpin oleh Lakina Lawewe kemudian dikenal dengan Kapitalau (Kapten Laut) Lawewe dan lakina Wolowa juga dikenal dengan Kapitalau Wolowa.

Kedua kepala pemerintahan daerah (Kadie) ini merencanakan pengambil alihan kekuasaan kepada Sultan Buton dengan cara paksa. Apa yang menyebabkan kedua kepala wilayah ini mengadakan pemberontakan, adalah suatu fanatisme golongan yang berawal dari peristiwa pemecatan La Karambau dari jabatan Sultan oleh Dewan Syarat Buton, dengan alasan karena Sultan Karambau menentang dan tidak mau kerja sama dengan kompeni Belanda.

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dapat di atasi dan Sultan sendiri tampil dengan memberikan pengertian kepada para perusuh dan penentang untuk kembali menyadari dirinya, bila ingin melihat Kesultanan Buton dapat berdiri tegak. Tidak perlu saling curiga mencurigai yang pada akhirnya dapat memudahkan orang luar untuk memecah belah persatuan dan kesatuan di kalangan kita semua. Dengan berhasilnya dipadamkan pemberontakan Lakina Lawewe dan Wolowa maka tugas berikut menghadapi perlawanan “Kolaki” (Raja Muna), segera diberangkatkan pasukan Buton menuju Kerajaan Muna. Setelah dekat kota Wuna ibukota kerajaan, terjadilah kontak senjata antara pasukan Buton dengan pengikut Kolaki, akhirnya Kaloki sendiri terbunuh dalam pertempuran, sehingga Kerajaan Muna tetap berada dalam pengawasan Buton sebagai wilayah Barata dan untuk sementara Kapitalau Ali ditetapkan sebagai Raja Muna oleh Sultan Buton (Zahari; 1977 : 141).

Peristiwa-peristiwa atau konflik yang terjadi dalam Kesultanan Buton, banyak disebabkan oleh persaingan antar golongan, khususnya kaum bangsawan yang terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu Tanailandu, Tapi-Tapi dan Kumbewaha. Mereka yang selalu bersaing dan berusaha untuk tetap menempatkan kaumnya masing-masing pada jabatan-jabatan penting dalam kesultanan, sehingga menyulut konflik-konflik pribadi yang sangat mendalam dan akhirnya terpolarisasi menjadi pertentangan yang diikuti oleh rakyat dengan keberpihakan pada golongan-golongan tertentu dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang berakhir dengan terjadinya pertumpahan darah. Keadaan seperti ini sering kali terjadi dalam Kesultanan Buton selama periode tahun 1667 sampai tahun 1824. Selama kurun waktu itu telah terjadi berbagai konflik, tetapi para pemimpin Kesultanan Buton dengan segala upaya telah menyelesaikan semua pertentangan dan pemberontakan dengan menempuh cara-cara penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terbaik pada saat itu.

3.3 Kontak dan Reaksi dengan VOC

Pada hakekatnya falsafah pemerintahan Kesultanan Buton yang diperjuangkan oleh para pemimpinnya adalah “Balimo Karo

Sumanamo lipu dan seterusnya Balimo lipu sumanamo sara dan Agama". Falsafah ini mengandung doktrin atau ajaran yang mengharuskan para pemimpin dan rakyat Buton untuk melepaskan kepentingan pribadi demi kepentingan kelompok atau negara dan sekaligus juga memperjuangkan pemerintahan dan Agama sebagai wujud dari perjuangan umat yang melandasi segala aktivitas perjuangannya.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin Kesultanan Buton adalah merupakan pengejawantahan dari makna falsafah tersebut. Dalam sejarah telah kita ketahui bahwa Kesultanan Buton telah menerima dan membina kerjasama dibidang pelayaran, perdagangan dan pertahanan dengan Kompeni (VOC). Buton adalah salah satu kerajaan yang paling awal mengadakan ikatan perjanjian dengan VOC pada tahun 1613. Hubungan itu masih bersifat terselubung mengingat masa itu Kerajaan Ternate dan Makassar menyatakan berkuasa atas Buton. (Cerpis Diplomaticum Eerste Deal : 104-105, Susanto, 1994 : 12).

Buton memiliki letak geografis yang sangat strategis sebagai tempat persinggahan para pedagang yang mengarungi Nusantara dan juga Kesultanan Buton memiliki sarana pelabuhan yang memadai terlindung dari ombak dan bahkan sampai masuk kedalam kali Bau-Bau untuk berlabuh. Ramainya kapal-kapal dan perahu para pedagang Nusantara, yang singgah di Buton karena di perairan Sulawesi Jazirah Tenggara dan pesisir Timur jauh telah terkenal sebelum kedatangan VOC sebagai jalur pelayaran ke timur melalui Buton :

1. Jalur Makassar - Selat Tiworo - Wawoni - Bungku (Tobungku) Banggai - Ternate dengan kemungkinan singgah di Selayar, Sinyal, Kobaena, Poleang/Rumbia, Tinaggea, Maramo Kendari
2. Jalur Makassar - Bau-Bau - Lohia (Muna) - Wawoni-i seterusnya Bungku - Banggai - Ternate dan
3. Jalur Makassar - Bau-bau - Wakatobi (Kep. Tukang Besi) - Buru - Ambon - Banda. Jalur lain sampai Bau-bau (Buton) adalah pelayaran dari Jawa - Flores. Sesudah kedatangan VOC sampai masa Hindia Belanda jalur dua dan tiga lebih banyak

dipergunakan, sedangkan perahu-perahu Bugis/Makassar lebih sering menggunakan jalur satu dan kadang-kadang jalur tiga. (Bhurhanuddin dkk, dalam Susanto Zuhdi; 1994).

Meskipun ramainya para pedagang Nusantara berkunjung dan singgah di Buton bukan faktor letak saja yang membuat para pedagang untuk singgah tetapi masih ada faktor lain yang menarik para saudagar Nusantara itu untuk singgahi di pelabuhan Buton, yaitu tersedianya sejumlah fasilitas di pelabuhan Buton. Diantaranya di muara sungai di kota Bau-Bau dapat disinggahi perahu untuk mengambil perbekalan khususnya air (Susanto Zuhdi 1994 : 7).

Selain fasilitas itu Buton juga memiliki kekayaan akan hasil-hasil bumi dan lautnya, terutama kelapa (kopra), kapas, ikan, teripang yang diusahakan oleh penduduk.

Selain faktor tersebut diatas, keamanan dan kebijaksanaan pemerintah kesultanan selalu memberikan perlindungan kepada setiap perahu atau para saudagar yang berlabuh dan singgah di kota Bau-bau. Dari beberapa faktor tersebut, menyebabkan Buton termasuk di dalam jaringan pelayaran dari Jawa ke Maluku dapat dilihat pada abad ke 17. Pada abad tersebut kota-kota paling utama dalam kegiatan perdagangan laut di Nusantara adalah Tuban, Gresik dan Jepara. Kegiatan kapal-kapal dagang Jawa dari tempat-tempat itu dapat menjangkau Buton (Susanto Zuhdi, 1994 : 7).

Letak geografis dan beberapa faktor lain yang ikut memberikan dukungan atas pentingnya Buton sebagai salah satu pelabuhan persinggahan, mengakibatkan Kesultanan Buton merupakan daerah terbuka yang dapat mengundang ancaman yang datang dari luar. Berdasarkan pengalaman di masa lalunya yang sering diserang para bajak laut (Tobelo) dan pada abad ke 17 kerajaan Gowa melaksanakan politik ekspansi terhadap beberapa kerajaan kecil di daratan Sulawesi bagian selatan, maka Kesultanan Buton juga turut menjadi salah satu sasaran ekspansinya. Dan pada sisi lain VOC juga berusaha untuk mendapatkan pijakan politik untuk mendukung kelancaran pelayaran dan perdagangannya dengan Maluku.

Adalah suatu kecerdikan dan keberhasilan VOC mempengaruhi para pembesar Kesultanan Buton dengan politik “kerjasama” yang tentunya di luar kemampuan para pemimpin Kesultanan Buton bahwa

di balik kerjasama itu ada niat mencari keuntungan politik dan ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin, Sultan Mardan Ali dan Sultan La Simbata yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan kompeni VOC adalah agar Kesultanan Buton bisa aman dari ancaman para bajak laut dari Ternate dan serangan dari Kerajaan Gowa dan juga agar VOC tidak ikut memusuhi Kesultanan Buton, sehingga semakin rawan dan sudah jelas akan menambah ketidak tenangan di Kesultanan Buton dan perairan di sekitarnya.

Tawaran VOC untuk tidak saling menyerang adalah suatu keberuntungan bagi kedua belah pihak sebab musuh-musuh kesultanan Buton juga adalah musuh Kompeni VOC. Selain itu bagi VOC dengan terjalinnya hubungan dengan Kesultanan Buton berarti telah menguasai jalur dagang dan pelayaran ke Timur dan ini adalah tujuan utama bagi kepentingan pelayaran dan perdagangan VOC.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin Kesultanan Buton saat itu untuk bekerja sama dengan VOC, juga disebabkan karena Buton diapit oleh dua kekuatan yaitu Ternate dan Gowa, sedang Buton sebagai jembatan penghubung di antara keduanya. Ternate sebagai kerajaan yang menguasai pusat penghasil rempah-rempah dan Gowa menjadi penghubung distributor, penyalur ke bagian barat Nusantara dan sekaligus juga menguasai pelayaran dan perdagangan.

Apakah Kesultanan Buton bekerja sama dengan Kompeni (VOC), hanya merupakan suatu taktik guna menghadapi ancaman dari luar, terutama yang datang dari dua kerajaan tersebut yang selalu berusaha untuk menguasainya, atau hanya karena dibayangi oleh kekhawatiran atas kekuatan VOC sebagai kekuatan besar yang selalu berusaha untuk memaksakan kehendaknya dengan penyelesaian melalui perang, sekiranya pihak Buton menolak untuk mengikat perjanjian. Namun secara jelas Kesultanan Buton juga berusaha untuk mengembangkan pengaruh dan melebarkan sayapnya pada kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Oleh sebab itu kerjasama dengan Kompeni juga dimanfaatkan oleh kesultanan Buton, karena di perairan Buton dan sekitarnya bukanlah merupakan kawasan yang aman. Sering terjadi perang antar kerajaan. Oleh karena itu ajakan VOC untuk membina

hubungan kerjasama disambut dengan baik. Tentunya pihak Buton mempunyai perhitungan diplomatik bisa memanfaatkan kompeni dan terutama belajar dari cara-cara mereka.

Kalau dipertanyakan apakah kesultanan Buton mengadakan perlawanan terhadap VOC? Tidak mudah untuk menjawab bahwa Kesultanan Buton tidak mengadakan perlawanan. Setuju atau tidak setuju terhadap sikap yang diambil, sudah merupakan suatu strategi perjuangan serta keputusan dari para pemimpinnya untuk berjuang melalui diplomasi dengan jalan kooperasi demi keselamatan kerajaannya. Tetapi dalam perjalanan panjang ikatan perjanjian kerjasama ini ternyata kondisi saat itu memaksa pihak Buton mengadakan perlawanan terhadap Kompeni (VOC) yang telah berubah menjadi Hindia Belanda.

Pada bagian akhir dari bab ini akan disajikan secara logis reaksi-reaksi dari pihak Buton yang ditujukan kepada VOC, banyak bukti-bukti menunjukkan pada kita untuk ditampilkan sebagai sejarah perlawanan Kesultanan Buton terhadap VOC atas dominasi politik dan eksploitasi ekonomi yang dijalankannya. Pembahasan pada bagian ini lebih ditakankan pada hubungan dan reaksi terhadap VOC. Hubungan melalui ikatan perjanjian antara Kompeni (VOC) dengan Kesultanan Buton berawal sejak ditanda tangannya "Perjanjian La Elangi-Schoot" pada tanggal 5 Januari 1613. (Ligtvoet, 1878, Susanto Zuhdi; 1994: 12). Kemudian di susul dengan kunjungan Gubernur

Kemudian di susul dengan kunjungan Gubernur Jenderal Pieter Both bulan Agustus dalam tahun yang sama, juga memperbaharui perjanjian dengan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (La Elangi). (Zahari, 1977)

Pada masa pemerintahan Sultan Mardan Ali (La Cila) kontak dengan VOC berlangsung baik, bahkan telah beberapa beberapa kali mengadakan perjanjian. Namun pada masa pemerintahan Sultan Mardan Ali juga terjadi reaksi-reaksi dari kalangan rakyat dan para bangsawan yang tidak setuju dengan sikap Sultan yang terlalu dekat berhubungan dengan VOC. Ketidaksetujuan rakyat yang dipimpin oleh para bangsawan melahirkan reaksi keras pada peristiwa di pulau Sagori (dekat Pulau Kabaena). Sebuah kapal VOC yang hendak ke Ternate kandas dekat perahu tersebut dan pihak Buton

merampas semua barang-barang yang ada di dalam kapal, sedangkan penumpang dan awak kapal yang berjumlah 281 orang dideportasikan ke kapal Concordia, sebuah kapal VOC lainnya. Akan tetapi keseluruhan penumpangnya tidak bisa termuat, maka sebagian ditinggal di Buton (Bau-Bau). Rakyat dan para bangsawan mendesak Sultan agar orang-orang Belanda yang masih ada di Buton itu dibunuh saja. (Ligtvoet, 1878 : 37, de Jong, 1916). Akan tetapi desakan rakyat dan

Akan tetapi desakan rakyat dan para bangsawan kesultanan dengan itu tidak diterima oleh Sultan dan sebaliknya memberikan perlindungan dan bantuan untuk memudahkan bagi kompeni (VOC). (Zahari, 1977 : 23).

Hubungan yang dibina Sultan Mardan Ali dengan Kompeni juga diperlihatkan pada saat Gubernur Amboina menuju ke Batavia yang terlebih dahulu singgah di Buton. Pada saat berada di Butonia mendapat kunjungan dari Sultan Mardan Ali di atas kapal tumpangannya. Dalam pertemuan itu mereka membicarakan bahwa meski terjadi ketegangan karena tindakan rakyat Buton terhadap peristiwa di Pulau Sagori, namun menurut de Fleming (Gubernur Amboina) tidak akan merusak citra hubungan baik Buton dan Kompeni de Fleming Van Autshoorn sebelum meneruskan perjalanan ke Batavia terlebih dahulu mengadakan kunjungan balasan di istana Sultan Mardan Ali. (Ligtvoet, 1877 : 27, de Jong, 1916).

Pada tahun 1650 de Fleming Van Autshoorn singgah lagi di Kesultanan Buton dalam perjalanan pulang menuju Ternate. Kesinggahannya ke Buton untuk menyampaikan ucapan terima kasih Kompeni (VOC) atas bantuan Sultan Mardan Ali yang memberikan bantuan kepada orang-orang Belanda pada peristiwa kandasnya kapal Kompeni (VOC) di Pulau Sogori. Pada saat de Fleming ada di Buton juga diadakan perjanjian dengan Sultan Mardan Ali yang oleh rakyat Buton mengenal atau menyebut perjanjian ini dengan "janji Pataaguna" artinya perjanjian yang ke empat (Ligthvoet, 1878 : 37-41)

Sebagai realisasi perjanjian antara Buton dan VOC yang saling membantu, musuh kompeni berarti juga musuh Buton, demikian sebaliknya apabila ada yang menyerang Buton berarti juga menyerang Kompeni. Ketika itu di Amboina tepatnya di Ambalau sedang terjadi

perlawanan rakyat menentang kompeni, maka de Fleming segera meninggalkan Buton menuju Amboina (Maluku). Dalam rombongan Gubernur de Fleming ikut serta tentara bantuan dari Buton untuk ikut ambil bagian memadamkan perlawanan Ambalan yang dipimpin oleh Majira yang dapat bantuan pasukan dari tentara Kerajaan Gowa dipimpin oleh "Daeng ri Bulekang" yang mengambil posisi pertahanan diteluk Hoamoal. Akan tetapi perlawanan rakyat Ambalau dapat dipadamkan oleh kompeni pada tahun 1655. (Lightvoet, 1877 : 39-40).

Setelah berakhirnya perlawanan rakyat Ambalau Kompeni, de Fleming kembali lagi di Buton untuk memberikan bantuan pengawal tentara VOC kepada Sultan Marda Ali sebanyak 2 orang dan 10 pound obat. Dan pada bulan Desember 1653 pengawal Sultan Mardan Ali dari tentara VOC bertambah lagi menjadi 13 orang dan kepada Sultan Mardan Ali de Fleming berjanji untuk membangun 2 buah loji sebagai benteng pertahanan pantai di tepi kali Bau-Bau. (Zahari, 1977 : 28).

Selama pemerintahan Sultan Mardan Ali kontrak dan hubungan Kompeni dengan Buton membawa angin segar bagi Kesultanan Buton namun Sultan Mardan Ali semakin menunjukkan sikap yang kurang disenangi oleh rakyat. Sebab kebaikan hati de Fleming terhadap Sultan mempunyai tujuan tertentu, yaitu menginginkan penanda tangan suatu perjanjian antara Buton dengan kompeni. Saat Sultan diundang berkunjung ke atas kapal VOC yang berlabuh di teluk Bau-Bau Sultan dipaksa oleh kompeni untuk membubuhkan tanda tangan, sementara Sultan belum bermusyawarah dengan Dewan Syarat Kesultanan. Demi keselamatan Sultan dan pengikutnya yang telah di tawan di atas kapal, maka setelah berkonsultasi dengan pembesar kesultanan yang ikut saat itu memberi saran kepada Sultan Mardan Ali agar di tandatangani saja. Dalam bahasa Wolio berkata "ta tanda tangamo wa apu daa ampomini olenci aburu" maksudnya "silahkan tanda tangan Sultan nanti kemudian baru kita berdiplomasi (berjuang)" Ungkapan ini sering di tuturkan secara lisan oleh para orang tua di Buton bila mengenang peristiwa tersebut. Tetapi kejadian yang telah dilakukan Sultan di atas kapal kompeni itu ternyata mempunyai dampak terhadap diri Sultan yang menyebabkan timbulnya konflik dalam Kesultanan Buton.

Dalam bulan Oktober 1654 de Fleming singgah lagi di Buton bersama Sultan Ternate Madar Syah, mengancam Sultan Buton akan diturunkan dari jabatannya, kalau rakyat mereka , yang berutang kepada kompeni tidak segera dilunasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum Sultan Mardan Ali dipecat oleh Dewan Syarat Kesultanan, de Fleming menepati janjinya kepada Sultan untuk membangun dua buah loji di pinggir kali Bau-Bau yaitu di kota Mara, sekarang lokasi tersebut di kelurahan Nganganaumala. Pada tahun 1654 Sultan Mardan Ali dipecat oleh Dewan Syarat Kesultanan, karena melakukan tindakan yang melanggar adat dan agama, terutama perlakuan sewenang-wenang mengambil istri-istri para pembesar kesultanan. Kompeni dan Sultan Ternate Madar Syah tidak dapat mempertahankan Sultan Ali, walaupun telah berjasa kepada kompeni terutama dalam membina hubungan yang baik. Oleh Syarat Buton, Sultan dihukum mati di tiang gantung. dalam bahasa Wolio disebut "gogoli i Livanto".

Sebelum dilakukan eksekusi terhadap diri Sultan Mardan Ali terlebih dahulu rakyat memberikan reaksi terhadap Kompeni yang telah jauh mencampuri urusan politik Kesultanan Buton, reaksi rakyat lahir menjadi aksi tindakan yaitu membunuh tentara VOC yang menjadi pengawal Sultan Mardan Ali sebanyak 13 orang. Setelah kompeni mengetahui peristiwa ini, mengutus Kapten de Roos menyerang Buton dan membakar kampung-kampung yang terletak tidak jauh dari kota Bau-Bau. (Zahari, 1977 :29).

Ada beberapa hasil perjanjian antara Buton dengan Kompeni dibuang kelaut bersama stempel kesultanan, pada saat Sultan Mardan Ali menuju Pulau Makassar tempat eksekusi beliau. Akhirnya cukup beralasan bagi kesultanan bahwa hasil-sahil perjanjiannya dengan Kompeni telah hilang tidak diketahui lagi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pembesar kesultanan untuk sengaja tidak menepati lagi beberapa isi perjanjian, atau sengaja menghilangkan jejak hasil-hasil perjanjian Kompeni dengan Buton pada masa Sultan Mardan Ali. Misalnya perjanjian antara VOC, Ternate dengan Buton bahwa Sultan yang terpilih sebelum memangku jabatan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Kompeni dan Raja Ternate. Bagian ini kemudian tidak ditepati lagi oleh Kesultanan Buton.

Mardan Ali digantikan oleh Sultan Malik Sirullah (La AWU). Pada masa pemerintahannya Kesultanan Buton mengalami kekacauan dan serangan-serangan dari kerajaan Gowa, maka pada saat de Fleming berada di Buton Sultan La AWU tidak datang menemuinya, seperti pada biasanya dilakukan oleh pendahulunya. Hubungan kompeni dan Buton kadang diselingi dengan terjadinya reaksi-reaksi dari kedua belah pihak. Dari pihak Buton misalnya memberikan reaksi terhadap kompeni sering merugikan pihak Buton dan selalu memcampuri urusan pengangkatan Sultan dan jabatan-jabatan kesultanan lainnya yang menurut keinginan kompeni dengan maksud untuk memudahkan tercapainya tujuan mereka. Hubungan kedua belah pihak nanti membaik kembali setelah Sultan La Simbata pada tanggal 31 Januari 1667 mengadakan ikatan perjanjian dengan Speelman, isinya antara lain : semua pohon cengkeh dan pala yang ada dalam wilayah Kesultanan Buton harus ditebang dan sekaligus dimusnahkan, penebangan tersebut di bawah pengawasan orang-orang Kompeni. Sebagai ganti rugi dari penebangan pohon cengkeh dan pala tersebut, Kompeni membayar kepada Buton setiap tahun 100 ringgit. (Zahari, 1977 : 52-52).

Kompeni juga mengambil secara sepihak Pulau Binongko wilayah Kesultanan Buton yang sering diributkan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Gowa. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan sebagai daerah langsung yang dikuasai oleh kompeni. Karena daerah ini dan pulau-pulau di Tukang Besi lainnya menurut kompeni sebagai daerah penyelundupan cengkeh dan pala yang berasal dari Maluku yang dibawa oleh para pelayar dan pedagang asal Binongko. Sehingga kompeni menetapkan untuk diawasi satu detasmen tentara VOC demi kelancaran penebangan pohon cengkeh dan pala dan para pelaut yang memperdagangkan cengkeh dan pala.

Perlakuan Kompeni terhadap masyarakat Kesultanan Buton yang berada di kepulauan Tukang Besi menimbulkan reaksi para pembesar Kesultanan ada di pemerintahan Kadie dan Barata. Rakyatnya tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang kompeni yang bertugas disana, seperti permintaan tenaga manusia dan sarana perhubungan antar pulau untuk kelancaran tugas operasi Kompeni.

Pada umumnya rakyat tidak mau memberikan bantuan, cara ini semacam perlawanan pasif yang selalu menghambat tugas-tugas tentara VOC dan inilah kesulitan yang dihadapi oleh tentara VOC selama melaksanakan tugas di kepulauan Tukang Besi. (Zahari, 1977 :65).

Dilihat dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya ikatan perjanjian Sultan Adilil Rakhiya (La Simbata) dengan Speelman itu sangat merugikan pihak Kesultanan Buton. Pada aspek politiknya menyebabkan terjadinya pertentangan antar golongan yang setuju dengan perjanjian tersebut dan yang tidak setuju, terutama para bangsawan dan pembesar Kesultanan Buton. Selama monopoli Kompeni terhadap Buton selalu dirugikan, sehingga terjadi blok-blok kekuatan yang ingin menumbangkan kekuasaan Sultan La Simbata. Sedangkan dari aspek ekonomi dengan penebangan pohon cengkeh dan pala serta melarang para pedagang Buton menjual barang-barang dagangannya kepada pedagang lain, sangat melemahkan ekonomi rakyat Buton, khususnya para pelayar. Speelman juga mendapat reaksi keras dari Sultan Himayatuddin Muhamamad Saydi (La Karambau) yang memerintah 1751-1752 menurut beliau hasil perjajjian tersebut, bukan saja suatu penghinaan atas Kesultanan Buton, melainkan juga menimbulkan kerugian yang besar sehingga rakyat Kesultanan Buton menjadi melarat. (Zahari; 1977 : 116).

Pada masa berkuasanya, tidak terjadi kontak yang harmonis seperti pada masa sebelumnya terhadap Kompeni, bahkan beliau sendiri selalu mencari-mencari penyebab permusuhan dengan Kompeni Ligtvoet melukiskan bahwa pada masa pemerintahan La Karambau, gelar Kesultanan Himayatuddin Muhamammad Saydi terjadi sesuatu yang membawa Kerajaan Buton di dalam pertentangan yang keras dengan Kompeni. (Ligtvoet, 1878 :73, Zahari, 1977 : 116).

Reaksi-reaksi rakyat pada masa pemerintahan Sultan La Karambau seperti ikut membunuh orang-orang Kompeni dan merampas sebuah kapal VOC yang sedang berlabuh di pelabuhan Bau-Bau pada bulan Juni 1752. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang Belanda yang menjadi buronan Kompeni bernama Frans, (Ligtvoet, 74) yang ternyata dibantu oleh Sultan La Karambau. Atas peristiwa ini kompeni melimpahkan kesalahan kepada Sultan Buton. Dan bahkan setelah diketahui Buton

sendiri ikut membantu dalam peristiwa kapal "Rust en Werk" Kompeni menuntut ganti rugi kepada Sultan Buton atas peristiwa tersebut. Oleh karena pihak Buton tidak mentaati perjanjian dengan Kompeni, maka diberikan sangsi-sangsi antara lain harus menyerahkan sejumlah 72 orang budak untuk dijadikan pekerja pada Kompeni. Tetapi pihak Buton mengirim budak-budak yang lanjut usia dan dibawah umur yang diperkirakan tidak produktif untuk bekerja, sebagai suatu tanda protes atas sangsi tersebut. Pihak kompeni menanggapi reaksi Buton ini dengan memberikan ancaman perang karena budak-budak yang dikirimkan Buton tidak bisa bekerja dan bahkan menimbulkan kerugian bagi Kompeni.

Ketegangan yang terjadi dengan Kompeni pada masa pemerintahan Sultan La Karambau menyebabkan Dewan Syarat Kesultanan Buton setelah bermusyawarah secara rahasia menurunkan Sultan dan melantik Sultan Hamim ipar dari Sultan La Karambau. Pergantian Sultan ini hanyalah sebuah taktik untuk mengurangi ketegangan hubungan antara Buton dengan Kompeni. Dengan digantinya Sultan La Karambau Kompeni membina hubungan kembali dengan Sultan Hamim pengganti La Karambau. Akan tetapi kebijakan-kebijakan politik Sultan dalam menghadapi Kompeni selalu dikendalikan oleh mantan Sultan La Karambau yang mengadakan perlawanan gerilya dan secara rutin atau melalui kurir selalu mengadakan pertemuan rahasia.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa penggantian Sultan hanyalah merupakan suatu siasat Buton untuk mengatur startegi dari tekanan-tekanan Kompeni. Karena pemerintahan Sultan Hamim sangat diwarnai pemerintahan La Karambau yang anti Kompeni, maka ketegangan semakin meningkat. Didatangkannya kapal-kapal Kompeni yang membawa pasukan dan peralatan perang untuk memberi pelajaran kepada Sultan La Karambau dan menyerang Buton dan ternyata sesampai di Buton La Karambau telah meletakan Jabatan. Tetapi Risjweber Komandan pasukan Kompeni tidak mau membatalkan niatnya. Armada Kompeni yang ikut ambil bagian ke Buton adalah kapal Huis te Mapat, kapal de Paart (Chaloep), kapal Grisgis (Pancalangas), kapal Triston (Pancallagas), kapal Ovwerkerk, de Meermin (Chaloep), Kapal het Fortuin (Chaloep), Kapal de Arnaldina (Chaloep). (Zahari, 1977 :124).

Tibanya 8 buah kapal Kompeni ke Buton mengagetkan Sultan dan pembesar Kesultanan bersama rakyat Buton, maka begitu kapal berlabuh diteluk Bau-Bau Sultan mengirim utusan untuk menanyakan maksud kedatangan mereka. Pada saat para utusan tiba dikapal semua persenjataan di sembunyikan, sehingga tidak menaruh kecurigaan dari para utusan Sultan Buton. Pimpinan pasukan Kompeni Rijsweber menyuruh para utusan untuk kembali dan menyampaikan salam hormat Kompeni kepada Sultan dan pembesar kerajaan serta mengirimkan hadiah, juga dijelaskan kepada para utusan bahwa kedatangan mereka hanya untuk mengambil air minum karena kehabisan dalam perjalanan menuju Maluku.

Sesudah para utusan kembali, Rijsweber menyamar sebagai matros kapal pergi ke darat menyelidiki dan mengamati situasi serta kekuatan pertahanan pihak Buton yang berpusat di Benteng keraton Wolio. Menurut pengamatan Rijsweber ternyata benar bahwa pihak Buton telah bersiap-siap menghadapi kedatangan pasukan Kompeni, rakyat banyak berkumpul tetapi tidak ada persenjataan yang luar biasa. (Zahari ; 1977 : 124).

Setelah kembali ke kapal Rijsweber mengatur strategi penyerangan dengan memerintahkan pukul 12.00 malam untuk memulai pendaratan dan tepat pukul 15.50 masing-masing pasukan telah siap pada barisannya dan siap bergerak menuju keraton yang menjadi pusat pertahanan dan ibu kota Kesultanan. Sesudah pasukan Rijsweber berada di kaki benteng dekat pintumasuk membagi pasukannya kedalam dua kelompok, yang satu masuk melalui pintu gerbang "Lawana Lonto" dan yang lain masuk melalui gerbang "Lawana Wandailolo" Tepat pukul 6.00 pagi pasukan Kompeni telah berada di depan pintu gerbang yang telah dijanjikan dan tinggal menunggu pintu-pintu benteng terbuka untuk memulai gerakan penyerbuan. Begitu pintu terbuka oleh petugas penjaga pintu gerbang, pasukan Kompeni segera menyebu dengan melepaskan tembakan-tembakan. Penjaga pintu gerbang yang bersenjatakan keris, tombak, badik dan parang tidak dapat berbuat banyak, mereka di tawan oleh pasukan Kompeni dan terjadilah perlawanan setelah Kapitalau memimpin pasukan Buton, seluruh rakyat khususnya wanita dan anak-anak melarikan diri mengungsi keluar keraton, karena sebagian

besar rumah-rumah penduduk di bakar oleh pasukan Kompeni. Sultan menyingkir ke Kaesabu bersama keluarganya, sedang mantan Sultan La Karambau yang ikut ambil bagian dalam perlawanan itu mengungsi ke Gunung Siontapina. Banyak korban pada kedua belah pihak, akan tetapi Buton kehilangan putra-putra terbaiknya seperti, Sapati, Kapitalau, Bonto Ogena, Lakina La Balawa, Yarona Rakia, dan Lakina Todanga, serta 3 orang tawanan. (Zahari; 1977 : 125-128).

Akan tetapi setelah Kompeni menyerang Buton, timbul keraguan Kompeni tentang adanya kemungkinan Buton bisa berhubungan dengan Kerajaan Gowa yang selalu berusaha untuk mengausai Buton atau Kerajaan Bone yang telah lama membina persahabatan dengan Buton. Kekhawatiran Kompeni ini cukup beralasan karena pihak Buton menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan Kompeni. Kekhawatiran Kompeni itu, diteruskan dengan mengirimkan surat kepada Sultan Buton melalui Gubernur Raad di Ujung Pandang yang isinya menyampaikan penyesalannya terhadap peristiwa yang melanda Buton dan mengharapkna agar hubungan Kompeni dan Buton tetap berjalan seperti sedia kala. (Ligtvoet; 79-80).

Dalam waktu yang bersamaan Sultan Buton juga mengirim surat kepada Raja Bone tanggal 22 April 1755 yang menyampaikan rasa penyesalan Buton atas insiden yang terjadi antara Kompeni dan Buton dan tidak memberikan berita lebih dahulu kepada Bone sebagaimana yang dimufakati bersama, untuk seterusnya Bone memberikan peringatan kepada Buton. Dalam surat tersebut, juga dijelaskan seharusnya Kompenilah yang bersalah karena Kompeni sendiri telah melanggar isi perjanjian persahabatan yang telah disepakati. (Zahari; 1977 ; 130).

Hubungan persahabatan antara Kompeni dan Buton setelah peristiwa penyerangan pasukan Rijsweber ke Benteng keraton Kesultanan Buton, rupanya menjadi suatu peristiwa yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Peristiwa itu membawa kerugian yang begitu banyak dan gugurnya para pembesar kesultanan serta ratusan rakyat telah menjadi korban dan kehilangan tempat tinggal, maka ajakan Kompeni untuk meneruskan persahabatan tidak begitu saja diterima kembali. Rupanya pihak Kompeni tidak kehabisan akal menghadapi

sikap Buton ini. Kompeni mengalihkan perhatiannya kepada Kerajaan Muna yang merupakan wilayah Barata Kesultanan Buton. Kompeni mengadakan kontak perjanjian dengan Kerajaan Muna yang antara lain isinya adalah Kerajaan Muna akan lepas dan di bebaskan dari pengaruh kekuasaan Kesultanan Buton. Tentu pihak Buton tidak bersedia memberikan Kerajaan Muna berdiri sendiri lepas dari Barata Buton yang telah menjadi kesepakatan dengan Raja Muna. Rupanya hanya sebagai taktik Kompeni saja, sesudahnya Kompeni mencoba lagi mengajak Buton pada Maret 1756 untuk mengadakan persahabatan kembali dan rencana membuat kontrak perjanjian dengan Sultan Buton, Kompeni diwakili oleh Sinkelaar dan Rijsweber, tetapi menemui kegagalan. Selanjutnya kedua utusan Kompeni tiba kembali di Ujung Pandang 30 April 1756 dengan tidak membawa hasil yang diharapkan sekalipun antara Kompeni dan Buton tidak terjadi hubungan harmonis seperti masa-masa sebelumnya, tetapi pertukaran surat menyurat berjalan terus baik antara Sultan dengan Gubernur Makassar, maupun para pembesar kesultanan.

Pada akhir masa pemerintahan Sultan Hamim, kembali terjadi kekacauan. Pihak kompeni selalu hadir dengan mengajukan tuntutan atas ganti rugi pihaknya pada peristiwa penyerbuan kapal *Rast en Werk* dan kerugian perang yang dipimpin oleh Rijsweber yang menyerbu Benteng Keraton Wolio. Tuntutan-tuntutan itu dijawab oleh Sultan Hamim bersama pembesar-pembesar kesultanan dengan menyampaikan surat protes pada tanggal 9 September 1756 kepada Kompeni tentang ganti kerugian itu dengan menetapkan harus menyerahkan 1000 orang budak sebagai pembayaran kerugian kedua peristiwa tersebut. Bahkan oleh pemerintahan Kesultanan Buton bahwa penyerangan Kompeni terhadap Buton, kiranya sudah melebihi kerugian yang diderita Kompeni dibandingkan dengan kehancuran Kesultanan Buton atas peristiwa tersebut. Lagi pula beberapa pembesar Kesultanan dan rakyat Buton yang tidak bersalah menjadi korban dari perbuatan tentara Kompeni. (Zahari, 1977 : 132).

Usaha penyelesaian konflik Buton dan Kompeni, khususnya permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan oleh Sultan Hamim, ingin diselesaikan oleh penggantinya Sultan Rafiuddin (La Seha), terutama hubungan persahabatan Buton dengan kompeni yang telah

terputus. Masalah pembayaran ganti rugi peristiwa Kapal Rust en Werk dan penyerangan pasukan Kompeni yang dipimpin oleh Rijsweber, Sultan mengutus tim untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dipimpin oleh Laode Amiri Yoranma Tangkeno. Tim ini berhasil menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat antara Kompeni dan pihak Buton, akan tetapi secara tiba-tiba Sultan La Seha meninggal dunia, karena serangan jantung dan juga di akibatkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi saat itu.

Dengan berpulangnya kerahmatullah Sultan La Seha, maka satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Dewan Syarat Kesultanan adalah melantik kembali Himayatuddin Muhamad Saydi (La Karambau) sebagai Sultan Buton, setelah terlebih dahulu menyatakan kesediaannya mematuhi perjanjian dengan Kompeni. Namun ternyata sulit baginya untuk merubah sikap yang tidak senang terhadap Kompeni yang menurut penilaiannya selalu merugikan pihak Buton. Tindakan-tindakan Sultan La Karambau yang tidak mengenal Kompromi dengan kompeni diperlihatkan kembali dengan adanya kebijakan manakala dipandanginya sangat merugikan pihak Buton. Ia juga tidak setuju kalau pencalonan dan pengangkatan Sultan harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kompeni, karena menurut beliau adalah suatu dominasi yang terlampaui jauh mencampuri urusan politik dan pemerintahan Kesultanan Buton. Sultan La Karambau terkenal paling gigih menentang Kompeni di Kesultanan Buton. Beliaulah yang sampai akhir hayatnya mengadakan perlawanan terhadap kompeni dengan perlawanan gerilya setelah turun dari jabatan Sultan dengan pusat pertahanan di Gunung Siotapina. Oleh masyarakat Buton beliau di kenal dengan “Oputa Ikoo” Sultan yang berjuang di hutan”.

Hubungan persahabatan Kompeni dengan Buton baik kembali pada masa pemerintahan Sultan Kaimuddin (La Jampi). Ia telah berupaya beliau mengirim utusan Buton yang dipimpin oleh La Ode Jaafara Yarona Wasilomat untuk membicarakan penyelesaian masalah Kompeni dan Buton, khususnya masalah pengiriman budak dan utang-utang Kesultanan Buton, dan ganti rugi dari beberapa peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Misi diplomasi yang dipimpin La Ode Jaafara berhasil diterima oleh pihak kompeni, sehingga penyerahan

budak-budak asal Buton yang dipekerjakan Kompeni di Batavia (Jakarta) dihentikan dan Kompeni tidak menuntut ganti rugi lagi kepada Buton. Selesaiannya masalah pembayaran ganti kerugian ini disambut baik oleh pihak Kesultanan dan rakyat Buton, sehingga peristiwa tersebut oleh masyarakat Buton mengenalnya dengan istilah Walio “Akatakimo Kunci” artinya “Pemutusan Penyelesaian Masalah Kompeni dan Buton”. (Zahari, 1977 :144).

3.4 Reaksi terhadap Kekuasaan VOC.

Sesungguhnya berdasarkan sumber lisan yang dituturkan secara turun-menurun dan sumber-sumber tertulis yang amat terbatas jumlahnya telah terjadi reaksi-reaksi berupa gerakan dan tindakan protes hingga ke perlawanan secara fisik menentang kehadiran Kompeni (VOC) di Kesultanan Buton. Akan tetapi bila diprosentase masih lebih banyak yang setuju menerima kerjasama dengan Kompeni, mendasarkan alasan-alasan yang berdasar dari kondisi saat itu, terutama seringnya terjadi gangguan dari luar terhadap keamanan Kesultanan Buton. Hal ini merupakan fakta historis bahwa Buton sesuai kondisi geografisnya menjadi daerah perebutan pengaruh. Hubungan antara Buton dan VOC merupakan hubungan dua pihak yang sederajat, di dalamnya telah diselingi oleh perselisihan dan perlawanan. (ibid, 204). Demikian pula yang tidak setuju tentu didasari pada argumen-argumen yang logis, bahwa Kompeni hanya mencari keuntungan dibalik kerjasama tersebut.

Seperti disinggung di atas bahwa Kesultanan Buton termasuk salah satu kerajaan yang pertama mengikat perjanjian dengan Kompeni (VOC) pada tanggal 5 Januari 1613 antara Sultan La Elangi (Dayanu Ikhsanuddin) mewakili Buton dengan Schot mewakili VOC. (Dokumenta DPRD Sultra, 1977, Zahari, 1977 : 157).

Masa pemerintahan Sultan La Cila (Mardan Ali) kerjasama antara Kompeni Belanda dengan Buton berlangsung baik, sehingga Sultan diberi pengawal tentara VOC sebanyak 13 orang yang menjaga istana kesultanan dan keselamatan Sultan. Namun sebaliknya golongan bangsawan dan para pembesar kesultanan yang lain menilai hubungan Sultan dan Kompeni terlalu dekat, sehingga menimbulkan reaksi dan

adanya usaha golongan bangsawan untuk menjatuhkan Sultan dari jabatannya. Rencana Dewan Syarat ini pada akhirnya berhasil memecat Sultan La Cila dan sekaligus mengantarnya kepada fonis hukum mati ditiang gantung, karena pelanggaran-pelanggaran adat dan agama yang dilakukannya dengan mengambil isteri dari pembesar kesultanan. (Zahari, 1977 : 28). Tetapi sebelum Sultan La Cila dieksekusi sebagai luapan kemarahan rakyat pengawal Sultan La Cila yang terdiri dari tentara VOC yang berjumlah 13 orang dibunuh terlebih dahulu di dalam Keraton Wolio dalam serangan secara tiba-tiba di tempat pos penjagaan mereka. (ibid, 29).

Rentetan peristiwa tersebut di atas, pada hakekatnya karena protes yang berakhir dengan tindakan yang disebabkan Sultan La Cila terlalu dekat dan banyak merugikan pihak Buton. Dan sebaliknya Kompeni semakin jauh mencampuri urusan dalam kesultanan. Masih dalam kekuasaan Sultan La Cila, terjadinya peristiwa perampasan kapal VOC yang karam di pulau Sagori dalam wilayah Kesultanan Buton setelah merampas muatan kapal, rakyat yang tidak senang kepada orang-orang Kompeni yang telah diselamatkan, meminta kepada Sultan La Cila agar penumpang kapal bersama awak kapalnya di bunuh saja, tak perlu diberikan pertolongan.

Ketidak senangan para bangsawan dan rakyat Buton kepada Kompeni Belanda ikut mendorong reaksi dan tindakan Sultan La Karambau terhadap Kompeni. Beberapa orang Buton yang menjadi pengikut Frans merampas barang-barang dan muatan kapal Kompeni *Rust en Werk* serta membunuh semua awaknya yang sedang berlabuh dipelabuhan Bau-Bau. Tindakan Frans bersama pengikutnya ternyata mendapat bantuan dari Sultan La Karambau yang dikenal sangat membenci orang-orang Kompeni dan Frans yang menjadi buronan melarikan diri bersama pengikutnya di Kabaena dan setelah tiba disana memperkuat diri dengan membuat benteng pertahanan. (Ligtvoest, 1878 : 74).

Reaksi rakyat berikutnya terjadi di kepulauan Tukang Besi yang tidak mau menerima hasil perjanjian Sultan La Simbata dengan Speelman. Isinya perjanjian antara lain menebang semua pohon cengkeh dan pala yang ada diwilayah Kesultanan Buton, khususnya

di kepulauan Tukang Besi serta melarang para pelaut Buton untuk berdagang dengan pedagang dari luar dan bangsa asing lainnya. Selain itu menetapkan Kadie Binongko menjadi wilayah kekuasaan Kompeni Belanda, dalam tahun 1667 padahal wilayah ini di pertikaikan oleh Buton, Gowa dan Ternate. (Ligtvoest, 1877 : 53-54). Akibat keputusan Kompeni itu menimbulkan amarah rakyat dan pembesar disana. Rakyat tidak mau memberikan bantuan demi kelancaran tugas-tugas Kompeni di sana, khususnya kepada satu detasemen tentara VOC yang ditugaskan di kepulauan tukang besi untuk mengawasi penebangan pohon cengkeh dan pala. Sebaliknya rakyat membantu dan memperlancar setiap aktivitas para pelaut dan pedagang asal Buton ke Maluku dan daerah lain di Nusantara.

Demikian pula salah satu poin dari perjanjian tersebut di atas mewajibkan Buton agar setiap pengangkatan Sultan dan para pejabat Kesultanan dibawah sultan harus terlebih dahulu dilaporkan dan mendapat restu dari Kompeni. Ketentuan ini dilanggar oleh pihak Buton dan protes terhadap perjanjian yang selalu merugikan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan La Tangkaraja tahun 1669.

Perlakuan Kompeni selama beberapa tahun mengadakan perjanjian, selalu menguntungkan pihak sendiri. Hal ini tidak luput dari pengamatan La Karambau yang saat itu belum terlibat dalam pemerintahan. Pada saat ia terpilih menjadi Sultan Buton 1751-1752 dan kemudian terpilih lagi untuk kedua kalinya 1760-1763 telah menyimpan dendam kepada Kompeni. Setelah menerima jabatan Sultan beliau menyatakan tidak mau bekerja sama dengan Kompeni. Tindakan yang dilakukan oleh Sultan La Karambau itu mendapat dukungan dari pada pembesar kesultanan dan rakyat, maka perjanjian-perjanjian yang telah ditanda tangani oleh para Sultan pendahulunya tidak diindahkannya. Sebaliknya beliau menilainya sebagai suatu penghinaan atas Kesultanaan Buton dan menimbulkan kerugian yang mengakibatkan rakyat kesultanan menjadi melarat (Ligtvoet, 1878 : 73, Zahari. 1977 : 116).

Pada saat orang-orang Kompeni yang tidak puas dengan perlakuan para pemimpin Kompeni sendiri, terpaksa melakukan perlawanan dengan mencari dukungan kepada raja-raja yang tidak suka dengan orang-orang Kompeni (VOC). Sultan La Karambau

menerima pelarian Frans yang dihukum oleh Kompeni tetapi berhasil melarikan diri dan diberi perlindungan oleh Sultan. Bahkan Sultan membantu Frans dalam peristiwa kapal *Rust en Werk*. Atas peristiwa tersebut Kompeni menggempur Keraton Wolio, sehingga terjadi kekacauan dan ketidak tentraman. Akhirnya Sultan La Karambau di turunkan dari jabatannya oleh Dewan Siolimbona sebagai suatu strategi agar Kompeni tidak menyerang Buton secara besar-besaran. (Zahari, 1977 :118).

Sekalipun La Karambau telah dipecat, tetapi hubungan Buton Kompeni tetap tegan. Hal ini disebabkan La Karambau masih tetap berperan dibalik layar dalam pemerintahan Sultan Hamim adik iparnya. Pertentangan dengan Kompeni kian menghangat yang mendapat pengaruh dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang sedang mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan VOC. Sementara itu pihak VOC tetap menuntut Buton untuk membayar ganti rugi atas peristiwa Kapal *Rust en Werk*, namun pihak Buton tidak mengindahkannya. Pada awal tahun 1753 di bawah Komando Khon Bonelius dengan kapal *Kaaskoper* dan *Corolina* tiba di Buton dengan membawa sepasukan tentara. Turut serta dalam rombongan pembesar tentara Kompeni Kaptan Artilerie Jan Babtiste de Morquit dan Letnan Laut Laurens Montepen dan bantuan dari orang-orang melayu di Ujung Pandang di bawah pimpinan Abdul Kadir serta dari Ternate dan Bima untuk menangkap Frans dan pengikutnya serta memberi pelajaran bagi Buton yang tidak menempati perjanjian (Ligtvoet, 1878 : 74).

Meskipun misi Bonelius berhasil menewaskan Frans dan menangkap pengikutnya serta merampas barang-barang miliknya, tetapi keberhasilan ini harus ditebus dengan nyawa John Bonelius sendiri yang mati dalam pengejaran terhadap Frans di Kabaena (ibid : 74). Dalam kunjungan Bonelius itu, VOC mengadakan perjanjian, meminta ganti rugi atas peristiwa kapal *Rust en Werk* dengan membayar 72 orang budak dan sejumlah emas dan perak.

Sultan Hamim tidak lama kemudian berpulang kerahmatullah digantikan oleh Sultan La Seha, namun reaksi-reaksi rakyat bersama para pembesar kesultanan makin meningkat. Oleh karena pihak Kompeni selalu mendesak Buton untuk meminta ganti rugi, maka

pada tanggal 25 Desember 1754 Buton mengirim keputusan ke Makassar (Ujung Pandang). Sebagai tindakan tidak senang, pihak Buton mengirim 80 orang tua dan anak-anak yang tidak dapat bekerja untuk Kompeni. Tindakan ini dianggapi Kompeni sebagai suatu pelecehan, maka Kompeni mengirim Petzald ke Buton untuk mengamati apa yang terjadi di sana. Dari laporan Petzald yang mengatakan bahwa sewaktu berada di Buton ia melihat tanda-tanda persiapan perang dari kesultanan Buton. Setelah menerima laporan ini Kompeni lalu mempersiapkan pasukan dan berangkat dari Bonthain pasukan tiba dipelabuhan Bau-Bau pada tanggal 23 Pebruari 1755 dan segera melepaskan tembakan tetapi tidak dibalas dari pihak Buton. Tidak adanya tembakan balasan dari pihak Buton karena mengetahui bahwa kompeni pasti memberikan reaksi/balasan terhadap Buton. Pihak Buton tidak mau mengambil resiko lebih awal membuka kesempatan terjadinya perang terbuka, karena itu pihak Buton hanya menunggu reaksi kompeni. Pihak kompeni juga cukup berhati-hati menghadapi Buton. Mereka pun menyusun strategi yang tepat untuk menyerang Buton.

Kompleknya masalah-masalah yang dihadapi menyebabkan Sultan La Seha meninggal dunia tahun 1760. Sebagai penggantinya di pilih kembali Sultan La Karambau yang sejak awal tidak mau bekerjasama dengan Kompeni. Meskipun Sultan La Karambau telah berjanji kepada Dewan Syarat Buton untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama Kompeni dan bersikap lunak terhadap orang-orang Kompeni, ternyata sikapnya yang mengandung kebencian terhadap orang-orang Kompeni tidak berubah dan bahkan semakin meningkat dengan menyatakan perang.

Sultan La Karambau memerintah selama 3 tahun, kemudian di turunkan dari jabatannya karena beliau mengadakan perang gerilya. Sewaktu pasukan Kompeni mendesak pasukannya ia mengundurkan diri dan bertahan di gunung Siontapina. Pasukan Kompeni yang tetap mengejarnya hingga kaki gunung, Siontapina menderita banyak yang korban, karena medannya sangat sulit untuk ditempuh. Sebaliknya bagi pasukan La Karambau dengan mudah mengamati dari atas, kemudian menghadang satu persatu, setiap tentara Kompeni yang berusaha untuk mencapai puncak gunung, sehingga pasukan Kompeni

mengundurkan diri dan kembali ke kapal yang berlabuh di pelabuhan Kamaru. (Zahari; 1977 :136).

La Karambau tidak bisa lagi mengatur pemerintahan karena tetap bertahan di gunung Siontapina menyebabkan beliau digantikan oleh Sultan Jampi. Hingga akhir hayatnya La Karambau tetap menyingkir bersama pengikutnya di gunung Siontapina dan belaiu selama hidupnya menentang Kompeni Belanda. Di dalam sejarah Buton disebutkan beliau dimakamkan di puncak gunung tersebut dan masyarakat Buton memberikan gelar "Oputa I Koo" maksudnya "Sultan yang menetap di hutan atau yang bergeriliya".

Menurut pandangan para tokoh pemerintahan Buton, Sultan La Karambau dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh lain di beberapa daerah di Nusantara. Kalau di Maluku kita mengenal tokoh Patimura, di Sulawesi Selatan Sultan Hasanuddin, demikian pula di daerah Jawa, Sumatera dan Kalimantan, maka di Buton Sultan La Karambau, oleh pemerintah daerah Buton mengabadikan nama beliau pada sebuah makam pahlawan Daerah Tingkat II Buton, yaitu "Makam Pahlawan Oputa I Koo".

BAB IV

**MASUKNYA KESULTANAN BUTON KE DALAM
KEKUASAAN KOLONIAL HINDIA BELANDA
(1824--1906)**

(1) Mengapa Kesultanan Buton tetap (harus) memelihara hubungan dengan Kompeni/Belanda dengan berbagai perjanjian yang pada dasarnya mempengaruhi kedaulatannya? (2) Sejauh mana muncul kegiatan penolakan secara diam-diam sampai dengan tindakan perlawanan menghadapi Kompeni/Belanda? (3) Dan sejauh mana persoalan yang muncul dari anggota Barata di dalam perkembangan itu?

Ketiga pertanyaan pokok di atas merupakan aspek-aspek penting dan menarik untuk mengkaji beberapa persoalan yang dihadapi Kesultanan Buton baik dari dimensi internal maupun eksternal dalam masa akhir sebelum masuk kedalam kekuasaan Hindia Belanda secara formal. Bab ini akan mencoba menjelaskan perkembangan itu.

4.1 Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui 1824: Antara Isi dan Implikasi

Ada dua Sultan yang memegang tampuk pemerintahan dalam periode antara Perjanjian 1824 sampai Perjanjian berikutnya, Perjanjian 1873, yakni Sultan Muhammad Idrus (Kaimuddin I) dan Sultan Muhammad Isa (Kaimuddin II).

Hubungan ke Dalam : Antara Persahabatan dan Kecurigiaan

Sultan Buton ke-29 adalah Muhammad Idrus bergelar Sultan Kaimuddin I yang memerintah antara 1824-1851. Sultan yang satu ini mempunyai perhatian yang besar terhadap perkembangan agama Islam. Ia juga sebagai seorang pengarang yang telah banyak menghasilkan karya-karya tulis baik yang berbahasa Buton (Wolio), Melayu-Jawi (Melayu Kuno dengan huruf Arab) dan berbahasa Arab. Jenis karya tulis yang dilahirkan dari tangannya adalah berupa syair berbahasa Buton, mengenai kehidupan rumah tangga. (Zahari : II, 29).

Ada dua perjanjian yang ditandatangani Sultan Buton, Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin I dalam tahun 1824, yakni tanggal 19 Februari dan 7 Agustus. Perjanjian itu ditandatangani oleh ketua delegasi Buton yang dipimpin oleh La Ode Soda mengara Raja Wolowa dan menteri Barangkatopa Masambuni. Isi perjanjian yang disebut pertama tidak mengubah Perjanjian 1766 (Bongaya) secara prinsipil kecuali pembayaran ganti kerugian atas penebangan pohon cengkeh dan pala dengan tambahan 120 ringgit. Pada perjanjian yang ditandatangani 7 Agustus itulah terdapat pembaharuan terhadap perjanjian Bongaya 1766. Perjanjian Bongaya sendiri telah mengalami perubahan juga sejak 1677. Seperti diketahui Perjanjian Bongaya adalah persetujuan yang dicapai oleh VOC dan Kerajaan Gowa, setelah berakhir perang kedua pihak itu. Perjanjian itu merupakan akhir kekalahan Gowa di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin dalam perang melawan VOC.

Penandatanganan kedua perjanjian itu menunjukkan adanya hubungan yang harus dipelihara antara kedua pihak. Sebuah perjanjian sudah tentu berangkat dari masing-masing kepentingan yang kemudian diakomodasikan di dalam pasal-pasal yang disetujui bersama. Masalahnya apa kepentingan masing-masing.

Ketergantungan Buton terhadap Belanda dapat dilihat dari permintaan tambahan detasemen untuk setiap tahun 1 sersan, 1 koprал dan 2 prajurit. Alasan permintaan itu karena ancaman dan gangguan yang dilancarkan oleh bajak laut yang banyak berlayar di perairan Buton. (Militaire Memorie van het Landschap Boeton 28 Aug. 1919 hlm 291).

Perjanjian Bungaya yang diperbaharui (1824) ternyata dalam pelaksanaannya tidak terlalu dipatuhi oleh para penandatanganannya. Sebab ketidakpatuhan itu bukan hanya soal kepentingan mendasar mengenai kedaulatan masing-masing melainkan juga karena ulah pejabat yang bertindak berlebihan. Asisten Resident Vosmaer yang bermaksud mengembangkan masyarakat orang laut Tobelo di teluk Kendari dianggap telah mempengaruhi kepentingan Sultan Buton. Sultan Kaimuddin menganggap usaha Vosmaer akan mengganggu kepentingan di wilayah yang diakui sebagai kekuasaan Buton.

Bagi Pemerintah Kolonial, dalam paruh abad ke-19 menghadapi ancaman dari kolonialisme Inggris. (Poelinggomang 1992 :) Belanda selalu berupaya untuk menjaga wilayah yang sudah dikuasainya -- secara formal -- dari ancaman saingannya yang semakin kuat di bidang perdagangan laut. Kekhawatiran terhadap perluasan kolonialisme Inggris itulah Belanda berusaha melakukan tindakan untuk mempererat hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara terutama yang belum terlalu berhubungan dengan orang-orang Inggris. Dengan pangkalan kekuasaannya di Kalimantan bagian utara, Inggris dianggap merupakan ancaman bagi Belanda.

Menyadari bahwa perjanjian Bungaya yang diperbaharui tidak terlalu dipatuhi, Pemerintah Belanda pada tahun 1850, mengadakan perjanjian sendiri dengan Sanrobone dan ketujuh kerajaan Mandar. Pada dasarnya raja-raja itu menyatakan bahwa kerajaannya termasuk di dalam wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, mewujudkan keadaan damai dan persahabatan. Mereka menyatakan bahwa musuh Belanda adalah musuh kerajaan-kerajaan itu juga. Kerajaan itu tidak boleh berhubungan dengan orang Eropah tanpa izin Pemerintah Belanda. Juga tidak boleh ada orang Eropah tinggal di daerah kerajaan itu tanpa seizin Belanda.

Kesultanan Buton tentu mempunyai berbagai kepentingannya sendiri. Ancaman yang selalu dihadapi Buton dalam periode ini terutama adalah dari anggota *Barata*. Hal itu terlihat dari pembaharuan undang-undang *Barata* yang dilakukan Sultan Muhammad Idrus pada tahun 1824. (Zahari, 1977 :).

Hubungan Buton dengan Belanda pada masa Sultan Kaimuddin I dikenal sangat erat. Hal itu terbukti misalnya dengan pengiriman pasukan Buton yang dikirim ke Jawa dalam rangka membantu Belanda mengakhiri perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830). Pasukan Buton dipimpin oleh La Ode Malim haji Sulaiman Raja Laompo. Ia tiba di Makassar pada 17 Juli 1828 dan tiba di Semarang pada 1 Agustus 1828. Pasukan Sulaiman diberi pangkat titular yakni :

1. Sulaiman sendiri sebagai Komandan berpangkat Mayor
2. Enam orang sebagai Kapten
3. Lima orang sebagai Letnan I
4. Satu orang sebagai Pembantu Letnan (onder Officer)

Pasukan Sulaiman kembali ke Buton pada 1829. Seorang anggotanya mati di Jawa. (Zahari, 1977, II, 32-33).

Dalam periode 1837 sampai 1848 Kesultanan Buton tidak menghadapi masalah politik, kecuali pada akhir tahun itu terjadi kerusuhan. Di beberapa pulau yang termasuk kepulauan Wangi-Wangi dan Tukang Besi terjadi kerusuhan sosial. Sultan meminta dikirim sebuah kapal uap dengan beberapa perahu perang dari Belanda di Makassar, tapi karena sedikit dipunyai maka yang dikirim adalah Z.M. Brik de Haai ke Buton dipinjamkan kepada Sultan untuk menumpas kerusuhan itu. (Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda, 1973 : 318)

Perwujudan isi kontrak yang diperbaharui itu tidak begitu saja berjalan lancar. Sultan mengalami berbagai persoalan. Pada 1851, Sultan sendiri mempunyai cara pandang terhadap kontrak itu. pada 1886 kesulitan pertama muncul. Ketika sikap kerajaan yang baru itu menunjukkan sikap-sikapnya, Gubernur Sulawesi harus mengirimkan 3 kapal perang ke Buton. Beberapa tahun berikutnya -- 1897 dan 1901-- beberapa kali muncul perlawanan.

Kepentingan Belanda terhadap Buton terutama karena letak strategisnya. Pemerintah Belanda perlu menguasai wilayah ini karena ancaman terutama datang dari bajak laut. Sudah menjadi tradisi bahwa wilayah ini merupakan jalur lalu lintas bajak laut. Hal ini bukan saja mengancam keamanan rakyat Buton tetapi juga bagi keamanan

pelayaran dan perdagangan Belanda. Untuk menghalau memperkecil ruang gerak bajak laut di wilayah ini, Belanda membangun gudang-gudang penyimpanan batubara sebagai bahan bakar kapal uap.

Bahkan seperti dilaporkan pada tahun lalu berkenaan dengan bajak laut dan perdagangan budak pada 1856 juga telah berlangsung, dengan beberapa hal yang telah dilaporkan. Dalam permulaan tahun ini telah berulang kali terlihat perahu-perahu bajak laut menyusuri pantai-pantai di wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena tidak adanya stasiun maka hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penanggulangan bajak laut saja.

Pada bulan Maret datanglah kapal uap "Amsterdam" melakukan pelayaran untuk membersihkan gangguan di perairan antara Sulawesi dan kepulauan Maluku. Pada 8 Maret kapal itu ditemani perahu penghalau No. 3 dan No. 50, tetapi mereka tidak menjumpai bajak laut. Setelah "Amsterdam" dan kedua perahu itu berlayar ke Maluku mereka menjumpai bajak laut di Selat Buton. Pada 21 Maret terjadi penyerangan dari 12 perahu perompak, tetapi satu perahu kawan perompak dapat dibakar yang satu lagi tenggelam sedangkan yang lainnya melarikan diri bersembunyi di karang-karang laut sehingga perahu-perahu pemburu Belanda tidak berhasil menemukannya. (Algemeen Politieke Verslag, Arsip Makassar 1/2 1856 ANRI-J).

Rencana pembangunan gudang-gudang itu dapat diketahui dari Surat Keputusan (*besluit*) Gubernur Jenderal 2 Maret 1856. Berbagai pertimbangan yang mendasari keputusan pemerintah itu antara lain dapat dilihat dari surat Asisten Residen dan magistraat Gubernur Sulawesi kepada Gubernur Jenderal. Pantai Timur Sulawesi termasuk Banggai dan Kepulauan Sula sudah menjadi perhatian Pemerintah Belanda oleh karena sering munculnya ancaman dan gangguan keamanan yang dilakukan bajak laut. Untuk mengatasi persoalan itu diperlukan sejumlah persyaratan yang dapat mendukungnya. Akan tetapi upaya membasmi bajak laut tidak mudah. Dalam upaya pencarian bajak laut di perairan sekitar bagian selatan dan tenggara pulau Sulawesi sampai ke pantai timur, memang telah dilakukan dengan kapal-kapal layar kecil dan kapal-kapal uap.

Tujuan untuk mengintensifkan operasi-operasi itu tidak sepenuhnya dapat dicapai. Dalam musim, ketika bajak laut berlalu lalang di perairan ini, hampir tidak mungkin bagi kapal-kapal layar menantang angin sehingga sampai ke pantai. Sementara sebuah kapal uap berdaya angkut besar memerlukan bahan bakar yang banyak pula. Kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi dari Makassar saja. Sebagai upaya untuk mendukung ekspedisi pelayaran sampai ke pantai timur Sulawesi, keadaan darurat seperti itu sudah tentu harus diperhatikan, karena hanya ada satu gudang batubara. Kenyataan itulah yang harus diatasi. (Surat As. Res. Makassar kepada GG Ned. Indie, 25 Juli 1855 dalam Besluit, 2 Maart 1856 No. 3 ANRI).

Sebelum pada akhirnya diputuskan tempat penyimpanan batu bara di Buton, sebenarnya ada pilihan lain yakni di Kendari. Pilihan ini sesungguhnya dapat dimengerti jika diperhatikan letak Kendari yang dianggap dapat menjangkau bagian tenggara dan pantai timur Sulawesi bahkan dapat menjangkau Gorontalo. Akan tetapi, di Bacan yang letaknya juga strategis untuk menjangkau perairan yang dimaksud, sudah akan didirikan gudang peluru dan batu bara dibeberapa tempat (lihat tabel).

Tempat	Jumlah Gudang	Daya Tampung
Teluk Bima	8	1500 ton
Pulau Buton	5	1000 ton
Teluk Kwandung	3	500 ton
Gorontalo	4	800 ton
Natuna	4	800 ton

Nampak Sultan merasa ditekan sehubungan dengan rencana pembangunan gudang-gudang batu bara di bawah kekuasaan Belanda. Masalah itu lalu diatasi dengan dikirimnya seorang Sekretaris urusan Pribadi oleh pemerintah kolonial yang berkedudukan di Makassar

ke Buton. (Algemeen Politieke Verslag Arsip Makassar 1/3 1857 ANRI-J).

Persoalan yang masih harus diatasi itu dapat dilihat dari hal yang diuraikan berikut ini. Pada bulan September 1856, datang di Makassar utusan Sultan Buton yang memang sudah biasa setiap tahun dilakukan, tinggal selama 3 bulan di sana. kesempatan itu digunakan untuk membuat persetujuan dengan mengirim Sekretaris Pertama Pemerintah Hindia Belanda, Bakkers pada 22 Juni 1857, mengenai penempatan gudang-gudang batu bara di pulau Buton. Pada akhirnya dapat perhatian, karena adanya keberatan yang sebenarnya tidak begitu serius.

Masalah yang muncul itu dapat dimengerti karena tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Kesultanan Buton berusaha menutupi masalah itu dengan banyak bukti persahabatan dan bukti-bukti yang cukup, meskipun demikian selalu saja Sultan menunjukkan keberatannya. Oleh sebab itu diadakanlah pembicaraan baru dengan Sultan untuk mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. (Algemeen Politiek Verslag Arsip Makassar No. 1/3 1857 ANRI-J).

Pada bulan April 1858 telah berhasil dibangun satu gudang. Dan kira-kira lima tahun telah dibangun gudang batu bara yang dimaksud. Untuk pekerjaan tersebut, Belanda memberi imbalan 240 Gulden. Akan tetapi dalam pembayaran berikutnya ditolak oleh Sultan Buton. Hal itu dianggapnya sebagai hubungan antara "buruh dan majikan". Sultan Buton menginginkan agar hubungan itu sebagai dua pihak yang bersahabat. (Zahari, 1977 : jilid II,71).

Gubernur Sulawesi mengusulkan kepada Gubernur Jenderal agar menyatakan kepuasannya dan penghargaan kepada Sultan Buton atas sikap baiknya terhadap kepentingan Belanda karena pembangunan gudang tersebut. (Missief Gubernur Sulawesi kepada Gubernur Jenderal di Batavia, 6 Juli 1861, lamp. *Besluit*, 2 Maret 1856). Oleh karena jasa-jasanya dalam mempererat persahabatan itu, dalam bulan April 1863, Sultan Muhammad Isa (Sultan Kaimuddin II) dianugerahi "Bintang Mas Besar" dari raja Belanda. Dengan kata-kata yang halus tetapi memberikan nuansa penilaian yang cukup kritis dari Sultan

ketika ia menerima hadiah itu adalah “Kami merasa terharu atas pemberian bintang kehormatan ini. Pada lahirnya kami bergembira, tetapi sebaliknya, batin kami merasa berduka, sebab kami takut kalau-kalau cahaya bintang yang tergantung pada dada kami sekarang ini tidak dapat menyinari rakyat yang bernaung di bawah lindungan kami”. (Zahari, 1977 : Jilid II, 71).

Sehubungan dengan kerjasama itu, Sultan Buton mengajukan syarat supaya pandu laut diangkat dan diurus oleh Sultan sendiri. Pemerintah Belanda menerima usul itu dan untuk membangun setiap gudang sultan akan menerima uang sebesar f 240 untuk pekerjaan itu. Selain itu Pemerintah Belanda juga memberikan 38 pikol beras. Hal itu terlihat pada penyelesaian gudang yang pertama. Tetapi sultan kemudian mengatakan bahwa pemberian itu tidak perlu lagi diberikan. Ia menganggap pekerjaan itu sebagai bukti persahabatan kedua pihak.

Hubungan ke Dalam : “Barata”

Dalam tahun 1838 undang-undang Barata diperbaiki disesuaikan dengan perkembangan masa ketika itu. Pembaruan undang-undang Barata dilakukan pada masa Sultan Kaimuddin I. Beberapa hal perubahan undang-undang Barata nampak dalam

4.2 Perjanjian 1873 : Masuknya Buton ke Dalam Wilayah Pemerintah Hindia Belanda

Suatu perjanjian yang menentukan arah perkembangan Buton menjadi bagian wilayah pemerintah Hindia Belanda adalah yang ditandatangani Sultan Kaimuddin III dengan A. Ligtoet, Sekretaris urusan Dalam Negeri Hindia Belanda pada 7 Agustus 1873. Sultan Kaimuddin III memerintah Kesultanan Buton dari 1871-1885. Perjanjian itu selain mengikat Kesultanan Buton, pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan kontrak dengan kerajaan-kerajaan lain : Gowa, Sidenreng, Tanette Sanrobone, Binamu Bangkala dan Laikang. (Ligtoet, 1978 : 105).

Isi Perjanjian

Dari 29 artikel isi perjanjian 1873 dapat diperlihatkan mengenai isi yang hakekatnya penyerahan dan pengakuan Buton kepada kekuasaan Kesultanan Buton kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam artikel 1 : Sultan dan para pembesar kerajaan Buton menyatakan bagi keturunannya bahwa Kerajaan Buton merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan sebagai akibat kerajaannya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda (Nederland). Artikel 2 : Sultan Buton dan para pembesar kerajaan berkewajiban terus mempertahankan ikatan yang bersahabat dengan pemerintah Hindia Belanda; musuh dari Belanda menjadi musuh Buton dan Buton harus membantu Belanda baik dengan kekuatan orang-orangnya, persenjataan dan pelayarannya untuk menghadapi musuh Belanda dan juga membantu sahabat Belanda.

Artikel 3 : Sultan dan pembesar kerajaan tidak berkirim surat, ucapan terima kasih, pengiriman utusan untuk tujuan kekuasaan kepada negara-negara lain. Hal itu dapat saja dilakukan setelah diketahui dan mendapat persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda. Demikian pula Buton tidak diperbolehkan menerima surat ucapan terima kasih dan penerimaan utusan dari negara lain. Artikel 4 : Sultan dan pembesar kerajaan berkewajiban membiayai pekerjaan-pekerjaan untuk keperluan pemerintah Hindia Belanda semua pertahanan, bangunan dan militer yang dalam tahun belakangan dibutuhkan pemerintah Hindia Belanda di dalam negeri Kesultanan Buton.

Artikel 8 : Sultan dan pembesar Kerajaan Buton berkewajiban membantu memajukan kesejahteraan dan dengan haknya mengatur pertanian, industri, perdagangan, perkapalan dan semua perusahaan yang masih berjalan dan bermanfaat supaya dilindungi; tidak membuat peraturan yang menghalangi dan tidak menekan kemajuan individu dan barang-barang penduduk. Artikel 11 : Sultan dan pembesar kerajaan memerangi dengan segala kekuatannya menghadapi bajak laut. Artikel 12 : Sultan dan pembesar kerajaan berkewajiban dan berkepentingan dengan semua perkapalan dan pelayaran yang di

pantai-pantai kerajaannya dalam keadaan sangat merosot, untuk memberikan pertolongan, memelihara bengkel kapal.

Artikel 13 : Sultan dan pembesar kerajaan berkewajiban menjaga kapal-kapal atau pelaut, baik yang di laut dan perairan pantai di dalam kerajaan untuk membawa pemilik atau yang tak dikenal demi maksud kepentingan umum. Butir 14 : Sultan dan pembesar Kerajaan berkewajiban memberitahukan kepada Gubernur Sulawesi dan Wilayah Kawasannya mengenai kapal atau dibawa dari laut kapal-kapal atau barang-barang yang ketika terdampar. Butir 16 : Sultan dan pembesar kerajaan tidak diizinkan adanya perompak dan perdagangan budak yang waktu itu masih ada perdagangan budak. Butir 19 : Sultan dan pembesar kerajaan berkewajiban tidak diperbolehkan memberikan wilayahnya untuk orang-orang Eropah atau orang Timur Asing lainnya dan membiarkan mereka mendirikan benteng di luar pelabuhan tanpa seizin dan sepengetahuan Gubernur Sulawesi dan wilayah kawasannya. Tetapi para pedagang diperbolehkan berada di pelabuhan kerajaan Buton sejauh mendapat persetujuan dan tidak membuat kerusuhan dan menjaga ketenangan.

Artikel 21 : Para pedagang dan pelaut dari Kerajaan Buton harus mengibarkan bendera Belanda, dan perdagangan di Jawa dan seluruh negeri lain di bawah kekuasaan Hindia Belanda yang merupakan subyek hukum pemerintah Hindia Belanda. Artikel 22 : Kesultanan Buton berkewajiban menggunakan mata uang yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda sebagai alat tukar di Kerajaan Buton. Artikel 23 : Sultan dan pembesar kerajaan berkewajiban menerima kedatangan kapal-kapal yang membawa orang dan batu bara untuk depot di Buton dan kapal-kapal uap untuk mengambil batu bara, dengan mengajukan permintaan kepada penguasa atau komandan bagi kapal-kapal untuk melakukan bongkar dan muat untuk itu disediakan keperluan kuli-kuli dengan pembayaran yang sesuai.

Artikel 26 : dengan adanya Sultan yang wafat atau pergantian Sultan maka diberitahukan kepada Gubernur Sulawesi. Para pembesar kerajaan memberitahukan siapa yang menurut peraturan dalam negeri menjadi penggantinya. Pemilihan mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi dengan sepengetahuan Pemerintah Hindia Belanda secara

tertulis. Artikel 27 : Pemerintah Hindia Belanda menyatakan tidak akan mencampuri Kerajaan Buton sepanjang Buton memegang teguh persetujuan ini.

Isi sebuah perjanjian betapapun ia telah ditanda tangani oleh seorang Sultan yang harus ditaati oleh penggantinya, tidak harus begitu dalam hal pelaksanaannya. Sultan Buton ke 33, Muhammad Umar bergelar Sultan Kaimuddin IV yang berkuasa 1885-1904, nampaknya tidak merasa terlalu terikat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pendahulunya, Sultan Kaimuddin III. Sebagai Sultan yang baru diangkat ia memang harus menandatangani perjanjian baru dengan Belanda yang dilakukan pada 18 Juli 1887, sebagai perwujudan dari perjanjian terdahulu yang menyatakan akan ditempatkan wakil Belanda di Buton. Akan tetapi pernyataan itu ditolak oleh Kaimuddin IV.

Tiga bulan kemudian datang kembali utusan Belanda dengan didukung pasukan yang lengkap persenjataannya. Usaha utusan Belanda ini untuk memaksa Muhammad Umar untuk menerima penempatan wakil Belanda di Buton. Muhammad Umar tetap saja tidak mau menerima. Sultan Kaimuddin IV memerintahkan rakyat bersiap-siap menghadapi bahaya perang yang akan meletus, dengan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam kerangka inilah dibangun benteng di Kalidupa, Wasuamba. (Zahari, 1977, III : 80-81).

Orang Buton Yang Migran

Dalam tahun-tahun 1870-an terlihat adanya persoalan yang dialami kesultanan Buton mengenai adanya ulah para pangeran Buton di kepulauan Maluku sehingga mengakibatkan banyaknya keluhan kepada pemerintah. Sudah sejak tahun 1870-an penduduknya dari Binongko, Tomea dan dari bagian-bagian lain yang termasuk kepulauan Tukang Besi pergi mencari kerja di kepulauan Maluku. Mereka kadang dapat menabung penghasilannya yang kemudian dikirim ke daerah asalnya. Setelah adanya pelarangan perdagangan budak maka Banda mengalami kekurangan pekerja dan tidak cukup dengan mendatangkan buruh-buruh dari Jawa. Dalam kaitan ini Gubernur Maluku minta kepada Gubernur Sulawesi dan Sultan Buton

agar penduduk di pulau-pulau itu diberi izin untuk bekerja di Banda dengan mendapat upah yang baik. Gubernur Sulawesi meneruskan permintaan itu kepada Sultan yang nampaknya juga memberi persetujuan untuk menambah orang-orang Buton di wilayah asisten residen Banda. Tetapi karena kedatangan para pangeran Buton dalam tahun 1870-an di Maluku untuk menarik pajak, dalam tahun 1875 kegiatan itu dilakukan sendiri oleh saudara Sultan yang sudah turun tahta, bernama I Jaruna Dipumalangan. Ia pertama kali datang di Ambon menghadap residen tanpa surat izin perjalanan (surat pas). Tetapi ia tidak membuat kekacauan. Ia kemudian mengunjungi pantai selatan Seram dan Banda lalu kembali lagi ke Buton.

Pada awal 1876, orang-orang Buton di Banda melakukan keonaran sehingga kekuatan militer harus mengambil tindakan untuk mengakhirinya. Beberapa bulan kemudian datang di Banda beberapa perahu dengan jumlah orang yang banyak dan dipersenjatai di bawah pimpinan pangeran Buton bernama La Ode Kungku Ijaruna Lulibu yang membuat kerusuhan. Setelah diberi nasihat dan pertimbangan dua pangeran itu dipulangkan melalui Ambon dan dari sana kemudian ke Makassar. Pada bulan Mei 1876 mereka dikirim kembali ke Buton, sementara Sekretaris Urusan Pribumi Ligvoet dengan kapal uap "Bangka", perahu utusan Buton itu ditarik dan dibawa ke Buton. Mereka dihadapkan kepada Sultan dan minta kepadanya pencegahan akibat adanya pangeran Buton yang berkeliaran ke mana-mana dengan atau tanpa surat izin supaya ditertibkan. Sultan akan menerapkan peraturan untuk itu.

Tujuan pemerintah Hindia Belanda untuk mengendalikan kekuasaan di wilayah Sulawesi Tenggara dan pantai timur Sulawesi perlu dilengkapi oleh sejumlah prasarana yang mendukungnya. Perluasan kekuasaan itu tidak saja dimaksudkan untuk membasmi bajak laut yang banyak beroperasi di perairan itu tetapi juga untuk mengendalikan kekuasaannya di kerajaan-kerajaan bawahannya. Salah satu prasyaratnya adalah kemudahan bagi kapal-kapal Belanda untuk memperoleh bahan bakar misalnya batu bara. Untuk itu rencana pembangunan gudang-gudang itu di Buton sangat diperhatikan. Dalam bulan Mei 1876 mulai lagi dibangun gudang-gudang batu bara di pantai timur Bau-Bau. Meskipun bahan-bahan perlengkapan

pembangunan gudang itu didatangkan dari Makassar, tetapi tenaga kerjanya disiapkan dari Buton sendiri. Kurang lebih satu bulan gudang untuk penyimpanan batu bara telah selesai didirikan. (Ligtvoet, 1878 : 109-111).

Sejak bulan Februari 1877 pelayaran secara teratur satu kali sebulan telah dapat dilakukan oleh NISM melalui perairan Buton. Dengan demikian pemerintah Belanda dapat lebih banyak lagi mencapai Buton, dalam rangka penegakkan kekuasaannya di sana. (Ibid, 112).

4.3 Perjanjian Panjang “Asyikin-Brugman” 1906

Sebuah perjanjian yang memperlihatkan semakin merasuk kekuasaan Belanda di wilayah Kesultanan Buton adalah perjanjian yang ditandatangani Muhammad Asyikin bergelar Sultan Aidil Rakhim dengan Residen Brugman pada 8 April 1906. Perubahan nyata yang terdapat dalam isi perjanjian itu adalah dalam bidang pemerintahan. Pemerintah kolonial telah membentuk 22 distrik yang terdiri dari beberapa kampung atau kadie yang dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari kalangan bangsawan. Mereka diberi gaji setiap bulan bergantung dari luas daerah distrik dan besarnya jumlah penduduk. (Zahari, 1977, III : 89-90).

Selain dari itu hal yang menunjukkan semakin kuatnya penetrasi kolonial ke dalam masyarakat Buton terlihat dalam beberapa pasal perjanjian. Pasal 1 : Sultan Buton dan pembesar kerajaan dan para menteri berjanji akan patuh dan taat setia kepada Raja Belanda atau wakilnya. Pasal 2 : Kerajaan Buton serta semua pulau-pulaunya dan lautannya telah masuk ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pasal 9 : Sultan Buton dan pembesar kerajaan akan menyiarkan kepada rakyatnya supaya memakai bendera Belanda di lautan maupun di darat dan tidak boleh sekali-kali memakai bendera lain kecuali Sultan Buton dapat memakai bendera kerajaannya tetapi harus bersama dengan bendera Belanda. Pasal 11 : (1) apabila Pemerintah Belanda membuat benteng di dalam Kerajaan Buton, dapat juga menempatkan pada benteng itu orang-orang Belanda sebagai penjaganya dan di mana saja tempat di bangun benteng (2) apabila di

dalam benteng itu dibangun dengan rumahnya maka wajib diberi bantuan tenaga kerja yang nanti mereka itu diberi upah oleh Belanda. Pasal 13 : (1) Sultan Buton dan pembesar kerajaan tidak dibenarkan untuk memberikan keluasan kepada bangsa lain untuk berdiam di dalam kerajaannya, kecuali dengan izin Pemerintah Belanda.

Dalam bidang kekuasaan Belanda terlihat dalam pasal 20 dan 21. Pasal 20 : Semua orang penduduk asli yang bekerja bila ada pekerjaannya karena membuat kesalahan dijatuhi hukuman oleh pemerintah Belanda maupun orang pemerintah Belanda sendiri dengan tidak memandang besar kecilnya kedudukan orang itu. Pasal 21 : Sultan Buton dan pembesar kerajaan berkewajiban bila ada rakyatnya yang mendapat kesalahan wajib memberikan perkaranya untuk diadili menurut berat ringannya kesalahan yang dibuat.

Pasal 26 : Sultan Buton dan pembesar kerajaannya menetapkan baik di laut maupun di darat atau di sungai untuk menumpas perompak-perompak di mana saja diketahui adanya di dalam kerajaan Buton, wajib dicari dan ditangkap. Pasal 28 : Segala sesuatu seperti pembelian atau penjualan senjata tidak diperkenankan lagi oleh Pemerintah Belanda baik di darat maupun di laut. (Zahari, 1977, III : 95-97).

Adalah menarik disimak bahwa di dalam kalimat pertama isi perjanjian hampir selalu didahului dengan Sultan beserta pembesar kerajaan. hal ini menarik dan penting ditelaah oleh karena tidak selamanya keinginan Sultan didukung oleh para pembesar kerajaan yang lain, baik dalam mendukung atau sebaliknya yang menolak. Dalam proses pembuatan dan penandatanganan perjanjian "Asyikin-Brugman" terdapat persoalan dengan adanya pembesar kerajaan yang tidak setuju, yaitu Sapati Ani Abdul latif, yang waktu itu sebagai Kanepulu. Selain itu ada juga Muhammad Zuhri Raja Sorowalio, La Ode Baeuben, Abdul Hasan alias La Gune mantan Menteri Besar Matanayo dan La Sahidu mantan menteri Besar Sukanayo. (Zahari, 1977, III : 83).

Seputar persoalan pembuatan perjanjian "Asyikin Brugman" sebenarnya mulai terlihat ketika Sultan Kaimuddin IV wafat pada September 1904 dan pada tahun berikutnya akan diadakan pemilihan

Sultan yang baru. Seperti biasanya setiap Sultan yang baru berkewajiban menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Belanda dengan mengacu kepada perjanjian yang pernah dibuat oleh pendahulunya. Persoalan yang selalu dikhawatirkan timbul oleh pemerintah kolonial adalah jika penggantinya tidak mau membuat perjanjian, baik secara tegas maupun secara tersembunyi. Sebab hal itu akan menghambat dan merintangai keinginan Belanda untuk menguasai daerah kerajaan itu. pada bulan April 1906 datanglah detasemen dengan kekuatan 75 orang serdadu di bawah pimpinan seorang perwira penguasa sipil (*Civiel Gezaghebber*) di Buton, bersamaan dengan satu kapal perang dan residen Brugman yang bertindak atas nama gubernur Sulawesi dan Kawasannya, dengan maksud membuat perjanjian baru dengan Sultan Buton yang baru terpilih. Meskipun penandatanganan telah berlangsung, tetapi timbul perlawanan dari beberapa pembesar kerajaan yang tidak setuju dengan kontrak baru itu. Dalam bulan Agustus 1907 sekelompok orang yang melawan petugas pencatatan penduduk, dalam rangka penghitungan pembayaran pajak. Pada 1910 sejumlah kepala yang berkomplotan diasingkan. Perlawanan yang digerakkan dari kalangan bangsawan seperti itu seringkali muncul. (*Encyclopedia van Nederland Indie, 1917 : 314*).

Latar belakang dan sikap Pemerintah Belanda menghadapi pergantian Sultan berkaitan dengan pembuatan perjanjian baru dapat ditelusuri dari surat menyurat Sekretaris Pemerintah kepada Gubernur Sulawesi dan Kawasannya serta surat dari Gubernur Sulawesi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hal ini memperlihatkan sungguh-sungguh dan pentingnya masalah itu, tentang pergantian pemerintahan di *Landschap buton* dan soal persetujuan sebuah kontrak politik baru dengan pemerintah sendiri (*Zelfbestuur* ; maksudnya kesultanan Buton) di wilayah itu ternyata dipandang dengan cara melengkapi secara rencana kekerasan militer. Hal itu dapat dilihat dengan adanya usul supaya disiapkan satu atau lebih kapal perang ke Buton, yang menyertai Residen Brugman untuk mengadakan kontrak baru dengan Sultan yang baru terpilih. (Lihat surat Sekretaris Pemerintah de Groot kepada Gubernur Sulawesi dan Kawasannya, 22 April 1905 dalam *Archieven Financien No. 706 ANRI-J*).

Di belakang tujuan politik terlihat motivasi ekonomi Belanda di Kesultanan Buton. Dalam kaitan pembentukan pemerintah yang baru di Buton juga harus dikuatkan dalam kontrak itu untuk menetapkan hak penarikan pajak (*tolrechtenheffen*). Usul Sekretaris pemerintah Belanda itu diajukan agar rencana itu dapat dilaksanakan secara baik, meskipun ia berkeyakinan dengan kontrak baru itu dengan menempatkan pegawai-pegawai pemerintah orang Eropah di sana tidak diharapkan untuk sementara, sesudah kontrak itu ditandatangani Buton akan tinggal diam, tidak terjadi. Sebab Gubernur Jenderal melihat bahwa sebuah kontrak tidak diperhatikan, adalah merupakan hal yang lazim bahwa kontrak tidak dilihat sebagai kata-kata mati. Oleh sebab itu maka biaya yang akan dibayar lebih menyulitkan untuk menjaganya. (Ibid).

Walaupun sekarang lebih jauh telah menunjukkan jalan kepada urusan yang untuk sebagian besar akan tergantung pada kebijakan Buton untuk menempatkan pegawai pemerintah, jadi harus dipelajari. Pertimbangan Gubernur Jenderal dalam setiap hal tentang sarana yang diperlukan cocok menghadapi secara diam-diam atau aktif--perlawanan dari Buton. Adapun kekuatan yang dapat segera disiapkan dan diperbolehkan 12 penjaga bersenjata tidak cukup. Sebuah susunan pemerintahan yang terdiri atas seorang penguasa sipil (Civil Gezaghebber) dan penjaga-penjaga yang dimaksud dalam pendapat Gubernur untuk sementara tidak akan lebih baik terjadi untuk mengarah kepada pendirian pemerintah yang telah diatur, yaitu sementara sebab detasemen kecil militer (mula-mula satu peleton, kemudian satu seksi infantri) di Buton dipersiapkan tempatnya untuk tentara di bawah perintah seorang Letnan dan dipersiapkan untuk pemerintah sipil, kepada siapa fungsi penguasa sipil. (Ibid).

Dalam surat Gubernur Sulawesi kepada Gubernur Jenderal 22 Mei 1905, nampak bahwa persoalan berkenaan dengan penempatan pegawai pemerintah di Buton tidak berjalan lancar. Bagi pemerintah Belanda jelas bahwa penempatan itu sebagai bukti pengawasan kolonial di Buton. Lebih dari itu karena pemerintah kolonial mempunyai motivasi ekonomi. Berkenaan dengan pendirian kekuasaan kolonial di Buton, dikatakan bahwa penempatan satu peleton infanteri di Kepulauan Buton, masih separuh pekerjaan yang

telah dilakukan dalam rangkaian ingin menempatkan detasemen militer mencapai hak penuh. Disamping itu lalu lintas perairan juga merupakan sarana yang harus dikerjakan, tidak hanya untuk menunjukkan bendera tetapi juga kekuasaan Belanda. Dengan dukungan pemerintah sipil maka akan dapat dijalankan penarikan pajak dan dikembangkan terus. (Archieven Financien No. 706 ANRI-J).

Agar tujuan itu dapat dicapai, terutama sekali cocok adalah dengan kapal lebih disukai pelayaran dengan kapal uap. Untuk meyakinkan bahwa pembelian sebuah kapal sebagai yang dimaksud telah diajukan kepada Komandan Angkatan Laut dalam surat yang dikirim 2 Mei 1905. (Ibid).

Setelah penandatanganan kontrak, Belanda berhasil menempatkan petugas pertamanya, Kapten J. van Hecht didampingi Munting Napjunis (?). Mereka untuk sementara tinggal di bangunan yang dibuat dari bambu di tepi Sungai Bau-Bau (Ibid, 84). Seperti adanya kecurigaan terhadap hal itu, pada 19 April 1906 Sultan Buton menyatakan tidak berlakunya perjanjian 8 April. Pernyataan itu disampaikan melalui J. van Hecht untuk diteruskan ke Makassar. Pada 26 April Residen Brugman mengunjungi Buton lengkap dengan pasukan yang siap untuk bertempur apabila Sultan Buton menolak lagi untuk mematuhi perjanjian yang telah ditandatanganinya itu. Dari cerita yang diturunkan dikatakan bahwa sesungguhnya Asyikin tidak bersedia menyetujui konsep kontrak. Penandatanganannya dilakukan secara terpaksa, memenuhi desakan beberapa pembesar kerajaan yang merupakan pendukungnya selama ini.

Apapun penjelasannya, maka kerajaan Buton kini langsung berada di bawah kekuasaan Belanda. Sultan beserta pembesar kerajaan dan menteri dan Bobato menjadi pembantu belaka untuk Belanda. Dalam perkembangan politik selanjutnya Belanda dengan cermat melihat kemungkinan bahaya yang datang dari Sapati Ani Abdul Latif. ia bersama pengikutnya yang utama ditangkap dan diasingkan di Makassar. (Ibid,85).

Kekuasaan Belanda semakin leluasa diterapkan di Kesultanan Buton. Untuk memudahkan perluasan administrasi pemerintahan,

Belanda membuka jalan-jalan dan menetapkan kerja paksa (heerendiensten) dalam setahun sebanyak 42 hari bagi setiap orang harus menyisihkan waktunya bekerja tanpa gaji. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 22 Juli 1908. Di bidang pendidikan, pada 1909 pemerintah kolonial membuka sekolah untuk pertama kali di Bau-Bau "Sekolah Anak Bumi Putera" dan di Raha, Muna, pada tahun berikutnya. Jika di satu pihak Pemerintah mengembangkan kepegawaian dengan menggaji mereka sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat pemerintah. Akan tetapi di lain pihak Pemerintah Kolonial sejak 3 Mei 1910 telah meniadakan pegawai-pegawai adat dalam jabatan : Raja Sorowalio, Raja Badia, Kapitalao Matanayo dan Sukanayo, Kapita dan Sabandara. (Ibid, 87).

Konsepsi kerajaan tradisional yang dikenakan pada Buton dengan ditiadaknya jabatan-jabatan adat tersebut maka sudah tidak lagi dipertahankan keberadaannya. Petunjuk seperti ini membawa kesimpulan bahwa akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, kerajaan tradisional Buton sudah memudar dan keberadaan serta peran yang dimainkan sudah sebagian besar telah ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Memang ciri-ciri tradisional tidak sepenuhnya terhapus, setidaknya lembaga Sultan itu sendiri.

SIMPULAN

Kesultanan Buton adalah satu dari kerajaan-kerajaan di Nusantara yang paling awal berinteraksi dengan orang-orang Eropah. Kemunculan Kesultanan Buton itu sendiri sudah dapat dilacak sebelum kedatangan para pedagang atau musafir Eropah. Hanya saja sejarah Buton sebelum periode itu sulit direkonstruksi dengan sumber-sumber sejarah tertulis sezaman.

Kesultanan Buton ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal yang dimaksud adalah potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh aspek geografis dan aspek masyarakat, sedangkan faktor eksternal adalah dari luar yang disebut terdahulu. Kerangka itu digunakan untuk menjelaskan permasalahan seberapa jauh faktor-faktor integratif terwujud di dalam perkembangan sejarah kesultanan Buton. Faktor yang mendukung kemunculan Buton oleh karena termasuk dalam jaringan pelayaran di Nusantara. Letak geografis tentu merupakan faktor yang penting. Selain itu terdapat pula faktor sosial budaya dan faktor ekonomi.

Dalam kerangka itu faktor masyarakat telah membuktikan kemampuan Kesultanan Buton dalam pembentukan struktur dan corak birokrasi pemerintahan. Nilai-nilai keislaman merupakan sumber utama yang menggerakkan aktivitas kerajaan kedalam maupun keluar. Kesultanan Buton semakin berkembang kekuasaannya setelah Islam dijadikan dasar pemerintahannya.

Rentang waktu antara abad XVII sampai dengan XVIII merupakan periode yang sangat dinamis yang memperlihatkan

besarnya pengaruh eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah pertikaian-pertikaian perebutan hegemoni dan aliansi antara kekuatan di luar Kesultanan Buton yakni Gowa, Bone dan Ternate serta VOC. Sedangkan faktor internal adalah berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam Kesultanan Buton sendiri.

Abad XIX bagi Kesultanan Buton merupakan perkembangan masuk dan merasuknya kekuasaan Belanda sehingga keberadaan kerajaan tradisional sudah semakin memudar. Peranan politiknya semakin ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- *Algemeen Politieke Verslag* ANRI, Makassar No. 1/2 1856; no. 1/3 1857; No. 2/1 1866; No. 2/2 1867; No. 2/3 1868, ANRI-J.
- *Algemeen Secretarie Besluit 2 Maret 1856 No. 3* ANRI-J
- *Archieven Financien No. 706*, ANRI-J.
- *Ichtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Thn.1839-1848*
Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5, ANRI Jakarta 1977.
- *Militaire Memorie van het Landschap Boeton 29 Agustus 1919*,
Dalam Memorie van overgave Celebes Serie 2e Reel no. 23,
ANRI-J.

Wawancara

- *La Hazirun*, Bau-Bau 24 Agustus 1994.
- *M.A. Mulku*, Bau-Bau 24 Agustus 1994.

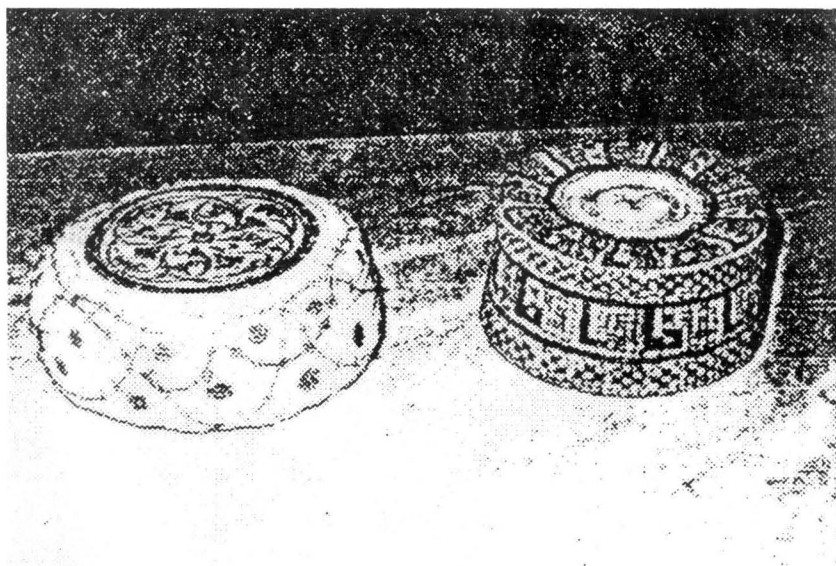
Buku

- Andaya, Leonard Y. *The heritage of Arung Palakka A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seven teenth Century*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1981.

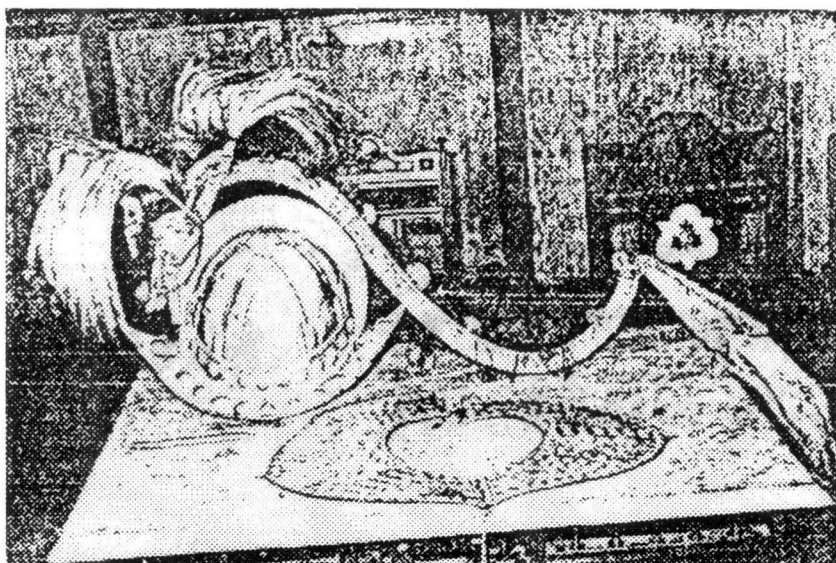
- Andi Zainal Abidin Farid; *Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta : 1973.
- Andi Zainal Abidin Farid; *Memori Kapten De Yonge*. Balai Pemerintahan Negeri Buton : 1916.
- Azra, Azyumardi, *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay Indonesia Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Doctor of Philosophy in the Graduate School; of Arts and Sciences, Columbia University, 1992.
- Bhurhanuddin, B, dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional di Sulawesi Tenggara*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- *Corpus Diplomaticum Nerlando Indicum : Eerste Deel; tweede Deel*.
- Couvreur, J, *Ethnografische Overzicht van Moena*, Raha, 1935.
- Depdikbud Ditjen Kebudayaan; *Monografi Daerah Sulawesi Tenggara* : 1978.
- Depdikbud Ditjen Kebudayaan; *Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara* : 1978.
- *Dokumentasi DPRD Tingkat I Sulawesi Tenggara*, DPRD Sultra: 1977.
- Lopian, A.B., *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari, Pidato Pengukuhan guru Besar Luar Biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, 1992.
- Ligtvoet, A., *Beschrijving en Geshiedenis van Boeton*, BKI, 26, 1878: 1-112.
- Mukhlis, *The Trade Route Network in the Eastern Part of Indonesia* papar on Seminar "Harbour Cities Along The Silk Roads, Surabaya, 9-14 January 1991.
- Nyompa, M. Johan Drs., dkk, *Terjemahan Sure'Galigo dan Sinrili di Sulawesi Selatan I,Ujung Pandang*, Universitas Hasanuddin, 1981.

- Pigeaud, Th., *Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History*, III, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960.
- Razak A, Dg. Patanru, 1967, *Sejarah Gowa*, Ujung Pandang
- Reid, Anthony (ed), *Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia*, St. Lucia-London-New York, University of Queensland Press, 1983.
- Roelofs, Meilink M.A.P., *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1969.
- Said D., *Peranan Benteng Keraton Buton Dalam Sistem Pertahanan Keamanan Kesultanan Buton*. Balai Penelitian Unhalu, 1989.
- Schoorl, J.C. (Pim), *Power, Ideology and Change in the Early State of Buton, Fifth Dutch-Indonesian historical Congress, State, Trade and Society, Teachers, Preachers and Pressmen*, Lage Vuursche-The Netherlands, 23-27 June 1986.
- -----, *Het Eeuwige Verbond Tussen Buton en de VOC 1613-1669*, dalam Harry A. Poeze dan Pim Schoorl (ed), *Excursions in Celebes, Verhandelingen BKI 147*, Leiden, KITLV, Uitgeverij, 1991.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies Selected Writing*, The Hague dan Bandung, Martinus Nijhoff, 1955.
- Susanto Zuhdi; *Buton Dalam Jaringan Pelayaran dan Niaga di Wilayah Indonesia Timur Abad XVI-XVII*. Makalah Seminar, Bali Denpasar, 1994.
- Thalha., *Kabupaten Sulawesi Tenggara Fase Perkembangan Ke Status Propinsi*, Biro hukum Setwilda Tingkat I Sulawesi Tenggara, 1982.
- Van Leur, J.C., *Indonesian Trade and Society*, The Hague, W. van Hoeve Publisher Ltd, 1967.
- Zahari, A. Mulku, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) jilid I, II, III*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

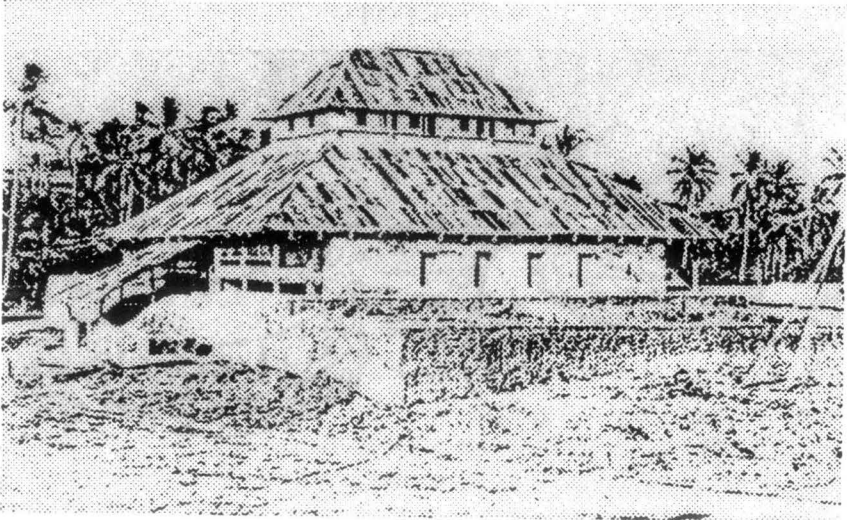
FOTO-FOTO



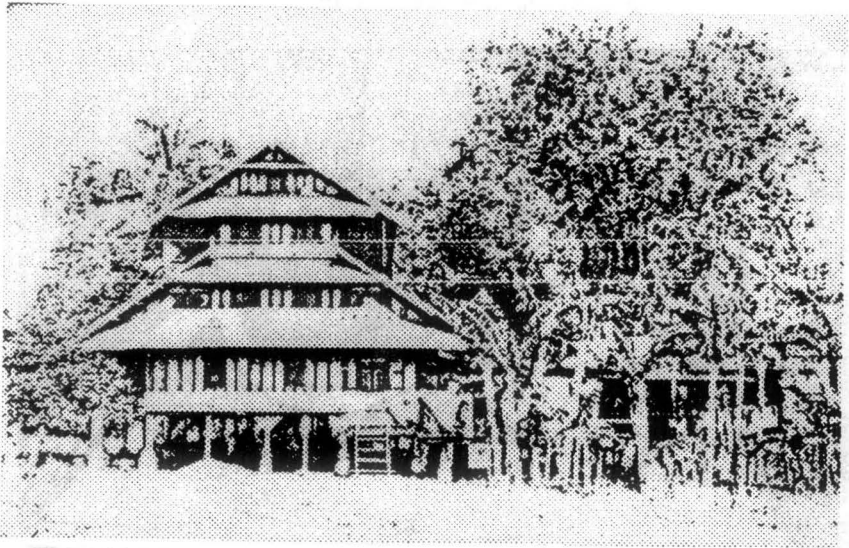
Bekas mahkota kebesaran Buton



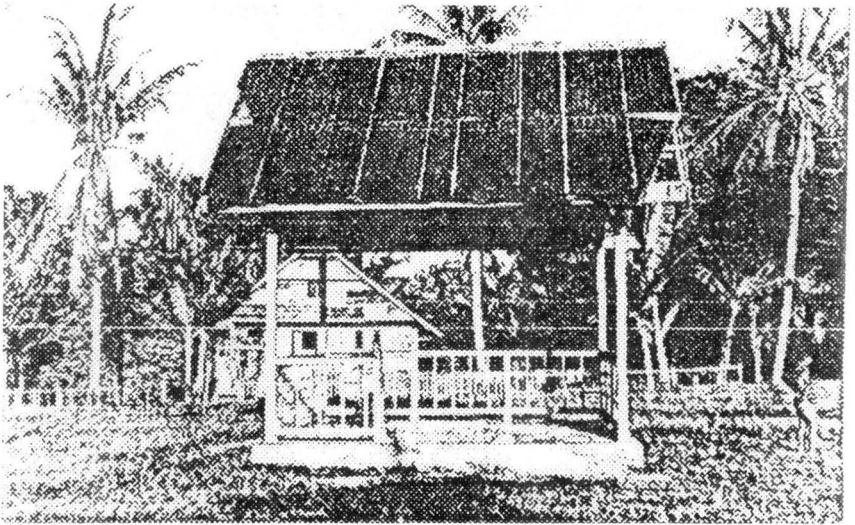
Topi kebesaran Sultan Buton



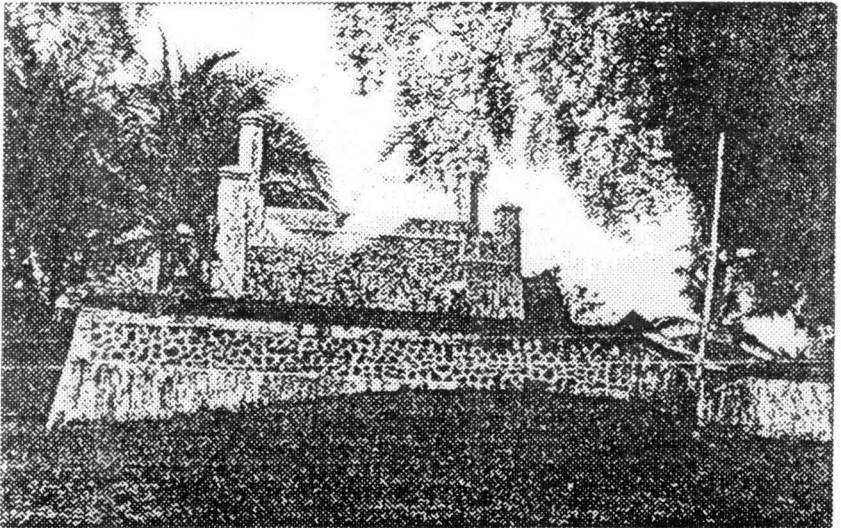
Mesjid Agung Keraton Buton (dari arah timur laut)



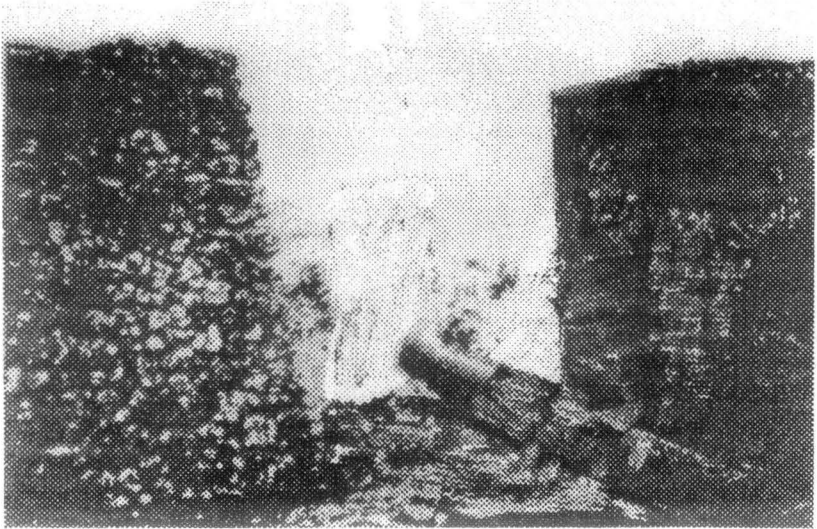
Bekas Istana Sultan Buton yang ke XXXVII, Sultan Muhammad Hamidi (La Ode Hamidi)



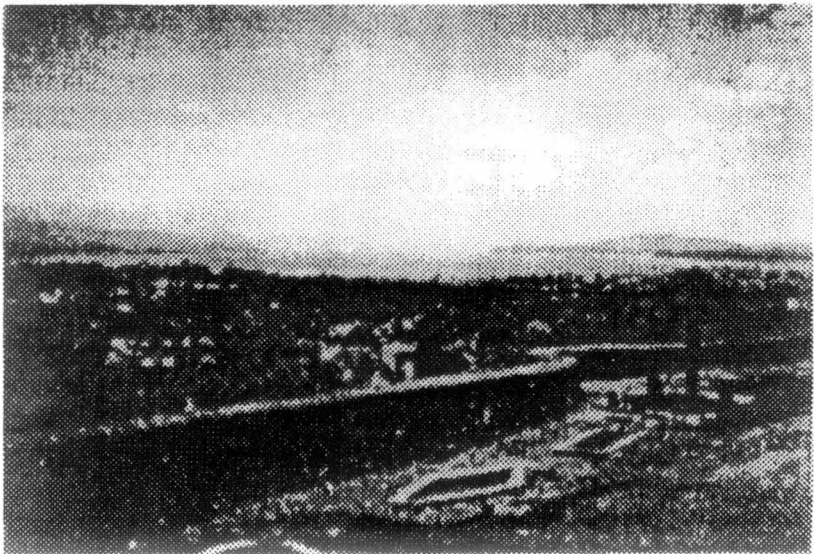
Bangunan pelindungan Batu Popaua.
TEMPAT PELANTIKAN RAJA DAN SULTAN



Makam Sultan Morhum (Sultan Buton yangke I)
di bukit Lalemangura



Sebuah meriam VOC, si salah satu "Jendela" Benteng Wolio.
(Foto Dok. : Tim Penulis)



Salah satu sisi dari Tembok Benteng Wolio
(Foto Dok. Tim Penulis)

Lampiran 2b

- A : Pangkal Garis Keturunan *kaumu tanailandu*, yaitu Sultan Dayyan Ihsan ad-Din.
B : Pangkal Garis Keturunan *kaumu tapi-tapi*, yaitu Sapati La Singga.
C : Pangkal Garis Keturunan *kaumu kumbewaha*, yaitu Kenepulu La Bula.

a, b, c, d, e, dan f: adalah para sultan abad ke-19.

Setiap raja yang berkuasa memiliki nama gelar kesultanan. Adapun nama-nama raja dan gelar kesultananannya adalah sebagai berikut.

No.	Sultan	Nama dan Gelar Kesultanan
1.	I	La Kilaponto bergelar Sultan Murhum
2.	II	La Tumparasi bergelar Sultan Qa'im ad-Din,
3.	III	La Sangaji bergelar Sultan Qa'im ad-Din,
4.	IV	La Elangi bergelar Sultan Dayyan Ihsan ad-Din,
5.	V	La Balawo atau Syams ad-Din bergelar Sultan Abd al-Wahhab,
6.	VI	La Bukeri bergelar Sultan Gafur al-Wadud,
7.	VII	La Saparagau bergelar Sultan Qa'im ad-Din,
8.	VIII	La Cilla bergelar Sultan Mardan 'Ali,
9.	IX	La Awu bergelar Sultan Malik Sairullah,
10.	X	La Simbata bergelar Sultan Adil Rakhiiyah
11.	XI	La Tangkaraja bergelar Sultan Qa'im ad-Din,
12.	XII	La Tumpamana bergelar Sultan Zain ad-Din,
13.	XIII	La Umati bergelar Sultan Diya ad-Din Isma'il,
14.	XIV	La Dini bergelar Sultan Saif ad-Din,
15.	XV	La Rabaenga bergelar Sultan Saif ar-Rijal,
16.	XVI	La Sadaha bergelar Sultan Syams ad-Din,
17.	XVII	La Ibi bergelar Sultan Nasir ad-Din,
18.	XVIII	La Tumparasi bergelar Sultan Muchir ad-Din,
19.	XIX	Lang Kariri bergelar Zaki ad-Din Durr al-'Alam
20.	XX	La Karambau bergelar Sultan Himayah ad-Din,
21.	XXI	Hamim bergelar Sultan Zaki ad-Din,
22.	XXII	La Seha atau La Maani bergelar Rafi' ad-Din,

- | | | |
|-----|---------|--|
| 23. | XXIII | La Karambau (jabatan yang kedua kalinya), |
| 24. | XXIV | La Djampi bergelar Sultan Qa'im ad-Din, |
| 25. | XXV | La Masulumu bergelar Sultan'Alim ad-Din, |
| 26. | XXVI | La Kopuru bergelar Sultan'Abd al-Gafur, |
| 27. | XXVII | La Badaru bergelar Sultan Anhar ad-Din, |
| 28. | XXVIII | La Dani bergelar Sultan Anhar ad-Din, |
| 29. | XXIX | Muhammad 'Isa bergelar Sultan Qa'im ad-Din I, |
| 30. | XXX | Muhammad Isa bergelar Sultan Qa'im ad-Din II, |
| 31. | XXXI | Muhammad Salih bergelar Sultan Qai'im ad-Din III, |
| 32. | XXXII | Muhammad 'Umar bergelar Sultan Qa'im ad-Din IV, |
| 33. | XXXIII | Muhammad Asyiqin bergelar 'Adil ar-Rahim, |
| 34. | XXXIV | Muhammad Husain bergelar Bayan Ihsan Qa'im ad-Din, |
| 35. | XXXV | Muhammad 'Ali bergelar Sultan Qa'im ad-Din, |
| 36. | XXXVI | Muhammad Safiu bergelar Syafi al-Anam, |
| 37. | XXXVII | Muhammad Hamid bergelar Sultan Qa'im ad-Din, |
| 38. | XXXVIII | Muhammad Falih bergelar Sultan Qa'im ad-Din. |
-

¹⁾ Direproduksi dari Zahari, *Sejarah III*, Hal. lampiran.

²⁾ Dikutip dari: 1. Zahari I. II, III, *Sejarah*; 2. Vonk, *op.cit.*, hlm. 165-180; 3. Man Arfa, *op.cit.*, hlm. 20-22.

Lampiran 3b

MASA -- PEMERINTAHAN SULTAN - SULTAN BUTON

1. Murhum (1546-1566) Lakilaponto/Latolaki/
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN I Timbang-Timbangan;
2. La Tumparasi (1570-1578) Oputa Mosabuna i
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN II Boleka;
3. La Sangadji (1584-1591) Sangia Makengkuna;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN III
4. Laclangi (1597-1631) Oputa mobilina Pauna;
SULTAN DAYANU IKSANUDDIN
5. La Balawo (1631-1632) Sangia i Watole;
SULTAN ABDUL WAHAB
6. La Buke (1632-1645) Oputa Sangia i
SULTAN GAFURUL WADUDU Kumbeweha;
7. La Saparigau (1645-1647) Oputa Mopogaana
Pauna;
8. La Cila (1647-1654) Oputa Gogoli Liwuto;
SULTAN MARDAN ALI
9. La Awu (1654-1664) Uputa moposuruna
SULTAN MALIK SUHULLAH Arataana;
10. La Simbata (1664-1669) Oputa Mosabuna
SULTAN ADILIK RAHIM i Lea-Lea;
11. La Tangkaraja (1669-1673) Oputa Mosabuna
SULTAN HASANUDDIN i Lakambau;
12. La Tumpamana (1675-1683) Oputa Ncilin-
cili/Sangia i Kaesabu;
13. La Umati (1685-1694) Oputa Sangia
SULTAN LIAUDDIN ISMAIL Kopea;
14. La Dini (1695-1702) Oputa kabumbu
SULTAN SYAFIUDDIN Malanga;
15. La Rabaenga (1702-1702) Oputa i Buana
SULTAN SAIFUL RIJALI Bone;
16. Laili/La Sadaha (1702-1707) Oputa Mosabuna
SULTAN SAMSUDDIN i Kaesabu;
17. La Ibi (1709-1711) Oputa Mosabuna
SULTAN NAZIRUDDIN i Lawangke;
18. La Tumparasi (1711-1712) Oputa Mosabuna
SULTAN MUZAHIRUDDIN Jupandai
19. La Ngkariri (1712-1751) Oputa Sangia
SULTAN TSAQUIDDIN DARUL ALAM Manuru/Oputa Sar

20. La Karambu (1751-1753) Oputa Mosabuna i Wasuembai
SULTAN HIMAYATUDDIN
21. Hamim (1753-1759) Oputa Sangia Wolowa;
SULTAN TSAQUIDDIN
22. La Karambau (1759-1763) oputa i Koo;
SULTAN HIMAYATUDDIN
23. La Maani/La Seha (1763-1764) Oputa Sangia i Tobetobe;
SULTAN RAFIUDDIN MALIK SURULLAH
24. La Jampi (1764-1794) Oputa Galampa Batu;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN
25. La Masalumu (1794-1798) Oputa Mosabuna i Wandailolo;
SULTAN ALIMUDDIN
26. La Kopuru (1798-1803) Oputa Sangia i Lawalangke;
SULTAN MUHAYUDDIN ABDU GAFUR
27. La Badaru (18-03-1821) Oputa Lakina Agama;
SULTAN DAYU ASRARUDDIN
28. La Dani (1821-1823) Oputa i Baluwu;
SULTAN ANHARUDDIN
29. Muhammad Ayrus (1824-1852) Oputa ko Pasdiana;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN IV
30. Muhammad Isa (1852-1871) Oputa i Tanga
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN V
31. Muhammad Salihi (1872-1886) Oputa Munara;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN VI
32. Muhammad Umar (1887-1904) Oputa i Baria;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN VII
33. Muhammad asykin (1906-1911) Oputa Antara Maedani;
SULTAN ADIL RAHIM
34. Muhammad Husain (1914-1914) Oputa Talumbulana;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN VIII
35. Muhammad Ali (1918-1921) Oputa i Dalana Uwe;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN IX
36. La Fiu (1922-1924) Oputa Moilana i Waera/Oputa Motembana Karona;
SULTAN SYAIFIUL ANAMI
37. Abdul Hamid (1928-1937) Oputa i Malige;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN X
38. Muhammad Falihi (1938-1960) Oputa i Baadia;
SULTAN MUHAMMAD KAIMUDDIN XI
39. Drs.H.La Ode Manarfa (1960-)
(Gub. Purnawirawan).

Lampiran 4 : Cap Kesultanan Abad ke-19

Cap Kesultanan Buton



Sumber . Dikutip dari surat Sultan tanggal 3 J Akhir tahun 1298 H/1880 M, dalam SBF : III

Lampiran 5 : Contoh Khotbah Jumat pada masa Kesultanan.

Sebuah Khotbah Jumat "gulangan" yang tersimpan di ruas bambu, ditemukan di Batauga, salah satu bekas *kadie*. Di dalamnya disebutkan nama Sultan Buton.

الحمد لله الواحد الأحد
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له والها غياثا صمد
وأشهد أن سيدنا محمد عبده
ورسوله المجدد صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما كثيرا ومجدا
إيها الناس
التقوا الله في شرا العلق
وراقبوه
فإنه يعلم منكم ما ظهر منها وما
كُتِبَ نَاوَعَامَوَاتِ اللّٰهِ أَمْرِكُمْ بِ
أَمْرٍ يُدْفِعُ فِيهِ بِنَفْسِهِ طَوْتِيَا بِمَلِكِيَّةِ
قَدْ سِيهِ قَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَسْرَلِ
قَالَ عَلَيْنِي مَا هَمَّتِ اللّٰهُ وَمَلِكِيَّةِ
يَصْلُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ طَوْتِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَمْتُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
مُحَمَّدٌ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ط وَبَارِكْ لِمَا لِي
مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
اللَّهُمَّ وَرِضْ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِكَ
اللَّهُ صَلِّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَ
جِلَاءِ عَلَيْهِ ط أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَيَّانِ
وَعَلِيٍّ وَطَاهِرَةَ وَالرَّبِيعَةَ وَسَعْدَ
وَسَعِيدَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَلَمِينَ الْحَسَّانِ
وَمَنْ جَمِيعِ الصَّالِحِينَ وَالطَّيِّبِينَ
وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ الْبَرَّةِينَ
وَعَلَى التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ
لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

وعلينا معهم بغير حساب
اللهم وحفظنا
المؤمنين بسراي المصون
السلطان محمد حامد قديم الدين
بن محمد المرحوم السلطان
محمد عيسى قائم الدين
اللهم عفر له ورحمه والوالد
والمشائخه في الدين
حسن الحائمه طيار العالمين
امين اللهم امين اللهم
والهمه لطريقه السيد والعدل
والاربابه انك ملك البر
كريم جواد اللهم واصليح
الاممنا وامننا وولنا وفضلنا
تعالوا علمنا وفضلنا وامننا

Lampiran 7

Perjanjian-perjanjian Buton dengan Belanda sejak jaman VOC (1613) memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bantuan pada Belanda jika diperlukan
- b. Aturan pelayaran dan perdagangan
- c. Persetujuan Belanda jika mengangkat raja baru
- d. Kawan/lawan Belanda adalah kawan/lawan Buton
- e. Larangan mengadakan hubungan dengan bangsa lain
- f. Penebangan pala/cengkeh di wilayah Buton diganti ruginya.

Pada 7 Agustus 1824 Buton menandatangani Perjanjian Bungaya diperbaharui di mana diatur adanya persekutuan raja-raja Sulawesi (Selatan dan Tenggara). Perjanjian ini antara lain berbunyi :¹⁾

- “ Art. 1. Er zal een altijd durende vrede, vried en bondgenoot schap bestaan tusschen het Nederlansch Governement en de na te noemen vorsten van Celebes.
- “ Art. 2. Het Gouvernement is het eerste hoofd van het bondgenootschappen schut-en schermheer van hetzelve.
- “ Art. 3. Er zal volstrekt geene Superieuriteit tuschen de overige bondgenooten bestaan, maar worden dezelve alle verklaard te zijn vrije en onafhankelijke heeren, onder welke geen onder-scheid bestaat dan dat van ouderen en jongeren broeder.
- “ Art. 4.
- “ Art. 5. De vrieden van het Gouvernement zullen de vrienden van de bondgenooten zijn, de vijanden van het Gouvernement ook de vijanden van dezelve, welke zij gehouden met volk en wapenen des gerequireerd tegen te gaan.
- “ Art. 6.

¹⁾ Ligvoet; 1878 : 90/91.

“ Art. 7. Alle geschillen tusschen de bondgenooten zullen moe-
ten worden besloten in den raad der bondge nooten, die te
Oejoeng Pandang zal residieren.

Deze raad zal uit en gepresideerd worden door den
Gouvernement, en uit de verschillende vorsten van
bondgenootschap of zoodanige gecommiteerden, als ieder
koning zal verkiezen tot de afdoening van het geschilte
zonden.

“ Art. 8.

Kerajaan Sulawesi Tenggara yang hanya menandatangani perjanjian
ini hanyalah Buton.

Dalam perjanjian ini masih tampak adanya kedaulatan dari tiap-
tiap anggota Persekutuan. Dengan kata lain bahwa kerajaan-kerajaan
Sulawesi adalah kerajaan-kerajaan merdeka hanyalah terikat dalam
suatu persekutuan, dengan pimpinan Persekutuan adalah
Gouvernement Belanda (gubernur Celebes).

Keadaan ini berubah dengan kedatangan A. Ligvoet (*Secretaris
voor de inlandsch zaken*) di Bau-Bau pada bulan Agustus 1873 dan
membuat perjanjian baru dengan Boeton. Perjanjian ini selengkapnya
berbunyi sebagai berikut²⁾

“ Art. 1. De Sultan en de rijksgrouten van Boeton verklaren voor
zich en hunne nakomelingen, dat het rijk van Boeton een
gedeelte uitmaakt van Nederlandsch-Indie en gevolgelyk
staat onder opperheerschappij van Nederland.

“ Art. 2. De Sultan en de rijksgrouten van Boeton verbinden zich tot
het voortdurend onderhouden van vrede en vriendschap met
het Nederlandsch-Indie Gouvernement, te zijn de vijanden
van de vijanden van Nederland en de vrienden van de
vrienden van Nederland, mitsgaders om op aanzoek van het
Nederlandsch-Indie Gouv. de hulp te verleen, welke in
hun vermogen is met menschen, wapenen en vaartuigen,

²⁾Ligvoet, *Ibid*, halaman 105.

tegen de vijanden van Nederland en aan de vrienden van Nederland.

- “ Art. 3. De Sultan en de rijkgrooten van Boeton verbinden zich om geen brieven, geschenken, zendelingen of gezanten te bestemmen naar de gezaghebbenden van eenige andere natie als de Nederlanders, en evenzoo geene brieven geschenken te nemen, noch zendelingen of gezanten te ontvangen van zoodanige gezaghebbenden zonder voorkennis en toestemming van het Gouv. van Ned. Indie. De Sultan en de rijkgrooten van Boeton verbinden zich tevens niet te gedoogen, dat die bestemming, aanneming of ontvangst van brieven, geschenken, zendelingen of gezanten door of namens hunne kinderen of aanverwanten plaats vinden.
- “ Art. 4. De Sultan en de rijkgrooten van Boeton verbinden zich om naar hun vermogen mede te werken tot de daarstelling ten koste van het Ned. Ind. Gouv. van alle versterkingen, gebouwen en magazijnen, welke het Ned. Ind. Gouv. later noodig achten mocht binnen het land van Boeton op te richten.
- “ Art. 5. De Sultan en de rijkgrooten van Boeton verbinden zich om alden grond binnen de omtrek van een paal rondom elke verstreking die het Ned. Ind. Gouv. binnen het land van Buton opricht, in vollen eigendom aan hetzelfde af te zullen staan.
Het Ned. Ind. Gouv. verbindt zich daarentegen om, indien tot dien afstand over bijzonder eigendom zoude moeten worden beschikt, deswege bilijke vergoeding te verleenen.
- “ Art. 6. De Sultan en de rijkgrooten van Buton verbinden zich geene versterking en op te werpen zonder voorkennis van het Ned. Ind. Gouv; en om zelfs die versterkingen, welke met dier voorkennis mochten opgeworpen zijn op de eerste aanzegging te slchten.

- “ Art. 7. Wanneer het Ned. Ind. Gouv. mocht goedvinden tegen deszelfs vijanden strijdmiddelen, zoowqel in manschappen als in oorlogsbehoeften en geschut het rijk van Boeten te doen doortrekken, of zendeligen naar die vijanden af te vaardigen, verbinden zich de Sultan en de rijks grooten alle gevorderde hulp en bijstand te bieden, en door hunne onderdanen te doen bieden, zoowel ten aanzien van het leveren van volk en vaar tuigen altot geven van levensoderhoud, alles ten koste van het Ned. Ind. Gouv.
- “ Art. 8. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich, het welzijn des volks te bevorderen, met rechtvaardigheid te regeren, den landbouw, de nijverheid, den handel, de scheepvaart en alle wettige en nuttige ondernemingen te bescherman, geene veroordeningen te maken, door welke die zouden belemmerd worden en niet willekeurig te beschikken over de personen en goederen van hunne onderdanen.
- “ Art. 9. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich om het voksonderwijs, zoo daartoe gelegenheid bestaat, krachtdadig en naar hun beste vermogen te odersteunen en te bevorderen.
- “ Art. 10. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich de koepok-ienting in Boeton naar hun beste vermogen te bevorderen.
- “ Art. 11. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich den zeeroof met alle macht tegen te gaan.
- “ Art. 12. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich alle schepen en vaartuigen, welke op de kusten van hun rijk in nood mochten vervallen, te verleenen bijstand, de schipbreukelingen te verzorgen, en zich geene van hunne toe te eigenen, dat hunne ondergeschikten zich die toe eigenen.

- “ Art. 13. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich schepen of vaartuigen, welke uit zee aan de stranden van hun rijk mochten aandrijven of aangebracht worden en welker eigenaren zijn, te bergen of wel toen behoefte van de belanghebbenden in het openbaar te verkoopen, indien die niet kunnen bewaard worden.
- “ Art. 14. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich, van het stranden of aanbrengen uit zee van schepen, vaartuigen of goederen onverwijld kennis te geven aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
- “ Art. 15. De Sultan en de rijks grooten van Boeton kunnen verderen hulp en bergloon; hetzelfde wordt naarmate van de moeite door den Sultan en de rijks grooten van Boeton berg groot; de Sultan geeft van deze begroting kennis aan den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
De belanghebbenden, die zich met deze begroting mochten bezwaard gevoelen, kunnen de beslissing inroepen van den gouverneur-generaal door tusschenkomst van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
- “ Art. 16. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich in hun rijk niet te dulden menschenroof en den handel in menschen, noch den in en uitvoer van slaven.
- “ Art. 17. De Sultan en de rijks grooten van Buton verbinden zich de bevoegdheid, om onder den grond te graven en uit dat graven vruchten te trekken, niet te zulden afstaan aan personen, niet behorende tot hunne inheemsche onderdanen, dan na voorafgaand overleg en in overeenstemming dienaangaande met den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, opdat bedoelde ondernemingen van nijverheid geregeld worden in het meeste voordeel van het rijk van Boeton, zonder dat het Ned. Ind. Gouv. zich in dat voordeel eenig aandeel verstaat voor te behouden.
- “ Art. 18. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich geene gronden te verhuren aan personen, niet behorende

to hunne inheemsche onderdanen, dan met voorweten van het Ned. Ind. Gouv. opdat die huur telkens, wanneer zulks het Gouv. van Ned. Ind. mocht noodig voorkomen, geregeld worden in overeenstemming met het Ned. Ind. Gouv. zonder eenig voorbehoud van wonst voor het Gouv. maar in het messte belang van Boeten.

- “ Art. 19. De Sultan en de rijks grooten van Boeton verbinden zich om aan Europeanen andere Westerche of Oostersche vreemdelingen geene gronden af te staan, en hunne toelating of vestiging buiten de havens van het rijk niet to vergunnen, zonder voorkennis en vooraf verkregen toestemming van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

Handelaars echter kunnen in de havens van het rijk van Boeten worden toegelaten en aldaar verblijf houden zonder die voorkennis en toestemming, zoolang zij de orde en rust niet verstoren.

Van hun gedurende meer dan drie maanden voorgast verblijf in die havens wordt Sultan en de rijks grooten van Boeten kennis ggeven aan de gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

- “ Art. 20. De Sultan en de rijks grooten van Buton verbinden zich aan allen, die zich met vergunning van het Ned. Ind. Gouv. binnen hun rijk bevinden, te verleenen bescherming van personen en goederen.

- “ Art. 21. Handelaren en vaartuigen van het rijk van Boeten moeten voeren de Nederlandsche vlag, en genieten in den handel op Java en alle andere landen onder het bestuur van het Ned. Ind. Gouv. al de regten, die aan onderdanen van het Ned. Ind. Gouv. zijn toegekent, mits voorzien zijnde voor Europeesch getuigde vaartuigen van eenen zeebrief en voor inlandsch getuigde vaartuigen van eenen behoorlijken pas van het Ned. Ind. Gouv. of van den Sultan van Boeton.

- “ Art. 22. De Sultan en de rijks grooten van Boeten verbinden zich de Ned. Ind. muntspecien, zooals die door het Ned. Ind. Gouv.

worden vastgesteld, steeds in het land van Boeten als gangbaar en wettig betaalmiddel toe te laten.

- “ Art. 23. De Sultan en de rijksgrooten van Boeten verbinden zich de aankomst van schepen, die stenkolen voor het depot te Boeton aan brengen en van stoomschepen, die kolen wenschen in te nemen, steeds op aanvraag van de gezaghebbers of commandanten dier schepen de tot het lossen en laden benoodigde koelies tegen billijke betaling te leveren.
- “ Art. 24. De Sultan en de rijksgrooten van Buton verbinden zich in het rijk niet toe te laten personen, die zich zonder verlof uit de land of zeemacht van Nederland of deszelfs bezittingen daar buiten mochten verwijderd hebben, noch misdadigers of veroordeelden uit eenig personen worden bij ontdekking dan wel op aanvraag aan het Gouvernement uitgeleverd.
- “ Art. 25. Om alle twisten over het straffen van misdadigers voor te komen, wordt uitdrukkelijk bepaald, dat elke misdadiger wordt gestraft volgens de wetten van het land op het land, waar hij zijne misdaad gepleegd heeft. Europeanen en met hen gelijk gestelden, Oostersche vreemdelingen zoomede Inlanders, te huis behoorende in landen onder regtstreeksch gezag staande van het Gouv. van Ned. Indie, en voorts allen, die de Christelijke godsdienst belijden worden, wanneer zij binnen Boeton eenig misdrijf plegen, aan het Gouv uitgeleverd om naar deszelfs wetten te worden te rechtgesteld.
- “ Art. 26. Bij overleiden of aftreden van den Sultan behooren de rijksgrooten daarvan onverwijld kennis te geven aan den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden. De rijksgrooten geven als dan tevens kennis, wie volgens de instellingen des lande tot opvolger van den Sultan gekozen is. De gekozen vorst wordt door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden onder nadere goedkeuring

van hed Ned. Ind. Gouv. erkend, en is gehoyden zich schriftelijk te verbinden tot de nakoming van de onderwerpelijk overeenkomst alvorens door het Ned. Ind. Gouv. te worden bevestigd.

- “ Art. 27. Het. Ned. Ind. Gouv verklaart zich met het invonding bestuur van het rijk van Boeten niet te zullen bemoeijen, zoolang deze overeenkomst door Boeton getrouw en stiptelijk wordt nagekomen.
- “ Art. 28. Omtrent punten, bij dit kontrakt niet voozien, en die nader blijken mochten in het belang van land en volk regeling te behouwen, wordt voorts overeengekomen, dat partijen zich deswege in de minne zuilen verstaan.
- “ Art. 29. Dit kontrakt vervangt alle vroegere overeenkomsten tusschen de voormalige Vereenige Oost Indische Compagnie of door het Ned. Ind. Gouv. met het rijk van Boeton gesloten, voor zoover dezelve strijdig zijn met het dit kontrakt overeengekomene.
Dit kontrakt werd door den Gouverneur Generaal bekrachtigd.”

Pada tahun 1667 Buton telah menandatangani perjanjian dengan VOC di mana Buton diharuskan menebang pohon cengkeh dan pala yang ada dalam kerajaannya dengan imbalan kerugian seratus ringgit setahun. Dalam perjanjian 1824 ganti rugi ini dinaikkan menjadi seratus dua puluh ringgit atau F1. tiga ratus (rupiah). Juga ditetapkan bantuan Belanda kepada Buton berupa mesiu dan peluru. Bantuan kepada Buton dari Belanda ditingkatkan lagi pada 1865. Di samping mesiu dan peluru sejak itu tiap tahun Buton memperoleh bantuan F1. seribu (rupiah). Bantuan mesiu dan peluru dihapus pada 1868 karena Belanda menganggap perairan Buton dan jalur Buton - Makassar telah aman dari gangguan bajak laut. Penebangan pala dan cengkeh dihentikan pada 1867 dan uang ganti rugi sebanyak 51. tiga ratus dijadikan hadiah tahunan bagi Sultan Buton dan pembesar kerajaannya.

Untuk mengawasi pelaksanaan penebangan cengkeh dan pala (sejak 1667) di Buton ditempatkan satu detasemen kecil tentara yang terdiri dari empat orang yang disebut "*kometer yang ke empat*" yang terdiri dari satu sersan, satu kopral, dan dua prajurit. Kemudian detasemen ini berubah fungsi (dan tidak lagi disebut Kometer yang keempat) menjadi pengawas gudang arang dan pengisian arang pada kapal-kapal perang dan kapal-kapal Belanda lainnya.³⁾ Gudang arang dibangun di Bau-Bau pada 1858.

Jika terjadi penggantian Sultan, maka Sultan Buton yang baru diwajibkan menandatangani perjanjian yang telah ditandatangani oleh Sultan-sultan sebelumnya. Penandatanganan ini sering dilakukan bukan oleh Sultan sendiri tetapi oleh utusan-utusannya di Fort Rotterdam di Ujung Pandang.

³⁾ Ligtoet, Ibid. halaman 23.

